



Dr. Abidin Wakano, M.Ag
Ummu Saidah, M.Pd.

REPRODUKSI GAGASAN MULTIKULTURALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA



LP2M
IAIN AMBON

DITERBITKAN OLEH:
LP2M IAIN AMBON 2019

REPRODUKSI GAGASAN MULTIKULTURALISME

DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Dr. Abidin Wakano, M.Ag
Ummu Saidah, M.Pd.

Diterbitkan oleh:
LP2M IAIN Ambon

REPRODUKSI GAGASAN MULTIKULTURALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

**Dr. Abidin Wakano, M.Ag
Ummu Saidah, M.Pd.**

ISBN: 978-602-5501-65-4

Editor:

Saidin Ernas

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: Bojan Bunglon

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: lp2m@iainambon.ac.id

www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, November, 2019

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Bagi kami yang teribat dalam penulisan buku ini, multikulturalisme merupakan sebuah tawaran konseptual yang sangat penting untuk mengelola keragaman agama, budaya, etnis, status sosial dan kepetingan politik yang telah menjadi realitas tak terbaantahkan di Indonesia. Kami memandang bahwa multikulturalisme penting untuk didesakkan ke dalam kesadaran publik, dan diseminasikan sebagai kebijakan politik dalam mengleloa keragaman berbangsa dan bernegara. Kampanye tentang multikulturalisme diharapkan sebagai strategi untuk memperkuat integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat, di mana keanekaragaman budaya dan agama benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menyikapi, misalnya, isu-isu separatisme, disintegrasi sosial atau fenomena radikalisme yang dalam satu dekade terakhir tumbuh bersama eforia kebebasan di Indonesia.

Pengenalan multikulturalisme potensial berperan solutif mengingat spirit dasarnya meniadakan asumsi tentang adanya kelompok *dominant* dan *subordinate* dalam setiap relasi sosial, dimana setiap kelompok dan individu berpeluang sama dalam mengekspresikan diri dan saling bekerja sama serta mencipta kohesi sosial bersama-sama pula. Kerangka piker multikulturalisme mendorong masyarakat untuk saling menghormati, masing-masing bebas mengekspresikan pilihan-pilihan kulturalnya, termasuk agama, tanpa ketakutan dan rasa keterancaman.

Selama proses penelitian lapangan hingga penulisan buku ini, kami telah dibantu oleh banyak pihak yang turut menentukan kesuksesan karya ini. Oleh sebab itu, perkenan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan, meskipun kami sangat menyadari bahwa ucapan terimakasih tentu belumlah sebanding dengan semua kebajikan dan ketulusan yang telah kami terima.

Ucapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada Rektor IAIN Ambon Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, yang telah menetapkan kami sebagai penerima bantuan Hiba Penelitian LP2M IAIN Ambon 2019, sekaligus memberikan izin kepada kami, yang saat ini memangku jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), untuk memanfaatkan waktu-waktu tertentu guna menyelesaikan proyek penelitian hingga penulisan buku ini. Trimakasih juga kepada para kolega dan staf di LPM, yang telah mensupport kami dan menjadi rekan kerja dan debat yang konstruktif. Demikian juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah mensupport penelitian kami dengan alokasi anggaran hingga berkenan menerbitkan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para reviewer dan tim penilai yang telah banyak memberikan masukan konseptual terhadap naskah proposal, hingga laporan akhir penelitian, hingga draft awal buku ini sehingga pada akhirnya dapat dipublikasikan. Ucapan terimakasih yang tulus juga disampaikan kepada para informan di IAIN Ambon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Ar-Raniri

Banda Aceh yang telah memberi kesempatan wawancara yang sangat bersahabat dan terbuka selama proses penelitian ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praksis sebagai masukan bagi proses pengarusutamaan gagasan multikulturalisme di Indonesia. Sebagai sebuah karya ilmiah, kami menyadari bahwa buku ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat megharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari khalayak pembaca untuk menyempurnakan buku ini.

Ambon, Oktober 2019
Tim Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul-i

KDT-ii

Kata Pengantar -iii

Daftar Isi-iv

BAB I PENDAHULUAN-1

A Multikulturalisme di Perguruan Tinggi-1

B Fokus Kajian dalam Buku ini-9

BAB II DISKURSUS TEORITIK TENTANG MULTIKULTURALISME DAN PELEMBAGAANNYA-14

A Multikulturalisme dalam Berbagai Publikasi-14

B Kerangka Teori Multikulturalisme dan Reproduksi
Sosial-15

BAB III GAGASAN MULTIKULTURALISME DI TIGA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA- 28

A. Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam-
28

1. Sejarah Pendirian Perguruan Tinggi Islam-29

2. Menguatnya Gagasan Moderasi dan
Multikulturalisme di PTKIN -44

B. Fenomena IAIN Ambon sebagai Kampus Multikural-
50

1. Sejarah Singkat IAIN Ambon-50

2. Visi dan Misi IAIN Ambon sebagai Kampus
Multikultural-56

3. Wacana Multikulturalisme dan Transformasi
Akademik di IAIN Ambon-58

- C. UIN Syarif Hidayatulla Jakarta dan Pengembangan Islam Mazhab Ciputat-64
 - 1. Sejarah Singkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-64
 - 2. Visi, Misi dan Pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-73
 - 3. Atmosfir Akademik dan Wacana Multikulturalisme di UIN Sahid Jakarta-76
- D. UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Kampus Islam di Negeria Syariat-87
 - 1. Sejarah Singkat UIN Ar-Raniri Banda Aceh-87
 - 2. Visi dan Misi UIN Ar-Raniri Banda Aceh-90
 - 3. Atmosfir Akademik dan Wacana Multikulturalisme di UIN Ar-Raniri Banda Aceh-92

BAB IV REPRODUKSI MULTIKULTURALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM INDONESIA -98

- A. Narasi Multikulturalisme di Perguruan Tinggi Islam-98
- B. Keterlibatan Aktor dalam Mempromosikan Multikulturalisme -116
- C. Analisis *Comparatif* terhadap Model Pelembagaan Multikulturalisme -122
- D. Pendidikan Multikulturalisme di Perguruan Tinggi dan Kontribusinya -128

BAB V PENUTUP-133

- A Kesimpulan -133
- B Saran dan Rekomendasi-135

Daftar Pustaka-137

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Multikulturalisme di Perguruan Tinggi

Indonesia telah ditakdirkan sebagai salah satu bangsa besar yang multikultur, terdiri dari beragam suku bangsa, agama, budaya dan sistem social yang bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Menurut Furnival, secara fakctual Indonesia adalah sebuah fenomena *pluralistic society* yang sulit dicari tandingannya di belahan dunia manapun.¹ Perjalanan sejarah yang panjang sebagai sebuah bangsa, telah menghadirkan realitas keragaman yang luar biasa. Sebuah data menyebutkan bahwa terdapat sekitar 350 bahasa, 600 suku bangsa dengan identitas masing-masing, juga terdapat 6 macam agama resmi yang diakui negara serta ratusan agama dan kepercayaan lokal yang masih hidup dalam sistem masyarakat di berbagai daerah.²

Selama rezim Orde Baru, fakta keragaman dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai potensi konfliktual yang dihadapi dengan cara-cara yang hegemonik. Negara melakukan penyeragaman dengan memaksakan identitas nasional yang tunggal, dan menghadapi penolakan dengan tindakan represif dan militeristik. Namun sejumlah konflik komunal yang terjadi di paruh akhir Orde Baru, menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola

¹ Lihat tulisan klasik Furnivall, *Netherlands India A Study of Plural Economy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1944)

² TIM BPS, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2011). Lihat juga data LIPI, 2009

keragaman dan perbedaan yang telah menjadi sesuatu yang *omni present* dalam masyarakat.³

Setelah dimulainya era reformasi, dunia akademik di Indonesia turut bekerja keras untuk mencari konsep pengelolaan keragaman yang diharapkan mampu menjaga eksistensi diversitas di satu sisi, namun juga mengokohkan dan merawat kepentingan dan keutuhan nasional di sisi yang lain. Proses pencarian konsep itu, ada yang dikembangkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya bangsa, dan ada juga yang diadopsi dari teori dan konsep-konsep besar yang telah berkembang dalam wacana social-politic di dunia Barat. Sebut saja misalnya teori pluralisme, yang beberapa waktu yang lalu mengundang kritik dari beberapa pihak, sebab dianggap menihilkan makna kebenaran dan menganggap semua agama adalah sama. Bahkan pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa Nomor : 7/Munas VII/MUI/11/2005 yang melarang tiga paham ideologis yang dianggap membahayakan keimanan seorang Muslim, yakni pluralisme, liberalisme dan sekularisme.⁴

Wacana lain yang kemudian banyak didiskusikan, adalah gagasan multikulturalisme (*multiculturalism*) yang belakangan menjadi wacana publik—seolah menggantikan diskursus pluralisme yang marak dibincangkan lebih dahulu. Hal ini semakin mengemuka setelah berbagai konflik sektarian yang melanda Indonesia pasca reformasi 1998. Para penganjurnya memandang multikulturalisme penting untuk didesakkan ke dalam kesadaran publik, dan diseminasikan sebagai kebijakan politik dalam mengelola keragaman berbangsa dan bernegara. Mengingat

³Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. (Newyork: Cambridge University Press, 2004)

⁴ Lihat <http://www.mui.or.id/files/07-Fat%20Munas-Pluralisme.pdf>. Diakses 12 September 2018

keanekaragaman di Indonesia menjadi sebuah konfigurasi yang harus dijaga dan ditata agar tidak berkembang menjadi potensi destruktif, yang menimbulkan konflik dan pertikaian.⁵

Kampanye tentang multikulturalisme diharapkan sebagai strategi untuk memperkuat integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat, di mana keanekaragaman budaya dan agama benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menyikapi, misalnya, isu-isu separatisme, disintegrasi sosial atau fenomena radikalisme yang dalam satu dekade terakhir tumbuh bersama euforia kebebasan di Indonesia. Pengenalan multikulturalisme potensial berperan solutif mengingat spirit dasarnya meniadakan asumsi tentang adanya kelompok *dominant* dan *subordinate* dalam setiap relasi sosial, dimana setiap kelompok dan individu berpeluang sama dalam mengekspresikan diri dan saling bekerja sama serta mencipta kohesi sosial bersama-sama pula.⁶ Setiap kelompok di masyarakat dituntut untuk saling menghormati, masing-masing bebas mengekspresikan pilihan-pilihan kulturalnya, termasuk agama, tanpa ketakutan dan rasa keterancaman.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, multikulturalisme diperlukan untuk membangun kesadaran beragama yang saling menghormati dan menghargai. Melalui multikulturalisme agama-agama diberi kesempatan hidup dan berkembang dengan keunikannya masing-masing. *Resiprositas* penghormatan tersebut dilakukan berlandaskan pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya lain tanpa menjadikan budaya sendiri

⁵ Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) *Fiqh Kebenikaan* (Bandung: Mizan, 2015)

⁶ Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) *Fiqh Kebenikaan* (Bandung: Mizan, 2015), h. 182

sebagai tolok ukur kebenaran tunggal-hegemonik bagi kebudayaan lain. Dalam konteks ini, multikulturalisme diharapkan mereduksi syndrome mayoritas dan minoritas yang destruktif. Itulah mengapa multikulturalisme acap pula disebut sebagai suatu ideologi yang berupaya meneguhkan kesederajatan di tengah perbedaan.⁷ Kemungkinan ke arah itu terbuka lantaran ruh fundamental yang melekat dalam multikulturalisme sendiri, yaitu kebersediaan menerima individu atau kelompok lain sebagai suatu “kesatuan” yang mengatasi seluruh diversitas budaya, termasuk perbedaan agama dan pilihan orientasi keberagamaan

Kondisi ini memperluas kajian tentang multikulturalisme yang sudah mulai berkembang dalam khasanah pemikiran sosial dan politik. Multikulturalisme dianggap relevan dengan kondisi sosial politik Indonesia dan menyediakan kerangka konseptual yang cukup memadai untuk membangun sebuah negara bangsa di atas keragaman agama, etnis, dan budaya.⁸ Dengan kesadaran multikulturalisme, suatu masyarakat yang multikultur dapat mampu melangsungkan pola-pola relasi sosial yang penuh toleran dan hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) seraya saling menenggang bentuk-bentuk disparitas yang melekat di diri setiap anggota masyarakat (*pro existence*), tak terkecuali disparitas agama dan orientasi keberagamaan.

Konsepsi positif tentang multikulturalisme, telah mendorong perbincangan akademik dan intelektual yang serius di perguruan tinggi, dijadikan bahan seminar, menjadi objek kajian di pusat-pusat studi, bahkan diadopsi sebagai visi dan misi lembaga;

⁷ Parsudi Suparlan, “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Makalah pada Sarasehan Nasional, *Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.

⁸ Lihat Raihani, *Creating Multicultural Citizens, A Potrayal of contemporary Indonesian Education*, (New York: Routledge, 2017)

pemerintah, organisasi masyarakat sipil, bahkan juga menjadi visi perguruan tinggi. Tampaknya perguruan tinggi Islam juga tidak diam mencermati wacana ini. Ada lembaga yang mengadaptasi secara terbuka dan melembaga, meski ada juga yang masih dalam proses diskursus ilmiah. Perguruan tinggi Islam di Indonesia juga mulai menyadari tentang pentingnya membangun konsep pengelolaan keragaman untuk kehidupan social yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal. Oleh sebab itu, dalam satu dekade terakhir gagasan multikulturalisme mulai menjadi diskursus akademik, dan terus direproduksi sebagai wacana intelektualitas yang penting di sejumlah perguruan tinggi Islam. Lembaga pendidikan Tinggi seperti UIN, IAIN dan STAIN mulai mendorong gagasan tentang Islam dan Multikulturalisme dan peluang pelembagaanya di Indonesia.

Beberapa intelektual dari kalangan perguruan tinggi Islam juga semakin intens mendorong wacana multikulturalisme tersebut. Misalnya dua intelektual terkemuka yakni; Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga, Azumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagi Amin Abdullah, multikulturalisme bisa menjadi tawaran alternatif yang menarik dalam pembangunan masyarakat multi etnik dan religi dibanding kerangka konseptual yang ditawarkan pluralisme (apalagi pluralisme sendiri menghadapi sitigma negative para ulama).⁹ Sedangkan bagi Azra multikulturalisme bisa membantu umat Islam untuk membangun kesadaran keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokratis (*democratic value*).¹⁰ Secara fundamental, nilai-

⁹ Lihat tulisan M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),

¹⁰ Azyumardi Azra, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai gagasan yang Berserak*, (Bandung: Nuansa, 2005). Lihat juga Azumardi Azra,

nilai yang ditawarkan gagasan multikulturalisme sebagaimana diungkap Azra, dianggap memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam universal yang selama ini menjadi *concern* kaomunitas perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Oleh sebab itu, proses pelebagaan gagasan multikulturalisme terus dilakukan secara sistematis. Setidaknya ada tiga perguruan tinggi Islam yang intens mereproduksi gagasan tentang multikulturalisme, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Pada lembaga yang pertama telah dibentuk lembaga-lembaga studi seperti Study of Religion and Culture (CSRC) yang di dalam visi dan misinya mengkaji secara serius wacana Islam inklusif dan multikultural. Munculnya berbagai studi dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi di UIN Syarif Hidayatullah yang mengkaji tentang multikulturalisme, menunjukkan adanya pengarusutamaan (*mainstreaming*) konsep multikulturalisme di Kampus Ciputat. Beberapa pemikir utama yang diwakili oleh Azumardi Azra, Fuad Jabali, Zakiyudin Baidhowi dan yang lainnya juga semakin intens memperbincangkan wacana multikulturalisme. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, gagasan multikulturalisme tidak dilembagakan secara formal, namun diimplementasikan dalam pandangan-pandangan inklusif di universitas, serta dijadikan landasan argumentasi tentang penerimaan mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis, agama

“Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika”. Paper presented at Simposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3, (Denpasar: Universitas Udayana, 2002) diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/307829218> (13 September 2018)

dan kepercayaan. Saat ini ada lebih dari seratus mahasiswa dari agama selain muslim yang diterima kuliah di sini.¹¹

Sedangkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon gagasan multikulturalisme telah diadopsi sebagai visi misi lembaga. Secara jelas disebutkan bahwa visi IAIN Ambon adalah “profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di kawasan ASEAN pada 2032.” Pencantuman konsep multikultural menandai arah baru pengembangan akademik di IAIN Ambon yang semakin responsive dengan kondisi kultural masyarakat Maluku yang secara nyata sangat multikultur, dan baru sembuh dari luka konflik agama selama lebih satu dekade yang lalu (1999-2004).¹² Pada tataran praksis atau sebagai implementasi dari visi multikulturalisme, IAIN Ambon mencoba mengembangkan sistem akademik yang mengarah kepada ide-ide multikulturalisme. Mulai dari perubahan kurikulum yang mewajibkan pengajaran mata kuliah multikulturalisme di semua jenjang pendidikan di IAIN Ambon, pembentukan beberapa pusat studi seperti; *Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC)*, dan *Center for Multicultural Education in Indonesia (CMEI)*, dan terakhir menerima mahasiswa dan dosen non-Muslim. Meskipun sejauh ini proses pelembagaan tersebut masih terus mencari bentuk, namun arah pengembangan akademik semakin mengukuhkan eksistensi kampus ini sebagai kampus muslim dengan spirit multikultural di kawasan timur Indonesia.

¹¹ Secara tegas Rektor UIN Jakarta mengatakan, “Non Muslim Boleh Belajar di UIN Jakarta,” lihat berita <http://www.uinjkt.ac.id/id/rektor-non-muslim-boleh-belajar-di-uin-jakarta/>

¹² Lihat berita online <https://www.annahmah.com/2015/01/09/bawa-mahasiswi-ke-gereja-uin-jatuhkan-sanksi-pada-dosen-rosnida/>. Diakses 27 Agustus 2018

Sementara itu di beberapa perguruan tinggi Islam yang lain, masih ada komunitas akademik, atau kelompok masyarakat yang masih terus mempertanyakan kehadiran wacana multikulturalisme, dan menganggapnya sebagai konsepsi Barat yang perlu ditolak. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh, pernah terjadi perdebatan sengit tentang ide dan gagasan pluralisme dan multikulturalisme yang dianggap berbahaya bagi pemahaman keagamaan. Peristiwa kecaman yang pernah diterima dosen UIN Ar-Rani Dr. Rosnida Sari, karena mengajak mahasiswa studi banding di sebuah gereja di Banda Aceh merupakan salah satu contohnya. Padahal menurut Rosnida, melalui kegiatan tersebut dia ingin mahasiswa UIN A-Raniri mengembangkan pemahaman akademik tentang multikulturalisme secara langsung di komunitas yang berbeda guna membangun “jembatan perdamaian” bagi umat Kristiani dan Islam di kota berjuluk “Serambi Mekah” itu.¹³ Tidak disangka kegiatan ilmiah tersebut justru dipandang sebagai penghinaan terhadap Islam, sehingga menuai kecaman dan juga ancaman pembunuhan.¹⁴ Rosnida dituduh sebagai intelektual lulusan universitas di Barat yang membawa paham-paham sekuler-liberal, seperti pluralisme dan multikulturalisme yang membahayakan Islam. Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh mengeluarkan kecaman keras terhadap Rosnida, dan meminta pemerintah dan perguruan tinggi Islam agar melarang kebijakan mengirim dosen-dosen untuk belajar Islam di negara-negara non-Muslim. Belajar Islam di Barat diyakini hanya menggerus keimanan dan menjauhkan seorang Muslim dari agamanya.

¹³ Saidin Ernas, Rosnida, Mukti Ali, dan Larangan Belajar Islam di Barat. Dimuat dalam Ambon Expres, 12 Februari 2015

¹⁴ Lihat situs berita Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dosen-iain-aceh-ajak-mahasiswa-kuliah-di-gereja-diancam-dibunuh.html>. diakses tanggal 27 Agustus 2018

Berbagai upaya mengkaji dan mengembangkan gagasan multikulturalisme di berbagai perguruan tinggi Islam, terutama di tiga perguruan tinggi yang dikemukakan di atas bisa menjadi bahan kajian menarik. Fenomena ini menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi Islam di Indonesia berusaha menemukan *best practise* dari proses reproduksi gagasan multikulturalisme yang dikembangkan dan bagaimana hal itu dilembagakan dalam berbagai kebijakan akademik, kurikulum dan atmosfer keilmuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian tentang reproduksi gagasan multikulturalisme yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini memiliki dua makna penting. *Pertama*, sebagai bentuk evaluasi atas perkembangan gagasan dan wacana multikulturalisme di perguruan tinggi Islam, yang dapat memperkuat kampanye pengembangan Islam moderat, Islam Washatiyah, Islam Nusantara dan berbagai gagasan inklusif lainnya. *Kedua*, Studi ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana sebuah gagasan akademik yang lahir dari pandangan ilmiah di Barat, dapat diadaptasi, dikembangkan dan diperdebatkan oleh komunitas PTKI, yang kemudian dikonstruksi sebagai bagian dari visi Islam di Indonesia yang moderat dan damai.

B. Fokus Kajian dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang hendak dikaji dalam buku ini adalah “reproduksi gagasan multikulturalisme di perguruan tinggi Islam di Indonesia”. Buku ini diharapkan dapat memberi dua manfaat sekaligus, baik secara teoritis-konseptual maupun secara praksis. *Pertama*, secara teoritis, penelitian ini akan melakukan refleksi kritis terhadap konstruksi gagasan multikulturalisme yang menjadi *worldview* perguruan tinggi Islam di Indonesia. Terutama terkait dengan teorisasi wacana multikulturalisme yang dibicarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian

Islam dan masyarakat. *Kedua*, secara praksis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemimpin dan pemangku kepentingan di perguruan tinggi untuk merumuskan kembali model studi, kurikulum, dan program lainnya yang mampu menginternalisasi konsepsi multikulturalisme kedalam atmosfer akademik di universitas. Dengan begitu eksistensi perguruan tinggi Islam di Indonesia bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan keragaman dan perbedaan dalam masyarakat di Indonesia.

Buku ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian institusional dengan pendekatan kualitatif, yang mengkombinasikan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Tiga perguruan tinggi Islam yang dipilih sebagai objek dalam kajian buku ini adalah, yakni; IAIN Ambon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Ar-Raniri Banda Aceh diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana gagasan tentang multikulturalisme dipahami dan dilembagakan dalam tradisi akademik di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Selain adanya dinamika yang berbeda dalam proses pengarusutamaan gagasan multikulturalisme di ketiga perguruan tinggi Islam tersebut, ketiganya juga dipilih karena diasumsikan dapat mewakili profil perguruan tinggi Islam dari tiga wilayah utama di Indonesia (Timur, Tengah dan Barat).

Adapun data-data di dalam buku ini dikumpulkan melalui model penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang tersaji dikumpulkan dengan cara-cara dan strategi pengumpulan data yang lazim digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat *qualitative*. Seperti pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth-interview*), serta studi dokumentasi. Berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa aspek signifikan dari empat tahapan tersebut. Penulis telah melakukan pengamatan

(*observation*) di tiga perguruan tinggi Islam yang mewakili tiga wilayah (region) di Indonesia. Pertama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang terletak di Kota Ambon Provinsi Maluku. Kedua, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang terletak di Ciputat pinggiran ibu kota negara Jakarta. Ketiga, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Observasi diperlukan untuk melihat secara langsung dinamika intelektual, maupun proses internalisasi dan pelebagaan nilai-nilai multikulturalisme yang dikembangkan di ketiga perguruan tinggi tersebut.

Penulis juga telah melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk menggali informasi langsung dari informan kunci (*key informant*) terhadap pemahaman dan gagasan, proses pelebagaan nilai-nilai dan upaya desimansi gagasan dalam ruang politik dan kebijakan.¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan pemimpin universitas, dosen dan mahasiswa di Ambon, Jakarta dan Banda Aceh sebanyak 18 orang. Proses wawancara dilakukan dengan memanfaatkan dua moementum sekaligus, yakni wawancara langsung (*face to face*) juga wawancara tidak langsung yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti *email*, *massanger*, *whatsup*, dan berbagai jenis media on-line lainnya.

Studi dokumentasi dilakukan dengan membaca buku-buku, sikripsi, tesis, disertasi, hasil kajian di pusat-pusat studi di masing-masing perguruan tinggi Islam. Studi pustaka dilakukan untuk menemukan data-data primer maupun sekunder, terutama yang terkait dengan pemikiran dan pemahaman tentang multikulturalisme, relevansinya dengan Islam, hingga implikasinya pada atomosfir akademik. Termasuk membuat studi

¹⁵ N.K. Denzin dan YS. Lincoln, *Handbook of Qualitatif Research*. (California: Sage Publication. 1994), hal. 12

perbandingan (*comparation*) dengan perguruan tinggi Islam lain di luar ketiga perguruan tinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini. Berbagai dokumen tersebut mendukung dan memperkaya analisis tentang pemahaman dan pemikiran, dan berbagai resistensi yang mungkin timbul ketika multikulturalisme di kampanyekan. Dengan begitu, penelitian ini akan memiliki kontribusi terhadap konsep-konsep baru yang mungkin untuk pengembangan gagasan multikulturalisme di Indonesia.

Setelah proses pengumpulan data dalam penelitian ini sudah dianggap cukup dan telah dilakukan pencatatan secara seksama atas semua data tersebut secara lengkap, maka tahapan terakhir yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Proses analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut. “Pertama”, menelaah data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan dikelompokkan secara tematis sesuai topic-topik yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian. “Kedua”, mengkaji kaitan data dengan konteks eksternal, seperti lingkungan social, budaya, ekonomi, dan juga politik di masing-masing perguruan tinggi. “Ketiga”, dilanjutkan dengan menyusun/memproses data dalam satuan (*unitizing*), serta melakukan kategorisasi dan penafsiran terhadap data tersebut. Metode interpretatif fenomenologis digunakan untuk melihat makna yang telah didapatkan dari data-data yang terkumpulkan. Selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan sesuai pertanyaan penelitian dan dideskripsikan dalam tulisan, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh.

BAB II

DISKURSUS TEORITIK TENTANG MULTIKULTURALISME DAN PELEMBAGAANNYA

A. Multikulturalisme dalam Berbagai Publikasi

Studi tentang multikulturalisme sudah berkembang luas di Indonesia dalam dua dekade terakhir, terutama setelah konflik social yang melanda Indonesia selama periode tahun 2000-2010. Tulisan-tulisan dari beberapa teoritisi Barat seperti Will Kymlicka (1995) dan Biku Parekh (2008) menjadi rujukan penting dalam kajian tentang multikulturalisme. Demikian juga catatan para Indonesianis seperti Robert Hefner (2007) yang tekun mempelajari transformasi *civil society*, dan mendorong gagasan multikulturalisme sebagai wacana politik keragaman. Sejak itu, berbagai kajian dan penelaitan tentang gagasan multikulturalisme menjadi suatu diskursus keilmuan yang penting dalam komunitas. Suatu fenomena yang sebetulnya juga pernah dihadapi masyarakat Barat.

Di Inggris perdebatan tentang pentingnya gagasan multiculturalisme dalam pengelolaan keragaman dianggap memberikan tempat bagi komunitas Muslim yang minoritas. Studi Ashoman Mondal pada tahun (2001), dengan judul *Islam And Multiculturalism: Some Thoughts on a Difficult Relationship*, memaparkan relevansi nilai-nilai multikulturalisme dan nilai-nilai universal Islam. Secara praksis multikulturalisme membuka ruang bagi komunitas muslim yang minoritas di Eropa untuk diterima dan diakui, meski hal itu tampak membuat tidak nyaman beberapa pemimpin konservatif. Itulah mengapa Mondal mendesak perlunya kajian yang intensif tentang Islam dan multikulturalisme di perguruan tinggi di Eropa, sebagai salah satu jawaban atas

pengelolaan keragaman di masa depan.¹⁶ Kajian yang hampir serupa tentang kebutuhan mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme bagi minoritas Muslim di Eropa juga bisa ditemukan dalam studi Krisnan Kumar, dkk., (2002).¹⁷

Di Indonesia sendiri studi tentang multikulturalisme lebih banyak didominasi tentang pendidikan multicultural yang tampaknya semakin mengemuka. Sebagaimana tampak dalam studi Fattah Hanurawan dan Peter Waterworth (1997) tentang *Multicultural Perspectives in Indonesian Social Studies Education Curriculum*.¹⁸ Studi Fattah dan beberapa publikasi lain tentang pendidikan multikultural ingin menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang menyerap nilai-nilai multiculturalisme. Demikian juga beragam studi yang membahas tentang relevansi multikulturalisme dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang bisa ditemukan dalam beberapa tulisan dari Azumardi Azra (2002), Amin Abdullah (2005), atau Baidhowi (tt) dan yang lainnya. Tulisan-tulisan tersebut ingin mengajukan tawaran wawasan cultural sebagai bagian penting dari dasar-dasar pendidikan keragaman yang penting bagi anak didik.

Penelitian ini justru ingin melihat dan memetakan secara lebih luas tentang bagaimana pemikiran tentang multikulturalisme

¹⁶ Lihat Ashoman Mondal, dengan judul “Islam And Multiculturalism: Some Thoughts On A Difficult Relationship”, (Brunel University, Uxbridge, UB83PH, UK, 2001), diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/336643.pdf>, 8 Agustus 2018

¹⁷ Lihat Krisnan Kumar, “The Nation-State, the European Union and Transnational Identities”, dalam Alsayyad and Manu el Castells (eds.), *Muslim Europe or Euro-Islam: Politics, Culture, and Citizenship in the Age of Globalization* (Berkeley: University of California at Berkeley, 2002), h. 53-68. Diakses melalui <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec06/6Clarke2.pdf>, 8 Agustus 2018.

¹⁸ Fattah Hanurawan dan Peter Waterworth (1997) tentang *Multicultural Perspectives in Indonesian Social Studies Education Curriculum*, dalam *The Journal of Education*, December 1997, volume 4, special edition.

yang terus dikembangkan di berbagai perguruan tinggi Islam, dan bagaimana para ilmuwan dan pemimpin perguruan tinggi mengadaptasi konsepsi multikulturalisme dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi Islam, serta secara bertahap didesakkan kedalam kehidupan public oleh komunitas perguruan tinggi Islam. Spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta mengandaikan adanya progresifitas pemahaman yang inklusif yang mendorong komunitas perguruan tinggi Islam untuk memiliki persepektif sendiri tentang multikulturalisme, yang secara produktif bisa dimanfaatkan dalam pembangunan sistem pendidikan tinggi Islam, maupun dalam mendukung pembangunan nasional

B. Kerangka Teori Multikulturalisme dan Reproduksi Sosial

Secara umum studi ini bermaksud membicarakan bagaimana gagasan multikulturalisme di pahami, dikaji dan dikembangkan oleh actor-aktor intelektual di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Oleh sebab itu ada dua teori besar yang akan digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori multikulturalisme yang mengandaikan pentingnya penghormatan dan pengakuan pada keragaman etnis, agama, budaya, dan kepentingan. Sedangkan untuk melihat bagaimana konsep multikulturalisme di dipersepsi dan diadaptasi di perguruan tinggi maka penelitian ini akan memanfaatkan teori reproduksi sosial, yang menyumbangkan konsep-konsep kunci seperti actor (agensi), narasi dan kepentingan. Berikut akan dijelaskan lebih jauh konsep-konsep kunci dari kedua teori tersebut sehingga membentuk suatu kerangka konseptual yang diperlukan untuk mengkaji topik utama dalam penelitian ini.

Teori tentang Multikulturalisme

Secara historis, konsep multikulturalisme mulai digunakan dalam wacana social di dunia Barat sejak tahun 1950 di

Kanada, Istilah ini diderivasi dari kata *multicultural* yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada, yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual.¹⁹ Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan menuliskan, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam bentuk pengakuan dan kesederajatan.²⁰

Dalam konteks ini, maka multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya, dan memperkuat prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*). Sebagaimana bisa dilihat pada berbagai definisi multikulturalisme yang dikemukakan para ahli. Pertama, menurut Azyumardi Azra multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.²¹ Kedua, menurut Bikhu Parekh, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala

¹⁹ Robert W. Hefner, *Politik Multikulturalisme- Menggugat Realitas Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

²⁰ Parsudi Suparlan, *Multikulturalisme dalam Robert Hener Politik Multikulturalisme.*, h. 5

²¹ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dapat diakses dalam <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20yymardi%20azra.htm>.2007.

kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.²² Ketiga, Lawrence Blum menyebut multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain,²³ sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Keempat, pengertian dari Ato Muzar yang menyebut multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.²⁴

Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas, golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Meskipun demikian bila dilacak lebih jauh pada sejumlah referensi (Fay, 1996; Rex, 1985 dalam Suparlan, 2002), multikulturalisme lahir dari benih-benih

²² Biku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius. 2008)

²³ Lawrence Blum, "Recognition and Multiculturalism in Education." Dalam *Journal of Philosophy of Education* 35 (4):539–559 (2001)

²⁴ Ato Mudzhar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. 2005),

konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik. Bikhu Parech menyebut multikulturalisme bisa membuka ruang hidup dalam kepelbagaian, sambil menumbuhkan nilai-nilai bersama (*moral contract*).²⁵

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme juga diinternalisasi sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, Hafner (2007) menyebut multikulturalisme diterima sebagai konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya.²⁶

Dua konsep utama multikulturalisme yakni kesetaraan (*equality*) dan pengakuan (*recognition*) menjadi prinsip utama yang dapat ditemukan dalam elaborasi para ahli. Lawrence Blum, sebagaimana dikutip Lubis (2006), menyebut multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain yang berbeda.²⁷ Jadi prinsip dasar multikulturalisme bukan saja terkait dengan pengakuan pada keragaman sebagai sesuatu yang *omni present*, tetapi juga terdapat

²⁵ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 2002)

²⁶ Robert Hafner, *Politik Multikulturalisme- Menggugat Realitas Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 32

²⁷ Lihat tulisan mencerahkan Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Moderen*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006)

upaya untuk belajar terhadap keragaman dan kesediaan hidup dan berkembang secara bersama di atas keragaman itu. Di masa depan pandangan multikulturalisme bisa menjadi pandangan dunia (*world view*) atau ideologi politik, yang menurut Azumardi Azra (2007) dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Sejauh ini, multikulturalisme bukan gagasan tanpa kritik, setidaknya telah ada beberapa kritikus multikulturalisme yang telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme.²⁹ Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak. *Pertama*, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan (*one and many*).³⁰ David Miller (1999) menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antar kelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan.³¹ Hal ini menurut komentar Anne Phillips (2007) akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, dan mengosongkan sebagian besar dari isi konsep kewarganegaraan. Jika telah

²⁸ Azumardi Azra, *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*. Paper presented at Simposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3, (Denpasar: Universitas Udayana, 2002) diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/307829218> (13 September 2018)

²⁹ Zakiyudin Baidhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Air Langga, tt), h. 1-10

³⁰ Michael Murphy, *Multiculturalism, a Critical Intorduction*, (New York: Routledge, 2012), h. 1-30

³¹ David Miller, *Principles of Social Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), h. 73

sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok-kelompok kultural.³²

Kedua, dapat terjadi benturan prinsip kesetaraan antara elemen minoritas dalam kelompok sosial. Peneliti feminis Susan Moller Okin (1999) misalnya, menilai bahwa agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Praktik-praktik seperti poligami, penyunatan alat kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan berbagai praktik budaya yang bias gender, justru dilegitimasi oleh multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap kelompok kultural untuk melanggengkan tatanan sosial masing-masing. Jika tatanan sosial dari kelompok kultural tersebut didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin, posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.³³

Anne Phillips (2007) menganalisis situasi ini sebagai benturan antarprinsip kesetaraan. Multikulturalisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok kultural minoritas, sementara feminisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kaum perempuan. Kedua proyek ini, multikulturalisme dan feminisme, sebetulnya berangkat dari komitmen yang sama terhadap prinsip kesetaraan dan keduanya berhadap-hadapan sebagai dua aspek yang harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama

³² Anne Philips, *Multiculturalism Without Culture*, (New Jersey: Princeton University Press, 2007), h. 13

³³ Susan Moller Okin, *Is Multiculturalism Bad for Woman?* (Princeton: Princeton University Press, 1999), h. 12-17

mengurusi isu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain.³⁴

Ada risiko konseptual lain dalam multikulturalisme bahwa perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial-politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan. Para feminis sudah lama mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang merugikan perempuan karena melegitimasi sistem sosial patriarkis dalam budaya-budaya lokal. Sekalipun prinsip kesetaraan (*principle of equality*) bersifat mendasar bagi demokrasi dan kehidupan kebangsaan modern, namun kesetaraan bukanlah satu-satunya prinsip yang berlaku. Demokrasi juga mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan ruang luas bagi individu dalam kelompok untuk mengekspresikan diri secara unik. Isu ketegangan antara penghargaan terhadap keberbedaan dan hak untuk menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat.

Sampai di titik ini, studi ingin memandang proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau visi organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis. Itulah mengapa usaha untuk memahami multikulturalisme, dan relevansinya dengan Islam dan nilai-nilai lokal keindonesiaan harus dilihat sebagai proses reproduksi gagasan yang terus mencari bentuk. Sebuah proses yang meminjam Piere Bourdeu (1977), diharapkan menjadi *habitus* yang membentuk nilai-

³⁴ Anne Philips, *Multiculturalism Without Culture*, h. 3

nilai yang terlembagakan, baik didalam dunia akademik maupun arena social masyarakat secara luas.³⁵

1. Reproduksi Sosial Multikulturalisme

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perkembangan multikulturalisme yang dikembangkan di Indonesia, bukan merupakan sesuatu yang hadir tiba-tiba, tanpa dinamika tertentu menuntunnya. Sebagai sebuah konstruksi teoritik, multukulturalisme dihadirkan sebagai sebuah pilihan ideology yang menuntut perlunya pengembangan masyarakat secara beradab dan demokratis. Menghargai perbedaan-perbedaan kultural, etnis, dan agama yang telah *omni presence* dalam masyarakat. Proses-proses tersebut harus dilihat sebagai sebuah gerak pengetahuan, politik dan sosial yang saling bertarung untuk memperebutkan tempat dalam ruang pengetahuan di kampus, di masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks pelebagaan nilai tersebut, maka Piere Bourdieu (1977) telah memperkenalkan konsep *habitus* dan *field* (ranah) untuk menganalisis gerak sosial dalam masyarakat yang semakin dinamis. Pemanfaatan kerangka teoritis Bourdeu untuk menganalisis keterlibatan individu dalam sebuah dinamika sosial, diperlukan untuk memverifikasi apakah adaptasi gagasan multikulturalisme yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam di Indonesia, terjadi karena suatu kesadaran yang bebas atau karena tunduk pada suatu struktur sosial yang dominatif, terutama oleh aktor-aktor perguruan tinggi yang memiliki kuasa tertentu.

Dalam *Outline of a Theory of Practice* Bourideu (1977:72) mendefinisikan *habitus* sebagai berikut:

Habitus adalah sistem yang terdiri dari struktur yang bertahan lama. Sebuah struktur yang cenderung berfungsi

³⁵ Pierre Bourdieou, *Outline of a Theory of Practice* (United kindom: Cambridge University. 1997), h. 72

sebagai struktur yang memberikan struktur, atau sebagai asas yang melahirkan dan menyusun kebiasaan dan penggambaran yang dapat disesuaikan secara objektif pada hasilnya, tanpa mensyaratkan tujuan yang sadar terhadap hasil-hasil atau penguasaan terhadap langkah-langkah yang perlu untuk dicapai.³⁶

Dalam bahasa yang lebih sederhana *habitus* bisa ditafsirkan sebagai struktur berpikir atau kognitif yang dengannya actor-aktor mencerna suatu realitas. Individu menggunakan *habitus* untuk berhubungan dengan realitas sosial karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial.³⁷ Seperti benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna, terhormat-terhina.³⁸ Skema-skema tersebut berhubungan sedemikain rupa sehingga membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup kesehariannya bersama orang-orang lain.

Habitus bekerja di bawah level kesadaran dan bahasa, diluar jangkauan pengawasan dan kontrol introspeksi kehendak. Dengan demikian *habitus* adalah produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang waktu tertentu. Bourdieu meyakini bahwa kebiasaan seseorang bukan diturunkan dari bakat tetapi oleh *habitus* yang merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas

³⁶ Adib, Mohammad, "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu," dalam *Jurnal Bio Kultur*, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012.

³⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, "Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen" (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 577

³⁸ Mohammad Adib, "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu," dalam *Jurnal Bio Kultur*, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012.

bermain dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara halus, tidak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah (Richard Harker, (edit.), 2009:xix).

Bourdieu melihat *habitus* sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan serta mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. Misalnya ketika berjalan di lajur sebelah kiri, kebanyakan dari kita tidak lagi memperhatikan petugas polisi. Tidak diperlukan lagi pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan kita untuk berjalan di sebelah kiri. Sebab berjalan disebelah kiri telah menjadi kebiasaan yang bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan pada peraturan tertentu.³⁹ Tegaknya berjalan disebelah kiri merupakan *habitus* atau kebiasaan sosial yang menjadi sebuah tindakan.

Kerangka pikir Bourdieu tentang *habitus* sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan sebuah gagasan semacam multikulturalisme di perguruan tinggi. Artinya ketinya gagasan ini diterima, bukan karena sesuatu yang tiba-tiba tetapi terbentuk karena suatu tradisi intelektual yang mengakar dalam sebuah perguruan tinggi. *Habitus* tentang multikulturalisme juga dibentuk oleh fakta sosiologis dalam masyarakat, keragaman, serta konflik dan kontestasi yang terjadi secara terus menerus. Nilai-nilai multikulturalisme di perguruan tinggi Islam seperti, penghormatan dan pengakuan pada eksistensi pada keragaman, dan kesetaraan diantara kelompok-kelompok yang berbeda adalah *habitus* yang berproses secara tidak disadari dan dilaksanakan oleh civitas akademik sebagai sebuah bentuk kebiasaan akademik. Tetapi ia menjadi sebuah struktur yang menundukkan civitas akademik akan

³⁹ Adib, Mohammad, "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu," dalam *Jurnal Bio Kultur*, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012.

spirit multikulturalisme. Dalam kasus perguruan tinggi Islam, habitus tentang nilai-nilai multikulturalisme memungkinkan berbagai komponen di perguruan tinggi, tanpa menyadari turut mempromosikan praktik keragaman, kesetaraan dan keadilan

Konsep *habitus* tidak bisa dipahami tanpa melihat hubungannya dengan konsep *field* (ranah). Bourdieu memandang ranah sebagai jaringan relasional antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Oleh karena itu ranah bukan ikatan intersubektif antara individu, namun semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu. Ranah merupakan metafora yang digunakan Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya.⁴⁰ Posisi-posisi dalam ranah ini ditentukan oleh banyaknya volume kapital yang dimiliki masing-masing pelaku atau kelompok sosial. Dengan kata lain, struktur distribusi kekuasaan dalam Ranah merupakan: (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan kekuasaan; (2) semacam hubungan terstruktur yang tanpa disadari mengatur posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Ranah menjadi pasar kompetitif yang didalamnya berbagai jenis modal (ekonomi, kultural, sosial, simbolis) digunakan dan dimanfaatkan.⁴¹

Adapun *field* (ranah) yang dimaksud dalam studi ini adalah struktur tentang multikulturalisme dalam masyarakat akademis.

⁴⁰ Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, "Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen". (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2010), h. 582-590.

⁴¹ Mohammad. Adib, 2012. "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu", dalam *Jurnal BioKultur*, Vol. I/No. 2/Juli-Desember 2012 h. 91-110.

Ranah bisa mewujudkan pada keberadaan pimpinan universitas, kelompok dosen, pusat-pusat studi yang memiliki reputasi, yang dalam perspektif Bourdieu, merupakan agen yang menyerap nilai-nilai multikulturalisme untuk menstrukturkan struktur akademik di setiap perguruan tinggi. Proses menstrukturkan dan distrukturkan tersebut bisa terjadi melalui kontestasi, negosiasi atau kompromi. Dalam bentuk yang nyata bisa dilihat pada berbagai kegiatan seminar, conference, diskursus ilmiah, serta praktik-praktik akademik yang dilembagakan.

Menurut Irwan Abdullah (2010) gagasan tentang reproduksi sosial bisa disederhanakan dalam tiga kata kunci, actor, narasi dan kepentingan.⁴² Aktor adalah figure sentral, tokoh intelektual dan pemimpin dan orang-orang mampu mengaruhi suatu proses social. Aktor memainkan peran penting karena mereka memimpin dan mendorong perubahan. Sedangkan narasi, wacana, atau opini adalah sesuatu yang disampaikan ke public untuk meligitimasi suatu tujuan tertentu. Adapun kepentingan adalah keuntungan yang diperoleh, baik actor maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses social. Dalam konteks reproduksi gagasan multikulturalisme di perguruan tinggi, peran actor beserta wacana yang dimainkan sangat penting untuk dicermati, karena menentukan perubahan.

Studi ini menjadi penting, paling tidak untuk menkonstruksi ulang pemahaman yang lebih *acceptable* tentang multikulturalisme di tengah eforia dukungan maupun kritik yang sedang berkembang. Apalagi dalam konteks upaya menyibak lebih jauh relevansi nilai-nilai multikulturalisme dengan nilai-nilai Islam yang universal, dalam usaha bersama merawat menghormati keragaman, merawat harmoni dan persatuan serta menciptakan perdamaian. Komunitas Perguruan Tinggi Islam (PTKI) di

⁴² Lihat Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Indonesia, dengan segenap ilmuan dan cendekiawan yang bernaung didalamnya merupakan kelompok yang paling otoritatif otentik dari suara muslim Indonesia yang harus didengar dan diperhatikan suaranya tentang tentang kontruksi multikulturalisme dalam semangat keislaman dan keindonesian. Penelitian ini bisa menjadi instrument pendahuluan untuk memahami kerja keras komunitas PTKI, untuk mendialogkan Islam dengan konsep-konsep besar yang datang dari Barat, untuk menemukan kebermaknaan yang lebih komprehensif.

BAB III

GAGASAN MULTIKULTURALISME

DI TIGA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang beberapa temuan yang dirumuskan dalam beberapa topik penting. *Pertama*, gambaran umum tentang perguruan tinggi Islam di Indonesia yang berisi tentang sejarah dan perkembangannya hingga dewasa ini. *Kedua*, deksripsi tentang tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh. *Ketiga*, perkembangan gagasan multikulturalisme di tiga perguruan tinggi Islam tersebut serta bagaimana bentuk-bentuk pelembagaannya dalam praktik akademik.

A. Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam,

Perguruan tinggi Islam atau saat ini sering disebut sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri (PTKIN) memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Kehadiran PTKIN di Indonesia dibangun diatas proses perjuangan untuk menguatkan ideology keagamaan tertentu, yakni mengembangkan Islam secara akademik untuk merespon perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terus berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Bahkan dewasa ini perguruan tinggi Islam telah menjadi kawah candradimuka bagi pengembangan pengetahuan keislaman dalam merespon modernisasi dan perubahan sosial. Berikut ini akan digambarkan tentang sejarah PTKIN dan perkembangan hingga saat ini.

Sejarah Pendirian Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Dalam berbagai referensi yang ada, ide tentang pendirian Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, merupakan satu mata rantai dari keseluruhan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia yang telah dimulai sejak awal abad XX. Wujud konkrit dari kesadaran sejarah dan perjuangan itu tampak pada pembaharuan sistem pendidikan tinggi Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu. Seperti Jam'iyat al-Khayrat (1905) di Jakarta, Sarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Persis (1923) di Bandung, dan Nandlatul Ulama (1926) di Surabaya. Meskipun berbagai lembaga keislaman tersebut tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, namun organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.⁴³

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat itu bisa dilihat dalam empat level. *Pertama*, level kelembagaan; yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam, baik dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada maupun pendirian lembaga pendidikan Islam yang baru. *Kedua*, substansi isi (*content*) kurikulumnya, yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. *Keempat*: dari segi fungsi; yakni secara tradisional fungsi pendidikan Islam meliputi: transfer ilmu-ilmu keislaman (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic*

⁴³ Lihat Rifai Fathoni, *Sejarah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*, dalam situs <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

traditions), dan melahirkan ulama (*reproduction of ulama*), dengan pembaharuan yang terjadi di tubuh lembaga pendidikan Islam, fungsi ini juga mengalami perkembangan.⁴⁴

Proses pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi Islam di atas cukup kuat memberikan semangat umat Islam untuk berusaha menghadirkan lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keislaman. Gagasan ini terus berkembang, karena sampai decade tahun 1930-an, pemerintah colonial Belanda telah mendirikan 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi, yaitu *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik) kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berdiri di Bandung pada tahun 1920. *Rechts Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1924, dan *Geneeskundige Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1927. Kehadiran tiga perguruan tinggi tersebut dalam rangka Politik Etis yang digaungkan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun sayang lembaga pendidikan tersebut sangat diskriminatif karena hanya dinikmati oleh anak-anak elit priyayi Indonesia saja, sementara generasi muda Islam yang luas, kurang mendapat kesempatan untuk masuk di dalamnya.⁴⁵

Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi di lembaga yang didirikan Belanda, bagi rakyat Indonesia umumnya amat kecil. Apalagi bagi umat Islam yang selama masa-masa pergolakan nasional menjadi kelompok yang paling marginal, dan terlibat dalam berbagai aneka perlawanan dan perjuangan

⁴⁴ Lihat H. Djon, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dipublikasi dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

⁴⁵ H. Djono, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dipublikasi dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

menentang kolonial. Belajar di perguruan tinggi merupakan suatu phenomena yang langka, dan jarang terjadi. Umumnya terkonsentrasi di Pondok Pesantren dan Madrasah. Dengan kenyataan ini, amat dipahami jika umat Islam berhasrat untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan menampung anak-anak kaum muslimin dari sekolah rendah dan menjadi ajang mobilitas bagi mereka. Tujuannya tidak hanya untuk menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi muslim. melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang ‘netral’ terhadap pendidikan agama.⁴⁶

Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjojo melalui majalah *Pedoman Masyarakat* Nomor 15 Tahun IV mencetuskan ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (IAIN Syekh Nurjati Luhur) sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Ide ini disusul dengan pemberitaan majalah AID Nomor 128 tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan bahwa telah diadakan permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Solo, dan Surabaya. Pada bulan Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan dalam *Pandji Islam* berjudul “Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam”, ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Natsir, perlu ada koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan untuk menyatukan visi, misi, dan wawasan.⁴⁷

⁴⁶ Deliar Noer, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), h. 153

⁴⁷ Muhammad Natsir adalah mantan Perdana Menteri Indonesia, Mantan Ketua Partai Islam Masyumi dan Tokoh Pemikir Islam dan Politik yang sangat berpengaruh. Ia juga menaruh perhatian pada pendidikan Islam. Berbagai tulisan Natsir bisa dilihat dalam Abudin Nata (2005), h. 81-94

Sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, ide pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-benar bisa terealisasi. Di Solo, sempat berdiri *Islamische Medelbare School (IMS)* namun perguruan itu hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang Dunia kedua. Di luar Jawa, di Padang, pada tahun 1940 juga berdiri Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo. Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini akhirnya menjadi agenda pembicaraan dalam forum Kongres Al-Islam 11 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1939, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam anggota MIAI.⁴⁸

Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program, yaitu: 1) membangun sebuah Masjid Agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia; 2) mendirikan sebuah universitas Islam; dan 3) membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat (*Bait al-Mal*) untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendirian universitas Islam yang telah direalisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa. Namun kenyataannya selalu diulur-ulur. Tuntutan MIAI tidak pernah berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang, sebuah universitas Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia

⁴⁸ Lihat penjelasan Pairin, *Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam*, dalam [file:///C:/Users/HP/Downloads/79-137-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/79-137-1-SM%20(2).pdf)

(Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI.⁴⁹

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTA) di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dicoba oleh MIAI sejak awal tahun 1943. Berbeda dengan MIAI yang menclapatkan tekanan dari pihak Jepang, Masyumi lebih beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada bulan April 1945 Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal ini *Shumubu* yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori Masyumi pada bulan April tersebut berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI), yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta. Panitia inilah yang mengerjakan rencana pelaksanaannya, seperti menyusun Peraturan Umum, Peraturan Rumah Tangga, Susunan Badan Wakaf, Dewan Pengurus, dan Senat STI. Untuk Dewan Pengurus/Kuratornya, Moh. Hatta ditunjuk sebagai Ketua dengan M. Natsir sebagai Sekretarisnya. Untuk Senat STI, A. Kahar Muzakkir ditunjuk sebagai Rektor Magnificus dengan anggota-anggotanya: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimedjo, Mr. Soenardjo, dan Zain Djambek. Akhirnya STI ini dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw bertepatan dengan tanggal 8 Juli

⁴⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991) h. 198 dan 225

1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Gondangdia Jakarta.

Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada “orang-orang yang telah mempelajari Islam secara meluas dan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh masyarakat dewasa ini”. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya “Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan agar menyebarkan agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia”. Menilik tujuan STI, jelas bahwa para pemrakarsa yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi, ulama, dan intelektual muslim berupaya mencari bentuk perpaduan pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama’ yang pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu “sekuler” yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan dari pikiran yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam yang harus ada.⁵⁰

Empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi, terjadilah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah menjadikan mereka sebagai *the founding fathers* bagi republik ini. Para pendiri STI banyak yang kemudian menjadi pemimpin republik yang baru lahir ini, misalnya sebagai wakil presiden, perdana menteri, dan menteri.

⁵⁰ Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo, *IAIN Problem dan Prospek*, (Jakarta: DEPAG RI, 2000), h. 23-78.

Beberapa bulan setelah kemerdekaan pasukan Sekutu (NICA) datang ke Indonesia dengan membawa kepentingan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, menggantikan Jepang. Terjadilah bentrokan senjata antara pasukan Sekutu dengan rakyat Indonesia. Gedung-gedung di Jakarta dapat dikuasai oleh Sekutu dan situasi kota Jakarta menjadi tidak aman. Situasi inilah yang akhirnya memaksa Pemerintah Negara RI mengambil langkah untuk hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Hijrahnya Pemerintah RI ke Yogyakarta – Ibu Kota RI kedua– ini sangat mempengaruhi kelangsungan STI karena suasana perang di Jakarta tidak menjamin kelancaran perkuliahan, di samping banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI yang ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat tinggi negara. Satu-satunya jalan untuk sementara STI di Jakarta ditutup, dan ikut hijrah ke Yogyakarta.

Pada tanggal 10 April 1946 dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus STI) serta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya baik sipil maupun militer. Upacara pembukaan berlangsung di Dalem Pengulon Yogyakarta yang diisi antara lain dengan penyampaian 2 (dua) pidato, yaitu Pidato Pembukaan STI berjudul “Sifat Sekolah Tinggi Islam” oleh Mohammad Hatta dan Kuliah Umum tentang “Ilmu Tauhid” yang disampaikan oleh K.H.R. Hadjid. Kahar Muzakkir tetap menjadi Rektor meskipun terjadi perubahan pada kelengkapan anggota Senat STI. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang biasa disebut sebagai “Memorandum Hatta” menyebutkan antara lain:

“Demikianlah, dalam lingkungan STI bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang Filsafat, Sejarah, dan Sosiologi. Agama dan Filsafat memperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama.... Agama dan Sejarah meinperhias pandangan

agama... Agama dan Sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud STI ialah membentuk ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidikan luas serta mempunyai semangat yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat. Di STI itu akan bertemu agama dengan Ilmu dalam suasana kerjasama untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan.⁵¹

Mengacu pada Memorandum Hatta tersebut, dapat diketahui ke mana arah pengembangan ilmu yang hendak dicapai oleh STI lewat rencana pelajarannya. Bisa dikatakan bahwa *basic philosophi*- pengembangan ilmunya adalah integralistik, tidak dikotomis antara ilmu agama dan umum.⁵²

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan para tokoh muslim timbul pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengubah STI menjadi sebuah universitas. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI dan dalam sidangnya pada bulan Februari 1948 sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Peresmian UII dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret

⁵¹ H. Djono, *Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*, dipublikasikan dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

⁵² M. Atho Mudzhar, "Kedudukan IAIN Sebagai Perguruan Tinggi", dalam *Problem & Prospek IAIN*, (ed.) Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Jakarta: Ditbinpertaiss, 2000), 62

1948) di Dalem Kepatihan Yogyakarta bersamaan dengan Dies Natalis STI ke-3.⁵³

Pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta UII terpaksa ditutup untuk sementara. Para mahasiswa, pengurus, bahkan guru besarnya ikut bergabung dalam perang melawan agresi Belanda. Dalam suasana perang, fungsionaris UII, terutama A. Kahar Muzakkir sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII IV, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1368 (April 1949). Upacara itu tidak dilaksanakan di Kampus, melainkan jauh dari kota, di Desa Tegalayang, Srandakan. Bantul. Para pembesar sipil dan militer serta masyarakat memeriahkan upacara tersebut. Pada saat itu, A. Kahar Muzakkir (Rektor Magnificus) menyampaikan pidato tentang “Dasar-dasar Sosialisme dalam Islam”. Setelah keamanan kota berangsur-angsur pulih, sementara perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Belanda terns diupayakan, pada bulan September 1949 UII kembali membuka kantor sekretariatnya di Kauman Yogyakarta dan sejak Nopember 1949 perkuliahan berjalan normal.⁵⁴

Pada tanggal 22 Januari 1950 sejumlah pemimpin Islam dan para ulama yang dipelopori oleh Moh. Adrian, Imam Ghazali, dan Tirtodiningrat mendirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) di Solo. Setahun kemudian, tepatnya pada 20 Pebruari 1951, terjadi kesepakatan antara pimpinan UII dan pimpinan PTII untuk menyatukan kedua lembaga itu dengan nama University Islam Indonesia (kemudian diganti Universitas Islam Indonesia, UII) yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

⁵³H. Djono, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dipublikasi dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

⁵⁴ H. Djono, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dipublikasi dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>

Dengan perubahan STI menjadi UII, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama seperti Teknik, Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama atau semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini di antaranya dilatarbelakangi oleh kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 yang berkembang menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejak 19 Desember 1949 memperoleh corak nasionalis. Perubahan orientasi tersebut pada dasarnya tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu: memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang “*universum*” mencakup berbagai ilmu.

Melalui Peraturan No. 34 Tahun 1950, fakultas agama Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta diubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Hal ini disebabkan cakupan pengetahuan agama Islam yang demikian luas tidak mencukupi untuk diajarkan dalam satu fakultas. Pada tahun 1960, PTAIN dengan ADIA Jakarta disatukan. Sejak tanggal 9 Mei 1960 namanya menjadi IAIN al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah yang berada di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Jakarta.⁵⁵ IAIN merupakan pusat pengembangan dan pengkajian ilmu agama Islam. Institusi ini diharapkan membentuk sarjana muslim yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama Islam, berakhlakul karimah, cerdas dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Dengan kata lain, selain dapat bekerja di Kementerian Agama, para alumni juga mampu menjadi pemimpin masyarakat. Tuntutan mencetak sarjana Islam (ulama) dan juga menempati birokrasi di Kementerian Agama menjadi dorongan bagi umat

⁵⁵ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 178

untuk mendirikan IAIN di seluruh Indonesia. Di beberapa provinsi lahir IAIN cabang seperti IAIN Bengkulu dan IAIN Curup yang berinduk ke IAIN Palembang, IAIN Palangkaraya yang berinduk ke IAIN Jakarta. IAIN Bukittinggi berinduk ke IAIN Imam Bonjol Padang. Pada perkembangannya, terjadi perubahan nomenklatur IAIN cabang menjadi STAIN yang dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian terjadi perubahan lagi sehingga beberapa STAIN berubah menjadi IAIN, antara lain STAIN Cirebon, Bengkulu dan lainnya.⁵⁶

Dinamika lain terjadi di beberapa IAIN, seperti IAIN Jakarta yang memiliki *widermandate* dibolehkan mendirikan Program Studi Tadris dengan jurusan bahasa Inggris, matematika dan lainnya untuk merespon kekurangan guru Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Pengembangan berikutnya adalah adanya program studi baru di beberapa IAIN seperti IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memenuhi tuntutan pasar, Fakultas Dakwah membuka Program Studi: Komunikasi dan Publikasi Islam, Bimbingan Islam di Masyarakat, Manajemen Dakwah, Konseling Islam dan Program Studi Jurnalistik. Pengembangan yang berbeda dengan fakultas yang sama di IAIN yang lain adalah Program Studi Jurnalistik tersebut.

Sama halnya di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel yang memiliki Program Studi Komunikasi. IAIN Syarif Qasim Pekanbaru di Fakultas Tarbiyah membuka Program Studi Psikologi dan di Fakultas Syariah membuka Program Studi Manajemen dan Program D-III dengan Program Studi Manajer Perusahaan. Fakultas Dakwah Islam membuka Program Studi Komunikasi dan D-III membuka Program Studi Pers dan Grafika, di samping Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan

⁵⁶ Hasbi Indra, "Pendidikan Tinggi Islam dan Tantangan Ke Depan," Fikrah 8, no. 1 (2015): 10

Konseling Islam.⁵⁷ Kurikulum juga mengalami perubahan. Kurikulum lama lebih didominasi mata pelajaran agama, lalu berkembang dengan diberikannya mata pelajaran umum. Misalnya di Fakultas Syariah, mahasiswa yang sebelumnya hanya belajar ilmu agama, juga mempelajari mata pelajaran Manajemen, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Tata Negara dan lainnya. Perkembangan mutakhir dalam pendidikan tinggi Islam adalah berubahnya STAIN/IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Pengembangan ini dilandasi perlunya integrasi keilmuan yang pernah menjadi diskursus masyarakat Islam di tanah air.⁵⁸ Saat ini PTAIN di Indonesia berjumlah 58 yang terdiri dari 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN.

Daftar UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia.

Universitas Islam Negeri (UIN)

1. UIN Alauddin, Makassar (Sulawesi Selatan)
2. UIN Antasari, Banjarmasin (Kalimantan Selatan)
3. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Aceh)
4. UIN Imam Bonjol, Padang (Sumatra Barat)
5. UIN Mataram, Mataram (Nusa Tenggara Barat)
6. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (Jawa Timur)
7. UIN Raden Fatah, Palembang (Sumatra Selatan)
8. UIN Raden Intan, Bandar Lampung (Lampung)

⁵⁷ Qodri Azizy, “Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN”, dalam Komarudin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem & Prospek IAIN* (Jakarta: Ditbinpertaiss, 2000), 21.

⁵⁸ Hasbi Indra, “Diskursus Pendidikan Islam Kontemporer”, dalam Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (ed.) Abuddin Nata (Jakarta: Grasindo, 2001), 301

9. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang (Banten)
10. UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru (Riau)
11. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Muaro Jambi (Jambi)
12. UIN Sumatra Utara, Medan (Sumatra Utara)
13. UIN Sunan Ampel, Surabaya (Jawa Timur)
14. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (Jawa Barat)
15. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)
16. UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan (Banten)
17. UIN Walisongo, Semarang (Jawa Tengah)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

1. IAIN Ambon, Ambon (Maluku)
2. IAIN Batusangkar, Tanah Datar (Sumatra Barat)
3. IAIN Bengkulu, Bengkulu (Bengkulu)
4. IAIN Bone, Bone (Sulawesi Selatan)
5. IAIN Bukittinggi, Bukittinggi (Sumatra Barat)
6. IAIN Curup, Rejang Lebong (Bengkulu)
7. IAIN Datokarama, Palu (Sulawesi Tengah)
8. IAIN Fattahul Muluk, Jayapura (Papua)
9. IAIN Jember, Jember (Jawa Timur)
10. IAIN Kediri, Kediri (Jawa Timur)
11. IAIN Kerinci, Kerinci (Jambi)
12. IAIN Kudus, Kudus (Jawa Tengah)
13. IAIN Lhokseumawe, Lhokseumawe (Aceh)
14. IAIN Madura, Pamekasan (Jawa Timur)
15. IAIN Manado, Manado (Sulawesi Utara)
16. IAIN Metro, Metro (Lampung)
17. IAIN Padangsidempuan, Tapanuli Selatan (Sumatra Utara)

18. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya (Kalimantan Tengah)
19. IAIN Palopo, Palopo (Sulawesi Selatan)
20. IAIN Parepare, Parepare (Sulawesi Selatan)
21. IAIN Pekalongan, Pekalongan (Jawa Tengah)
22. IAIN Ponorogo, Ponorogo (Jawa Timur)
23. IAIN Pontianak, Pontianak (Kalimantan Barat)
24. IAIN Purwokerto, Purwokerto (Jawa Tengah)
25. IAIN Salatiga, Salatiga (Jawa Tengah)
26. IAIN Samarinda, Samarinda (Kalimantan Timur)
27. IAIN Sultan Amai, Gorontalo (Gorontalo)
28. IAIN Sultan Qaimuddin, Kendari (Sulawesi Tenggara)
29. IAIN Surakarta, Sukoharjo (Jawa Tengah)
30. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka (Kepulauan Bangka Belitung)
31. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon (Jawa Barat)
32. IAIN Ternate, Ternate (Maluku Utara)
33. IAIN Tulungagung, Tulungagung (Jawa Timur)
34. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Langsa (Aceh)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

1. STAIN Bengkalis, Bengkalis, Riau
2. STAIN Gajah Putih, Takengon, Aceh
3. STAIN Mandailing Natal, Panyabungan, Sumatra Utara
4. STAIN Majene, Majene, Sulawesi Barat
5. STAIN Sorong, Sorong, Papua Barat
6. STAIN Sultan Abdurrahman, Bintan, Kepulauan Riau

7. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh⁵⁹

Islamisasi ilmu atau integrasi keilmuan merupakan gagasan yang sangat strategis yang terus dikembangkan di Indonesia, hal ini tentu saja memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk direalisasikan. Alumni pendidikan tinggi Islam harus siap berkompetisi untuk merespons berbagai masalah di masyarakat. Alumni fakultas Syariah tidak hanya berperan di dunia advokasi perkawinan dan perceraian atau waris, tetapi mampu mengadvokasi persoalan HAM, dan lainnya. Fakultas Dakwah diharapkan dapat membentuk alumni yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik, menjadi produser film, memiliki kompetensi membuat skenario film. Fakultas Tarbiyah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan merancang kurikulum yang dapat merespon perkembangan zaman dan mendesain model pembelajaran yang fungsional dan dapat menyiapkan anak didik menyongsong kompetisi antar bangsa di masa mendatang. Seluruh fakultas diharapkan dapat merespon perkembangan masyarakat. Pendidikan tinggi Islam tidak sepenuhnya menyiapkan lulusannya menjadi pegawai negeri sipil. Serapan profesi tersebut sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Lulusan pendidikan tinggi Islam harus disiapkan untuk mengisi profesi di dunia yang lebih luas. Pendidikan tinggi Islam harus pula menyiapkan lulusannya dengan kompetensi riset karena kemampuan riset banyak dibutuhkan di berbagai profesi. Sayangnya, kompetensi ini kurang serius dipersiapkan oleh pendidikan tinggi Islam. Padahal kesungguhan pendidikan tinggi Islam menyiapkan hal ini akan

⁵⁹ Lihat **Daftar perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia**, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia

mengantarkan lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi institusi pendidikan riset.⁶⁰

Selain STAIN/IAIN/UIN, telah hidup dan berkembang pula Sekolah Tinggi Islam, dan Universitas Islam yang didirikan oleh swasta di kota besar maupun kota kecil kabupaten se-Indonesia. Jumlahnya bahkan lebih besar dibanding pendidikan Tinggi Islam yang diselenggarakan pemerintah. Model pendidikannya hampir sama dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam oleh pemerintah. Sekolah-sekolah tinggi ini juga memperoleh bantuan dana untuk membangun infrastruktur pembelajaran dari pemerintah, walaupun dengan dana yang jauh lebih terbatas dibandingkan pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.

Menguatnya Gagasan Moderasi dan Multikulturalisme di PTKIN

Fenomena radikalisme Islam yang mengumka di dalam kehidupan social dan politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan yang menarik dan terus menghangat di berbagai perguruan tinggi agama Islam. Munculnya isu-isu mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru perguruan tinggi Islam untuk memberikan jawaban tektual maupun kontekstual atas fenomena tersebut serta merumuskan gagasan konseptual dalam pencegahannya.

Pada mulanya di berbagai kampus Islam, radikalisme dilihat sebagai fenomena historis-sosiologis, akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi

⁶⁰ Hanya saja riset di negara-negara berkembang hanya 01 sampai 03 dari GNP suatu Negara, sementara untuk negara maju berada dingka 4 persen dari GNP, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam-Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 17

masyarakat dunia.⁶¹ Munculllah istilah kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme. Fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialime ke dunia Islam. Terpecahnya dunia Islam ke dalam berbagai Negara bangsa, dan proyek modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat, mengakibatkan umat Islam merasakan terkikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini mereka pegang teguh.⁶² Hal ini menyebabkan munculnya gerakan radikal dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup. Tidak hanya sampai di situ, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekuler dan menyimpang dari ajaran agama yang murni.

Masalah yang kemudian muncul adalah pola pandangan keberagamaan kelompok Islam yang disebut hendak melakukan perlawanan terhadap Barat, atau kekuatan-kekuatan yang mendiskriminasi Islam mulai dilakukan dengan kekerasan, dan mengancam eksistensi orang lain. Bahkan lebih parah lagi, ketika suatu kelompok mengaku dirinya yang paling benar dan memiliki kebenaran tunggal, seraya memaksa kelompok yang lain, termasuk kelompok Islam mayoritas untuk mengikuti paham kelompoknya. Dalam banyak kasus, kelompok radikaliis keagamaan mulai

⁶¹ Sahri, "Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam," dalam *AL-DAULAH JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* Volume 6, Nomor 1, April 2016, h. 237

⁶² Penjelasan yang komprehensif mengenai basis sosial psikologis revivalisme Islam di Timur Tengah, dapat dilihat dalam R. Hrair Dikmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in Arab World*, (New York: Syracuse University Press, 1985), 25- 36

menggunakan cara kekerasan, baik verbal maupun non-verbal yang tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kemerdekaan beragama, berekspresi, dan berkeyakinan.⁶³

Perkembangan tersebut, mengundang keprihatinan komunitas intelektual dan perguruan tinggi Islam, untuk melakukan kajian guna menemukan konteks social politik, ekonomi dan kebudayaan yang telah memberi ruang bagi munculnya radikalisme di kalangan Islam. Hal ini terus dikaji, karena komunitas perguruan tinggi Islam meyakini bahwa Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan senantiasa mencari perdamaian, sebagaimana nama Islam itu sendiri yang berarti damai.⁶⁴ Sementara radikalisme itu sendiri adalah gerakan keagamaan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Radikalisme Islam kemudian melahirkan ektresmisme dan menciptakan kondisi intoleran dan kekerasan yang ditopang fanatisme keagamaan.⁶⁵

Hal lebih mengejutkan adalah eksistensi perguruan tinggi yang selama ini dikenal sebagai tempat persemaian manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa imun terhadap pengaruh ideologi radikalisme. Radikalisme menyeruak menginfiltrasi kalangan akademisi di berbagai perguruan tinggi. Dari masa ke masa di lingkungan kampus hampir selalu ada

⁶³ 3 Lihat dalam Noorhaidi Hassan, *Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Southeast Program Publications, 2010), 45 Sahri al-Daulah 240 Vol. 6, No.1, April 2016

⁶⁴ Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan...*, 260

⁶⁵ Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terjemah M. Sirozi, (Bandung: Mizan, 1993), 30

kelompok radikal baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi umum, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS), terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di sejumlah kampus-kampus tersebut, bahkan disebutkan bahwa kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal.⁶⁶

Dengan demikian, revivalisme Islam kurang muncul dari kampus-kampus berbasis keagamaan, tetapi dari kampus-kampus sekuler atau umum. Perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi target doktrinisasi dan rekrutmen gerakan radikal, sementara perguruan tinggi berbasis keagamaan dianggap lebih sulit. Kalau ternyata faktanya menunjukkan bahwa gerakan radikal juga sudah marak dan subur di kampus-kampus berbasis keagamaan, maka ini dapat membuktikan dua hal. Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal.

Fenomena ini mendorong Kementerian Agama RI mulai mewacanakan Islam Modera (Moderat Islam) sebagai lawan dari radikalisme Islam. Mempromosikan moderasi Islam merupakan agenda bersama yang mendesak diintensifkan oleh perguruan tinggi Islam di tengah-tengah terpuruknya dunia Islam akibat fenomena radikalisme dan terorisme.⁶⁷ sementara itu menurut Mudjia Rahajo (Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

⁶⁶ <http://okezone.com/>, diakses pada tanggal 09/02/2016 Sahri al-Daulah 248 Vol. 6, No.1, April 2016

⁶⁷ <https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/11/24/nyb4sn22-kampanye-moderasi-islam-mendesak>

moderasi Islam harus dikaitkan dengan dunia pendidikan Islam yang sangat penting di Indonesia. Ia menilai, tanpa implementasi moderatisme dalam sistem pendidikan, moderasi tersebut hanya akan terhenti pada level konseptual. Islam moderat yang menjadi karakter dasar Islam di Indonesia, aka terpinggirkan oleh paham keagamaan radikal.

Hal ini dibuktikan oleh komitmen komunitas perguruan tinggi keagamaan Islam yang melahirkan “Piagam Sunan Ampel.” Dalam piagam tersebut salah satu isinya ialah komitmen dalam membendung kredo-kredo anti-NKRI dan anti-Pancasila. Dengan dibukanya berbagai jurusan non keagamaan di kampus PTKIN merupakan tantangan bagi kampus untuk membentengi mahasiswanya dari paham-paham Islam fundamental karena mahasiswa bukan lagi hanya dari lulusan pesantren saja, melainkan juga dari SMA dan SMK yang secara pemahaman Islam masih minim.

Pendidikan Islam di Indonesia, termasuk di kalangan perguruan tinggi Islam harus melakukan pembenahan. Pemahaman terhadap paham keagamaan harus berakar pada kesadaran historis, sosiologis dan antropologis tentang keragaman bangsa. Pengajaran Islam di perguruan tinggi harus dibingkai dalam semangat keragaman. Itulah mengapa dalam satu decade terakhir, konsep-konsep penting seperti pluralisme dan multikulturalisme kemudian menjadi wacana yang mulai dikembangkan di kampus-kampus Islam. Tujuannya adalah bagaimana pembangunan dalam aspek pendidikan bisa diimplementasikan dalam kultur dan struktur masyarakat Indonesia

Kenyataan ini merupakan hakikat bangsa Indonesia yang harus diakui dan diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural maka haruslah ditumbuh kembangkan beberapa sikap kritis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sikap-sikap tersebut di antaranya

adalah: Pertama, mengembangkan sikap simpati dan empati. Adanya sikap simpati akan sangat berperan dalam membuka jalan terhadap proses interaksi lintas budaya, etnik, agama, hingga lintas generasi. Selanjutnya, adanya keterlibatan emosional dan aksi akan tumbuh dalam sikap empati. Dengannya, manusia akan tergerak untuk membantu manusia lain. Kedua, mengembangkan sikap toleran dan saling pengertian. Pemaknaan istilah toleransi lebih menitikberatkan pada bentuk tindakan atau praktik kebudayaan (kepercayaan, pendapat, pendirian, pandangan, bahkan kebiasaan) yang berbeda dari setiap kelompok sosial. Ketiga, meninggalkan sikap primordialisme dan etnosentris. Sikap primordialisme yang wajar akan memperkuat posisi dalam masyarakat. Akan tetapi seringkali yang muncul adalah disintegrasi dikarenakan sikap primordialisme yang berlebih. Oleh karenanya sebisa mungkin prasangka buruk terhadap suku bangsa, ras, agama harus dihindari karena akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat multikultural. Keempat, mengembangkan semangat nasionalisme. Kecenderungan mengesampingkan segenap perbedaan dalam hal latar budaya, perdebatan, dan struktur masyarakatnya akan membawa bangsa Indonesia untuk lebih mencintai tanah air dan bangsanya yang majemuk. Berawal dari sinilah semangat nasionalisme akan terbentuk dan semakin terpuuk sehingga persatuan dan kesatuan dapat terjalin. Kelima, mengembangkan kesadaran peranan. Setiap warga negara memiliki peran, kedudukan dan status yang berbeda-beda sesuai dengan kadratnya. Dan setiap peranan yang ada akan sangat mendukung jalannya kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan kesadaran akan peranan yang dimiliki setiap warga negara, tidak akan terjadi saling memusuhi, bertikai, prasangka, sikap emosional dan bahkan perebutan peranan karena semua warga telah menyadari peran yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Fenomena IAIN Ambon sebagai Kampus Multikural

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau IAIN Ambon, sebelumnya bernama STAIN Ambon adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang terletak di Kota Ambon Provinsi Maluku. IAIN Ambon menjadi salah perguruan tinggi yang dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, karena secara eksplisit telah mencantumkan multikulturalisme sebagai bagian dari visi dan misi lembaga yang kemudian dikembangkan dalam berbagai kegiatan akademik di kampus. Pada bagian berikut akan diperkenalkan lebih jauh tentang IAIN Ambon dan bagaimana kampus ini berkembang dewasa ini.

Sejarah Singkat IAIN Ambon

Sejarah pendirian perguruan tinggi keagamaan Islam di Maluku, didasari oleh gagasan tentang perlunya pengembangan pendidikan tinggi Islam di provinsi seribu pulau tersebut. Melalui musyawarah dengan berbagai tokoh masyarakat setempat, maka ide dan gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam diupayakan untuk direalisasikan. Tepatnya pada tanggal 03 November 1966 resmi beroperasi Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang Cabang Ternate (*Filial*), sekaligus melantik Drs. Mustafa Alhadar sebagai Pjs. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Cabang Ternate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor: 55 Tahun 1996 tanggal 31 Agustus.⁶⁸

Sementara itu di Ambon, sebagai ibu kota provinsi Maluku, gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam di era 60-an kurang mendapat respon yang baik. Gagasan tersebut baru kembali menguat dan disuarakan pada dasawarsa 80-an yang mulai mendapatkan respon yang positif dari beberapa pihak di Ambon.

⁶⁸ LPM IAIN Ambon, *Dokumen Penjaminan Mutu IAIN Ambon*, 2007

Perjuangan umat Islam Maluku baru mencapai puncaknya pada tahun 1982, dengan didirikannya Fakultas Syari'ah yang merupakan *filial* (kelas jauh) dari Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekaligus mengangkat Drs. H. Usman Rumbia sebagai kuasa dekan. Setahun kemudian, pada 1983, berdiri pula Fakultas Ushuluddin dengan status yang sama, kelas jauh dari Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekaligus mengangkat Drs. H. A. R. Umarella sebagai kuasa dekan. Kedua fakultas tersebut disamping dibawa asuhan induk IAIN Alauddin di Ujung Pandang, sama-sama berada dibawah binaan Yayasan Darussalam Ambon yang saat itu dipimpin oleh Drs. H. Hamadi B. Husain.⁶⁹

Dua fakultas yang semula berstatus sebagai *filial*, mulai tahun 1988, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 serta keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1988, telah resmi menjadi fakultas yang definitif (berdiri sendiri), yakni Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah yang berdiri sendiri di lingkungan IAIN Alauddin Ujung Pandang yang berlokasi di Ambon. Peresmian kedua fakultas tersebut ditandai dengan pelantikan dekan definitif pada tanggal 29 Agustus 1988 sesuai SK Menteri Agama RI No.B.II/3/7620/1988 tanggal 5 Juli 1988, masing-masing Drs. H. Sahabuddin sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Drs. H. Hamadi B. Husain sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin.⁷⁰

Seiring dengan peresmian dua fakultas definitif IAIN Alauddin di Ambon, telah membuka beberapa jurusan yang banyak diminati masyarakat Muslim Ambon. Tercatat hingga tahun 1996 telah dibuka 6 jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama dan

⁶⁹ Wawancara dengan Prof. Abdul Khalik Latuconsina, Mahasiswa Angkatan Kedua IAIN Alauddin Ambon, 21 Oktober 2019

⁷⁰ LPM IAIN Ambon, Dokumen Penjaminan Mutu IAIN Ambon, 2007

Tadris IPA di Fakultas Tarbiyah Ternate, Jurusan Perdata dan Pidana, jurusan Peradilan Agama di Fakultas Syari'ah Ambon, jurusan Aqidah Filsafat dan jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin Ambon. Eksistensi fakultas-fakultas daerah, termasuk dua fakultas yang ada di Ambon dalam perkembangannya dihadapkan pada perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang dihadapi oleh IAIN Induk.⁷¹

Sementara itu dalam statusnya sebagai fakultas-fakultas daerah, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan yang terus berkembang. Bahkan, dalam segi kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik. Hal ini lebih disebabkan semua pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN induk. Pemerintah kemudian menempuh jalan untuk merasionalkan kelembagaan IAIN tersebut dengan menghilangkan duplikasi dan mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).⁷²

Selanjutnya, eksistensi STAIN Ambon merupakan pengembangan dari IAIN Ujung Pandang Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Berdasarkan SK Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja, STAIN Ambon jo. surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN, berarti secara yuridis formal, fakultas daerah, termasuk fakultas Syari'ah dan fakultas Ushuluddin Ujung

⁷¹ LPM IAIN Ambon, Dokumen Penjaminan Mutu IAIN Ambon, 2007

⁷² Wawancara dengan Dr. Mohdar Yanlua (Wakil Rektor I IAIN Ambon) di Ambon, Juli 2019

Pandang di Ambon telah berubah statusnya menjadi STAIN Ambon.

Sebagai IAIN Ambon yang mandiri, STAIN Ambon memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengembangan kelembagaan, baik di bidang akademik, manajemen, administrasi maupun sarana fisiknya. STAIN Ambon memiliki kesempatan luas untuk membuka dan mengelola program-program studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan di Maluku.

Sejak tahun 1999, STAIN Ambon dimasa kepemimpinan Drs. H. Idris Latuconsia telah membuka 4 jurusan dan 10 program studi. Pembukaan program studi sebanyak itu merupakan sebuah prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jurusan-jurusan tersebut antara lain: Jurusan Syariah dengan program studi Muamalah, Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyah (AS), Program studi Jinayah Siyasah (JS) dan program studi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Jurusan Ushuluddin dengan Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF), jurusan Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan program studi Bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI), Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI).⁷³

Selanjutnya, tepatnya pada tahun akademik 2000/2001, STAIN Ambon membuka program studi baru pada jurusan Tarbiyah, yaitu: Program studi Pendidikan Diploma 2 (D2), program studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi. Dibukanya program studi baru tersebut merupakan respon STAIN Ambon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membentuk sarjana Muslim yang memiliki keahlian khusus dibidang pendidikan matematika atau ilmu alam, yang tidak lepas dari nafas dan ruh Islam.

⁷³ LPM IAIN Ambon, Dokumen Penjaminan Mutu IAIN Ambon, 2007

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kampus serta masyarakat Muslim Maluku, terutama mengantisipasi otonomi daerah dan otonomi IAIN Ambon, STAIN Ambon dibawah pimpinan Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag., telah merancang format IAIN Ambon dalam bentuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Tampaknya, perjuangan STAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri belum menemukan momentumnya. Namun, Attamimy tidak berputus asa memperjuangkan alih status STAIN Ambon tersebut.⁷⁴

Setelah melalui berbagai kajian STAIN Ambon dan pihak Departemen Agama RI, berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006, STAIN Ambon beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sekaligus menunjuk Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag., sebagai Pgs. Rektor IAIN Ambon. Setelah menjadi IAIN Ambon, banyak perubahan terjadi, terutama perubahan struktur kelembagaan, jurusan-jurusan berubah menjadi fakultas, program studi menjadi jurusan-jurusan, unit-unit penunjang berubah menjadi lembaga-lembaga, kepala administrasi berubah menjadi biro dan lain-lain. Fakultas dipimpin oleh dekan yang bantu oleh wakil dekan dan institut dipimpin oleh rektor.⁷⁵

Dimasa transisi inilah, pihak Departemen Agama menunjuk Pjs. Baru menggantikan Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag., yakni Prof. H. Arif Furchon, Ph.d (Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI), hingga penetapan rector defenitif. Arif Furchon menjalankan musyawarah senat untuk memilih rektor defenitif dan menghasilkan Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag dan ditetapkan melalui SK Presiden RI Nomor 103 Tahun 2008.

⁷⁴ WAwancara dengan Prof. Mohammad Attamimi, M.Ag (mantan Ketua STAIN Ambon), Oktober 2019

⁷⁵ WAwancara dengan Prof. Mohammad Attamimi, M.Ag (mantan Ketua STAIN Ambon), Oktober

Selama memimpin IAIN Ambon, Dedi Djubaedi melakukan beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan pertama dimulai dengan perubahan performa fisik dengan membangun gedung rektorat yang cukup referensientatif, gedung perpustakaan dan gedung-gedung kuliah. Kerjasama dilakukan dengan berbagai level, baik lokal, nasional maupun internasional. Beberapa Ilmuan dan guru besar di undang ke IAIN Ambon untuk memberikan ransangan akademik melalui kuliah-kuliah tamu, seminar dan workshop. Pada era Dedi Djubaedi juga dibangun asrama mahasiswa putra dan putri yang merupakan bantuan dari kementerian perumahan rakyat.

Pembangunan pada aspek kualitas diwujudkan dengan pengakuan nasional dalam bentuk akreditasi kepada sejumlah prodi yang belum terakreditasi. Tercatat, 11 program studi di IAIN Ambon yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional IAIN Ambon (BAN-PT). Masa Dedi Djubaedi pula, IAIN Ambon diberi mandat untuk membuka program magister (S2) dalam bidang pendidikan Islam. Hanya saja, waktu Dedi Djubaedi untuk mengabdikan di IAIN Ambon tidak cukup lama, karena beliau kemudian dipercaya oleh pemerintah menjadi Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Hasbollah Toisuta, M. Ag sebagai rektor dan dilegitimasi melalui SK Presiden RI Tahun 2012. Hasbollah kemudian melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Dedi Djubaedi. Hasbollah melakukan manufer akademik dengan mendatangkan pembicara-pembicara nasional dan internasional sekelas Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, MA., Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. H. Mudji Raharjo, MA., Prof. Dr. H. Suwito dan lainlain untuk menjadi pembicara pada workshop dan seminar-seminar yang dilaksanakan IAIN Ambon guna membangun buday akademik yang mapan. Selain itu, IAIN Ambon juga menjalin kerjasama dengan beberapa

Universitas kredibel di Indonesia seperti UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Universitas Hasanuddin Makassar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Alauddin Makassar dan lainlain.⁷⁶

Visi dan Misi IAIN Ambon sebagai Kampus Multikultural

Pada era kepemimpinan Rektor Hasbollah Toisuta IAIN Ambon menetapkan visi kelembagaan sebaga kampus Islam dengan semangat multicultural. Pengembangan pendidikan dalam bingkai multikultural ditetapkan sebagai ciri khas pendidikan di IAIN Ambon. Banyak pihak memuji konsepsi tersebut sebagai sebuah distingsi yang penting dalam memposisikan IAIN Ambon dalam deretan pertuguan tinggi Islam di Indonesia, meskipun masih ada yang kurang memberi respon positif. Tetapi bagi Hasbollah Toisuta, multikulturalisme adalah sebuah pilihan objektif untuk menyiapkan pilar-pilar peradaban Islam di Maluku di tengah keragaman agama dan etnis.⁷⁷ IAIN Ambon sebagai kampus Islam terbesar di Maluku harus bisa menerjemahkan visi *Islam Rahmatan Lilalamin* kepada public Maluku yang sangat beragam.

Dalam dokumen Kebijakan Mutu IAIN Ambon yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Ambon tahun 2017, disebutkan bahwa visi IAIN Ambon adalah “Profesional dalam mengintegrasikan keIslaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi dalam bingkai multikultural pada tahun 2032.” Visi tersebut lalu dijabarkan lagi dalam beberapa visi IAIN Ambon. Pertama, menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keIslaman, keilmuan, seni,

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. Mohdar Yanlua (Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Ambon), Agustustus 2019

⁷⁷ Wawancara dengan Rector IAIN Ambon, Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, Agustus 2019

budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban. Kedua, mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur. Ketiga, menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi. Keempat, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multicultural. Kelima, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik IAIN Ambon maupun non IAIN Ambon di level lokal, nasional dan internasional.⁷⁸

Visi dan misi tersebut merupakan hasil adaptasi civitas akademika di IAIN Ambon untuk merespon dinamika kemasyarakatan di Maluku, terutama setelah konflik bernuansa agama yang pernah “meluluntakkan” masyarakat Maluku dua decade yang lalu. Tampaknya sejarah konflik Maluku 1999-2004 telah mendorong kesadaran baru tentang pentingnya menemukan model-model pengelolaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial kultural masyarakat Maluku. Konsep multikulturalisme yang bertumpu pada pengakuan pada perbedaan dan kesetaraan, dianggap sebagai sesuatu yang relevan dengan spirit keislaman yang hendak dikampanyekan dan dikembangkan di kampus IAIN Ambon. Sebagai seorang tokoh yang banyak terlibat dalam gerakan bina damai di Maluku, termasuk menjadi salah satu peserta pada Perjanjian Malino,⁷⁹ Rektor Hasbollah Toisuta dan beberapa kolega menyiapkan IAIN Ambon sebagai kampus terdepan di Maluku, yang menyiapkan generasi muda Islam yang mampu

⁷⁸ Manajemen Mutu IAIN Ambon (LPM IAIN Ambon, 2017)

⁷⁹ Perjanjian Malino adalah sebuah kesepakatan monumental antara pihak Muslim dan Kristen yang terlibat dalam pertikaian selama konflik Maluku (1999-2002). Kedua pihak akhir bersepakat untuk berdamai dan menandatangani 12 butir kesepakatan di Malino Sulawesi Selatan. Rektor IAIN Ambon adalah salah tokoh utama dibalik peristiwa penting tersebut.

menjadi pioner dalam mengembangkan kehidupan keagamaan yang damai di Maluku.

Wacana Multikulturalisme dan Transformasi Akademik di IAIN Ambon

Wacana multikulturalisme yang dikembangkan di Ambon, merupakan suatu konsepsi baru yang dikembangkan sebagai bentuk kesadaran kolektif atas realitas sosial masyarakat Maluku yang multikultur. Apalagi konflik keagamaan di Maluku selama tahun 1999-2004, telah memberi pelajaran berharga tentang perlunya menemukan model-model pengembangan keagamaan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Menurut keterangan Dr. Mohdar Yanlua (Wakil Rector IAIN Ambon Bidang Akademik), gagasan tentang perlunya spirit multikulturalisme dalam pengembangan sistem akademik di IAIN Ambon, dimulai sekitar tahun 2012. Dalam berbagai seminar perdamaian yang dilaksanakan di IAIN Ambon, dibahas secara mendalam tentang multikulturalisme. Tahun 2013 IAIN menyelenggarakan workshop tentang penguatan visi misi IAIN Ambon, yang dihadiri berbagai pihak seperti pemerintah daerah Maluku, Dinas Pendidikan Maluku, Pengadilan Agama Maluku, Kantor Wilayah Agama Maluku, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKPN). Dr. Fahri Husein dan Tim dari lembaga penjaminan mutu dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta datang untuk membantu pihak IAIN Ambon merumuskan visi dan misinya.⁸⁰

Pada tahun 2017, Hasbollah Tosiuta sebagai Rector IAIN Ambon membentuk sebuah tim khusus yang bertugas menyusun sebuah buku pengantar tentang multikulturalisme yang direncanakan sebagai bahan ajar tentang multikulturalisme

⁸⁰ Wawancara dengan Dr. Mohdar Yanlua (Wakil Rector Bidang Akademik IAIN Ambon), 18 September 2019

di lingkungan IAIN Ambon. Buku tersebut akhirnya terbit pada tahun 2017 yang terdiri dari beberapa sub Bab. Pertama, tentang pengertian multikulturalisme, nilai-nilai multikulturalisme dan paradigm multikulturalisme yang berkembang. Kedua, tentang Maluku dan Multikulturalisme yang berisi realitas multikulturalisme di Maluku, nilai-nilai kearifan local yang merefleksikan multikulturalisme di Maluku dan berbagai identitas multicultural yang hidup di Maluku. Ketiga, tentang Realitas multikulturalisme Indonesia, filosofi bhineka tunggal ika dan multikulturalisme serta dinamika multikulturalisme di era Indonesia kontemporer. Keempat, tentang perkembangan multikulturalisme dalam Globalime, *cross culture* dan multikulturalisme serta kontestasi yang terjadi antara Identitas lokal dan globalisme. Kelima, membahas tentang nilai-nilai multikulturalisme dalam Islam, sejarah sosial masyarakat Islam sebagai potret multikulturalisme, dan respon Islam terhadap globalisasi dan multikulturalisme yang menjadi fenomena masyarakat modern.⁸¹

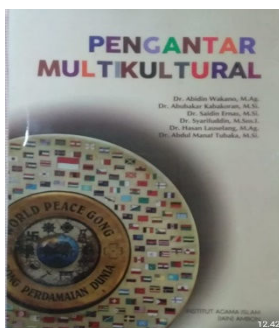
Secara ikonik buku pengantar multikultural ditulis oleh para dosen IAIN Ambon sebagai bagian dari visi IAIN Ambon. Dalam konteks demikian dimaksudkan agar IAIN Ambon mampu menafsirkan dan menggerakkan spirit dibalik hukum kehidupan multikultural untuk menjadikan IAIN Ambon sebagai basis kerja-kerja multikultural dalam semesta dimensinya. Dimana multikultural tidak saja dibatasi pemahamannya sebagai kenyataan sosiologis an sich. Akan tetapi, lebih dari pada itu, multikultural juga dimaksudkan sebagai produk dari kerja-kerja akademik dalam

⁸¹ Abidin Wakano, dkk *Pengantar Multikultural* (Jakarta: IAIN Ambon Press, 2018)

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berbasis pada nilai-nilai multikultural yang universal.⁸²

Pada akhir tahun 2017, IAIN Ambon mengundang Prof. Amin Abdullah, seorang ahli studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk membahas dan memberi komentar pada naskah buku tersebut, sebelum dicetak sebagai dokumen resmi. Amin Abdullah juga memberi penguatan tentang integrasi keilmuan, termasuk membicarakan konteks kurikulum multicultural dalam kurikulum IAIN Ambon. Beliau juga membimbing para dosen di IAIN Ambon untuk menyusun silabus dan rencana pembelajaran semester kuliah multicultural.⁸³ Mulai tahun 2018, IAIN Ambon memberlakukan kurikulum multicultural di IAIN Ambon, kuliah multikulturalisme diajarkan di setiap jurusan, termasuk mewarnai semua mata kuliah, termasuk mata kuliah science seperti Matematika dan Biologi.

Gambar Buku Pengantar Multikulturalisme



Sumber: IAIN Ambon Press, 2018

⁸² Abidin Wakano, dkk *Pengantar Multikultural* (Jakarta: IAIN Ambon Press, 2018), h. 130

⁸³ Wawancara dengan Dr. Mohdar Yanlua (Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Ambon), 18 September 2019

Secara umum transformasi multikulturalisme di IAIN Ambon bisa dilihat pada beberapa hal. *Pertama*, transformasi kurikulum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, baik secara formal maupun informal. Spirit multikulturalisme dianggap meringkai semua program studi keilmuan di IAIN Ambon, maka realitas keilmuan yang beragam diakui sebagai bagian dari keilmuan di IAIN Ambon. Dosen dari berbagai kualifikasi keilmuan termasuk dari pendidikan umum juga masuk ke IAIN Ambon. Bahkan beberapa dosen yang dulunya adalah alumnus dari pendidikan Tinggi Agama Islam secara mengejutkan, beberapa diantaranya mengambil magister di Perguruan tinggi Umum bahkan mengambil program doktoral di Perguruan tinggi Umum. Masuknya dosen dengan latar belakang umum dan pendidikan magister dan doktor di studi umum menunjukkan telah lenyapnya klaim homogenitas serta klaim “ortodoksi studi Islam” yang selama ini dikembangkan di IAIN Ambon. Pengembangan kurikulum yang menyesuaikan dengan visi multicultural juga dilakukan oleh Fakultas dan Prodi, dimana di semua prodi diselenggarakan kuliah pengantar multicultural. Demikian juga di program pascasarjana, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Ambon, bahwa untuk menyesuaikan dengan visi multikulturalisme maka jurusan Prodi PAI di Pascasarjana mengembangkan mata kuliah Pendidikan Multikultural di semester pertama. Sedangkan di Prodi Ahwal Al-Syakhsyah diselenggarakan kuliah Perkawinan Lintas Budaya.⁸⁴

Kedua, semangat multikulturalisme juga dipahami sebagai pandangan baru yang lebih progresif tentang hubungan antara iman. Misalnya sejak tahun 2015 mulai masuk dosen-dosen tamu non-Muslim untuk mengajar di IAIN Ambon. Mereka adalah Prof.

⁸⁴ Wawancara dengan Prof. Abdul Khalik Latuconsina (Direktur Pascasarjana IAIN Ambon), Oktober 2019

Max Tukang dan Prof. Alohiab Watloly dari Universitas Pattimura Ambon, Dr. Lies Marantika dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Dr. Yance Zadrak Rumahuru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon. Mereka memperkuat jaringan dosen di Program Pascasarjana IAIN Ambon. Para dosen di IAIN Ambon juga diberi izin untuk membantu pengajaran di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2017 IAIN Ambon mulai membuka diri bagi mahasiswa non-Muslim. Enam orang mahasiswa yang berasal dari kantor TVRI Maluku, diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. tersebut merupakan mahasiswa non-Muslim pertama di IAIN Ambon. Perkembangan ini banyak mengundang dikritik beberapa dosen lain di IAIN Ambon, yang menganggap Kondisi ini sering menimbulkan debat di kalangan sejumlah pihak di IAIN Ambon, karena bukan saja memunculkan heterodoksi mata kuliah, tetapi juga dianggap telah mengacaukan hegemoni keilmuan keislaman yang selama telah menjadi spirit keilmuan di IAIN. Namun tampaknya para pemimpin di IAIN Ambon, tetap mempertahankan kebijakan kergaman dosen tersebut.⁸⁵

Ketiga, multikulturalisme juga mewarnai cara pandang civitas akademika IAIN Ambon tentang perbedaan pemahaman keagamaan yang diwadahi dengan baik di IAIN Ambon. Misalnya perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran keagamaan, organisasi sosial hingga pandangan politik. Hal ini bisa dilihat pada perdebatan sekelompok dosen ketika terdapat informasi IAIN Ambon melarang penggunaan cadar, yang sering dipersonifikasi sebagai uniform beberapa kelompok radikal di Indonesia. Banyak dosen yang menyayangkan jika IAIN Ambon sampai harus melarang mahasiswi menggunakan cadar sebagaimana yang

⁸⁵ Wawancara dengan Ismail Tuanany (Ketua LP2M dan mantan dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon), Juli 2019

dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Hal tersebut seperti disebutkan oleh Dr. Saidin Ernas, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tentang multikulturalisme yang menghormati perbedaan, termasuk perbedaan pilihan pakaian bagi seorang Muslim. Kecuali jika benar ditemukan ada hubungan antara cadar dan radikalisme serta kekerasan di IAIN Ambon.⁸⁶

Salah satu pusat studi di IAIN Ambon yakni Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC), adalah lembaga yang cukup concern dalam pengembangan multikulturalisme di IAIN Ambon. Berbagai kegiatan seminar, diskusi dan FGD dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai keislaman dan multikulturalisme. Sejumlah ahli dalam dan luar negeri juga diundang sebagai pembicara, bekerjasama dengan lembaga nasional dan internasional yang bereputasi. Seperti kerjasama yang dilakukan dengan *Indonesia Netherland Moslem and Christian Relation* (INMCR) untuk menyelenggarakan *International Confrence* di Ambon. Kegiatan yang dilakukan pada Juni 2017 itu berhasil mengumpulkan sejumlah ahli dari berbagai perguruan tinggi besar di Belanda dan Indonesia. Dalam moment tersebut diinisiasi kegiatan pela pendidikan, untuk mengikat hubungan antara sekolah-sekolah yang siswanya berbeda agama, juga pela antara IAIN Ambon dan Universitas Indonesia Maluku.

ARMC IAIN Ambon juga menjalin kerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk menyelenggarakan *Interfaith Youth Camp* di Pantai Liang Ambon pada tahun 2017. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia. Abidin Wakano sebagai Direktur ARMC IAIN Ambon didaulat sebagai ketua panitia kegiatan nasional tersebut. Menurut Abidin, IAIN memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan visi

⁸⁶ Wawancara dengan Dr. Saidin Ernas (Dosen Sosiologi Agama IAIN Ambon), Juli 2019

multikulturalisme IAIN Ambon kepada public.⁸⁷ Sebagai kampus Islam terbesar di Maluku, IAIN Ambon berkepentingan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam tentang toleransi, penghormatan pada perbedaan untuk membangun kehidupan bangsa yang damai dan harmonis.

C. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengembangan Islam Mazhab Ciputat

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atau biasa dikenal dengan UIN Sahid, adalah salah satu perguruan tinggi Islam yang paling populer di Indonesia. Kampus ini terletak di pinggiran Ibu Kota Jakarta, yaitu daerah Ciptutat yang masuk wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. UIN Sahid merupakan kampus Islam yang telah memiliki sejarah yang panjang dan telah banyak melahirkan banyak tokoh dan intelektual Muslim terkemuka. Berbagai hasil pemikiran dan kajian keislaman intelektual asal UIN Jakarta banyak mempengaruhi pembaharuan keislaman di Indonesia bahkan juga di dunia Muslim. Bahkan dalam komunitas intelektual Islam Indonesia UIN Sahid Jakarta sering disebut sebagai salah satu pengembang mazhab pemikiran Islam terkemuka yang dikenal dengan istilah “Islam Mazhab Ciputat.” Para tokoh UIN Sahid seperti Harun Nasution, Nurkholis Madjid dan Azumardi Azra merupakan pengembang pemikiran keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan Islam di Indonesia.

Sejarah Singkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menelusuri berdirinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesungguhnya mengungkapkan berbagai kisah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka mewujudkan keinginan untuk

⁸⁷ Arman Man Arfa, *Interfaith Youth Come* (Yogyakarta: Literasi Press, 2018)

memiliki lembaga pendidikan tinggi yang berwawasan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Oleh karenanya, berdirinya UIN pada dasarnya merupakan produk keinginan umat Islam untuk membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan yang dapat menggembleng mahasiswanya menjadi kader umat yang handal dalam merespon setiap kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, sejarah perkembangan UIN Jakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam menjawab kebutuhan pendidikan Islam secara modern. Menurut website resmi UIN Jakarta, embrio UIN Jakarta dapat ditelusuri dari pendirian Pesantren Luhur (pada masa menjelang kemerdekaan), Sekolah Tinggi Islam di Padang dan di Jakarta Tahun 1946, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, serta pendirian Akademi Dinas Departemen Agama (ADIA) tahun 1957 di Jakarta hingga menjadi UIN Syarif Hidayatullah sekarang.⁸⁸

Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berawal dari dibentuknya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai akademi dinas Departemen Agama pada tanggal 1 Juni 1957, berdasarkan Ketetapan Menteri Agama, Nomor 1 Tahun 1957. Pendirian ADIA ini dimaksudkan untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mencapai ijazah pendidikan akademi dan semi akademi agar menjadi ahli didik agama pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan dan Sekolah Agama. Pada awal berdirinya, ADIA menempati kampus Universitas Islam Jakarta (UIJ) di Jalan Madura dan tahun kedua di Jalan Limau Kampus UHAMKA sekarang. Pada tahun ketiga baru menempati kampus di Ciputat yang disebut Kultur Sentrum (KS); kampus UIN

⁸⁸ Lihat Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

sekarang. Pada saat itu ADIA mempunyai 43 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam dua jurusan, yakni: Jurusan *Syariat* (Pendidikan Agama), dan Jurusan *Lughat al Arabiyah* (Jurusan Bahasa Arab) dan satu Jurusan Khusus untuk Imam Tentara dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, ditambah dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar mata kuliah Umum

Sesuai dengan fungsinya sebagai akademi dinas maka mahasiswa yang mengikuti kuliah pada ADIA itu terbatas pada mahasiswa yang memperoleh tugas belajar yang terdiri dari: Pegawai/Guru Agama di lingkungan Departemen Agama dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang masuk berdasarkan seleksi. Pimpinan ADIA pada saat itu adalah Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai Dekan dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan. Hari jadi ADIA ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi atau Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Tahun 1960 berdasarkan PP No II Tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960 ADIA bergabung dengan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam) yang berada di Yogyakarta menjadi IAIN al Jamiah al Hukumiyah. Diresmikan oleh Menteri Agama dalam suatu upacara di Gedung kepatihan Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 (*2 Rabiul Awwal 1380 H*). ADIA menjadi IAIN cabang Jakarta dengan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab dengan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Dekan Fakultas Adab.⁸⁹

Setelah menjadi IAIN cabang Jakarta, mahasiswanya tidak lagi terdiri dari mahasiswa ikatan dinas (Pegawai tugas belajar) saja tetapi juga menerima mahasiswa bebas. Sehingga jumlah mahasiswa meningkat menjadi 282 orang. Pada tahun 1962

⁸⁹ Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 66 Tahun 1962 Tanggal 15 Nopember 1962 dibuka Fakultas Ushuluddin yang merupakan metamorfosis dari Jurusan Da'wah wal Irsyad (Jurusan Imam Tentara) dengan Dekannya Prof.HM.Toha Yahya Umar dan diresmikan oleh Menag RI KH. Syaifuddin Zuhri dengan kuliah pertama berlangsung di Masjid Al Azhar. Seiring dengan dibukanya Fakultas Ushuluddin IAIN Cabang Jakarta kemudian berdiri sendiri menjadi IAIN al Jamiah al Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹⁰

Dalam Putusan Pemerintah No II Tahun 1960 disebutkan bahwa tujuan pembentukan IAIN adalah memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam Ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Diharapkan dengan mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam berarti mempertinggi pula tarap kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian dan intelektualisme. IAIN diharapkan menjadi lembaga *social* dan *academic expertation*.

Mengingat perkembangannya yang pesat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1963 bahwa IAIN yang telah mempunyai tiga fakultas maka dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri , maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Februari 1963 IAIN cabang Jakarta menjadi IAIN al Jamiah al Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Pelantikan Prof. Drs. H. Sunardjo sebagai Rektor IAIN Jakarta pada tahun 1963 juga mengukuhkan IAIN Jakarta menjadi Kooordinator Fakultas di Jakarta Raya, Jawa Barat dan Sumatera (Dalam perkembangannya, cabang-cabang IAIN Jakarta ini kemudian satu persatu berdiri sendiri menjadi IAIN maupun STAIN).

⁹⁰ Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

Pada Tahun 1988, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 15 Tahun 1988, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri dari fakultas-fakultas: Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Syari'ah, Dakwah di Jakarta dan Fakultas Tarbiyah di Pontianak. Dalam perkembangan Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.11 tahun 1997 tentang Perubahan Status Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah Pontianak berdiri sendiri sebagai STAIN Pontianak dan IAIN Jakarta tidak lagi mempunyai kelas jauh diluar kampus Ciputat.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution (1973-1984) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikenal sebagai Kampus Pembaharuan, karena beliau banyak mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam Pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang rasional, bahkan cenderung controversial (pada saat itu mengundang reaksi masyarakat). Seperti masuknya mata kuliah filsafat dalam kurikulum IAIN Jakarta dan pengiriman dosen-dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke Barat. Pada masa ini juga IAIN Jakarta menyelenggarakan Program Pascasarjana (PPs) pertama di lingkungan IAIN seluruh Indonesia.⁹¹

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia, dan bertempat di Ibu kota Jakarta, juga menempati posisi unik dan strategis, tidak hanya sebagai Jendela Islam di Indonesia, tetapi juga simbol bagi kemajuan pembangunan nasional khususnya di bidang pembangunan keagamaan oleh karena itu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak pernah berhenti berkembang untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang terkemuka.

Langkah pengembangan ini mulai diintensifkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Tahun 1988

⁹¹ Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

dengan konsep *IAIN with wider mandate* atau IAIN dengan mandat yang lebih luas menjadi dasar menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun akademik 1998/1999, dibuka jurusan Psikologi dan Matematika pada Fakultas Tarbiyah serta jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syari'ah. Tahun akademik 2000/2001 dibuka Program Studi Konversi IAIN menjadi UIN yang terdiri dari Program Studi Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian), Sistem Informasi, Teknik Informatika, Manajemen dan Akuntansi. Tahun Akademik 2001/2002 jumlah Fakultas bertambah dengan dibukanya Fakultas Psikologi (metamorfosis dari jurusan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah) dan Fakultas Dirasah Islamiyah (kelas khusus dengan sistem Al Azhar).⁹²

Pembukaan program studi baru tersebut, terutama program studi ilmu-ilmu umum merupakan langkah yang signifikan dan merupakan salah satu upaya menuju perubahan IAIN Jakarta menjadi universitas. Upaya ini mendapat rekomendasi pada tahun 2001 dengan ditandatanganinya Surat Keputusan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang perubahan IAIN menuju UIN. Pada tahun itu juga 12 Program Studi Sosial dan Eksakta (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) Psikologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi mendapat Rekomendasi/Izin Operasional dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 088796/MPN/2001 tanggal 22 Nopember 2001.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.

⁹²Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

031 Tanggal 20 Mei 2002. Keppres itu menjadi landasan legalitas formal perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada saat itu terdiri dari 9 fakultas yaitu: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan jumlah jurusan/prodi sebanyak 41 dengan bidang studi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama.⁹³

Dengan perubahan ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat mendorong terjadinya integrasi keilmuan baik dalam bidang agama, kemanusiaan, keindonesiaan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan integratif, adaptif, responsif dan inovatif terhadap pemikiran modern dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dengan landasan iman, ilmu dan amal yang menjadi dasar pijakan dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, baik ilmu-ilmu Qur'aniyah maupun ilmu-ilmu Kauniyah.

Kerangka itu pula yang mendasari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pemberian gelar kesarjanaan sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 16 Tahun 2002. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di Program S1, S2, S3 berhak mendapat gelar sesuai dengan program studinya. Dengan demikian lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada posisi yang sama dengan lulusan universitas-universitas negeri yang lain di Indonesia.

⁹³ Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

Sebagai Universitas Islam Negeri yang sejajar dengan Universitas Negeri lainnya di Indonesia, mulai Tahun akademik 2003/2004 dalam penerimaan mahasiswa baru disamping penerimaan secara lokal, UIN Syarif Hidayatullah juga masuk dalam SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang bertarap Nasional. Dengan demikian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara tidak langsung sudah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pengakuan ini menjadi modal dasar membangun menuju internasionalisasi dan globalisasi dalam kerangka universitas riset yang unggul dan kompetitif (*Leading Towards Research University*).

Langkah untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum juga mendasari pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun akademik 2004/2005. Pendirian FKIK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama SK No.MA/25/2004 dan surat Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional No. 995/D/6/2004. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada Tahun akademik 2004/2005 UIN Jakarta membuka Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat berdasarkan izin operasional Dirjen Dikti No. 1338/D/P/2004 tanggal 12 April 2004 dan Program Studi Farmasi dengan izin operasional No 138/D2.2/2004 tanggal 6 Agustus 2004 dan Surat Keputusan Dirjen Bagais Depag No. Dj.11/274/2004 tanggal 8 Agustus 2004.⁹⁴

Sedangkan untuk program studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Keperawatan dibuka pada tahun akademik 2005/2006 berdasarkan izin operasional Dirjen Dikti no.1356/D/T/2005 tanggal 10 Mei 2005 dan Surat Keputusan Dirjen Bagais Nomor:Dj.II/123/2005 tanggal 17 Mei 2005.

⁹⁴ Awal Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>

Pendirian FKIK ini bekerjasama dengan FK UI sebagai Fakultas Pembina. Sebelumnya juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengadakan kerjasama untuk mendukung pendirian FKIK dengan berbagai pihak, di antaranya dengan sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta dan Tangerang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa.

Komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Riset ini adalah untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, dengan menempatkan kemampuan meneliti sebagai kualifikasi utama dalam setiap kinerja ilmiah akademis. Karena sebagai Universitas Riset, kemampuan penelitian menjadi kualifikasi utama dalam setiap penampilan. Dengan berbasis riset, diharapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memiliki daya tarik bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa tingkat magister dan doktor dari berbagai penjuru dunia sehingga tercipta *academic, social cultural exchange* yang pada gilirannya membentuk *intellectual community* dan *learning society* dengan berkemampuan riset dan analisis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang profesional dalam *spectrum* yang lebih luas dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siap go internasional dan menjadi Universitas International. dan menjadi Jendela Keunggulan Akademis Islam Indonesia (*Window of Academic Excellence of Islam in Indonesia*) seperti yang diharapkan oleh tokoh-tokoh pejuang pendidikan Islam.⁹⁵

Apabila beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan nama-nama para tokoh di bidang kemiliteran, IAIN

⁹⁵ Komitmen menjadi universitas riset sering disampaikan Rektor dan pemimpin UIN Jakarta, sebagaimana dimuat dalam berita berjudul “UIN Jakarta Komitmen Capai Research University” dalam website

<https://www.uinjkt.ac.id/id/uin-jakarta-komitmen-capai-research-university/>

lebih memilih nama-nama tokoh di bidang keagamaan. Penamaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tidak terlepas dari hal tersebut diatas. Dipilihnya nama Syarif Hidayatullah adalah karena nama itu merupakan nama asli dari salah satu Walisongo, sembilan penyiar Islam di Pulau Jawa, yakni Sunan Gunung Jati yang memiliki peranan besar dalam pengembangan Islam di Sunda Kelapa (Jakarta sekarang). Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) lahir di negeri Arab pada 1448 M dan wafat di Cirebon pada 1568 M. Ia adalah putra Nyai Rara Santang (putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran) dengan Syarif Abdullah. Gelar-gelar yang diberikan kepadanya adalah Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Maulana Syekh Makhdum Rahmatullah, dan Makhdum Jati. Setelah mangkat ia diberi gelar “Sunan Gunung Jat

Visi, Misi dan Pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dalam rangka mengembangkan kelembagaan diri kedepan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menetapkan visi “menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.” Cita-cita ini tampaknya terus berusaha diwujudkan oleh civitas akademika di UIN Sahid Jakarta.

Melakukan integrasi antara Ilmu, Islam dan Keindonesiaan menjadi kata kunci yang terus diupayakan oleh UIN Sahid, sebagaimana dijabarkan dalam visinya, *pertama*, melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga tidak ada lagi dikhotomi anatar ilmu umum dan ilmu agama. *Kedua*, memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) sehingga Iptek dan Imtaq dapat sejalan. *Ketiga*, mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademis kedalam konteks kehidupan

masyarakat, sehingga tidak ada lagi jarak antara nilai dan perspektif agama dengan sofisme masyarakat. *Keempat*, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan. *Kelima*, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk kepentingan ilmu dan masyarakat. *Keenam*, membangun tata kelola Universitas yang baik dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat. *Ketujuh*, membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. *Kedelapan*, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.⁹⁶

Semua gagasan yang tertuang dalam visi dan misi tersebut diharapkan bisa menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. UIN Sahid juga berkomitmen menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan atau vokasi yang kompetitif serta dapat mengembangkan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni. Semnata itu dalam konteks keilmuan UIN Sahid juga berkomitmen untuk menyebarkan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya budaya nasional.

⁹⁶ Pernyataan visi misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bisa dilihat di <https://www.uinjkt.ac.id/id/visi-misi-dan-tujuan/>

Menurut Azyumardi Azra, konsep dasar awal pengembangan IAIN Jakarta pada 1990-an adalah perubahan IAIN Jakarta menjadi UIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, atau Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Gagasan menjadi UIN ini bertitik tolak dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN selama ini, yaitu: Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal tugas pendidikan tinggi Islam bukan hanya dakwah, tetapi juga penelitian dan pengembangan keilmuan dan teknologi. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespons perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks di awal abad ke-21 ini. Hal ini disebabkan karena bidang kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN, kurang mengalami interaksi dan *reapproachment* dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis.⁹⁷ Kondisi ini menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang kurang relevan dengan perkembangan keilmuan.

Dengan dua alasan itulah IAIN Sahid Jakarta kemudian mengadopsi konsep IAIN “with wider mandate.”⁹⁸ Dalam konsep ini, pendidikan di IAIN tidak lagi terbatas pada mandat formal dalam ilmu-ilmu agama yang termasuk ke dalam bidang humaniora, tetapi juga mengembangkan mandat dalam bidang humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta. Di sini, “core” IAIN dalam bidang ilmu agama tetap dipertahankan,

⁹⁷ Masibhubnu Marya, *Pembaruan Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra*, (Skripsi di UIN Bandar Lampung, 2017)

⁹⁸ Lihat penjelasan Imam Suprayogo, *Paradigma Winder Mandate dalam Pengembangan PTKIN*, dalam <http://imamsuprayogo.lecturer.uin-malang.ac.id/2012/10/08/paradigma-wider-mandate-dalam-pengembangan-ptain/>

tetapi pada saat yang sama juga membentuk jurusan dan fakultas yang baru sama sekali. Dengan mempertimbangkan berbagai constraint yang ada, pentingnya Islam sebagai core semua ilmu, dan pertimbangan historis, maka dipilihlah konsep IAIN dengan mandat lebih luas. Karena itu, pengembangan IAIN Jakarta ditujukan bukan hanya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta.

Atmosfir Akademik dan Wacana Multikulturalisme di UIN Sahid Jakarta

Sebagai kampus besar yang terletak di Ibu Kota Negara, UIN Syarif Hidayatullah memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika pemikiran keagamaan, terutama keislaman di Indonesia. Bahkan hasil pemikiran para intelektual dari universitas Islam yang terletak di daerah Ciputat Tangerang ini sering dikonstruksi sebagai wacana progressif yang dikenal dengan *Islam Mazhab Ciputat*. Sebagaimana terlihat dalam buku hasil tulisan kompilasi para cendekiawan Islam di UIN Sahid yakni “Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat” yang ditulis oleh sejumlah intelektual Islam seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Fachry Ali, Kautsar Azhari-Noer, Budhy Munawar-Rachman, Quraish Shihab, Din Syamsudin dan lainnya.⁹⁹ Penerbitan buku “Islam Mazhab Ciputat” sebagai sebuah publikasi penting tentang bagaimana intelektual Islam dari UIN Sahid Jakarta memandang kebutuhan reformasi kehidupan social keagamaan di Indonesia.

⁹⁹ Nurcholish Madjid, *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, (Bandung: Zaman, 1999)



Buku Islam Mazhab Ciputat adalah klaim tentang pergulatan pemikiran para intelektual UIN tentang Islam dan fenomena sosial kemasyarakatan

Gambar.
Buku Islam Mazhab Ciputat

Abudin Nata dalam artikelnya “Islam Mazhab Ciputat yang Menasional dan Mendunia,” menulis bahwa Islam mazhab ciputat adalah perpaduan pendekatan normatif, teologis, sosiologis, historis dan moral spiritual Islam yang melahirkan suatu pandangan keislaman yang unik dari komunitas UIN Ciputat. Epsitimologi inilah yang selanjutnya digunakan untuk mengartikan Islam mazhab Ciputat. Harun Nasution adalah tokoh utama dibalik apa yang belakangan disebut sebagai Islam Mazhab Ciputat. Sedangkan Nurcholish Madjid hingga Azumardi Azra adalah generasi pertama IAIN Syarif Hidayatullah yang menyerap ide-ide Harun Nasution dan memperkenalkan gagasan-gagasan modernisme Islam dengan segala variannya. Keberadaan organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat yang memiliki tradisi intelektual yang kuat mendorong

pelembagaan pemikiran keislaman yang sangat progresif di IAIN Ciputat.

Dalam realitanya, Islam Mazhab Ciputat yang dikembangkan dalam atmosfir keilmuan didekasikan untuk meneguhkan spirit wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu spirit ajaran yang seimbang antara agama (wahyu), ilmu (akal), dan amal (sikap dan perbuatan. Karakter berfikir keislaman yang utuh, komprehensif dan integrated dari berbagai sudut pendekatan (*multi approaches*): normatif, teologis, spiritual, moral, sosiologis, antropologis, historis, filosof, kultural, dan sebagainya. Islam yang seperti itulah yang nampaknya dianut oleh Islam mazhab Ciputat. Yaitu Islam yang menampilkan wajah yang utuh, komprehensif, holistik, dan integrated dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁰⁰ Secara keseluruhan perkembangan keilmuan dan kajian keislaman di UIN Jakarta dapat direpresentasi oleh corak pemikiran tiga tokoh sentral dari UIN Sahid. Ketiganya adalah representasi tiga generasi berbeda, tapi memiliki kontinuitas dan spirit yang sama. Spektrum pemikiran ini sangat berpengaruh di Indonesia.

Pertama, pemikiran Harun Nasution yang memiliki corak keislaman yang rasional, toleran, moderat, inklusif, progressif, dan inovatif. Gagasan dan pemikirannya ini tidak hanya untuk kepentingan akademik dan pengembangan wawasan akademik saja, melainkan untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam. Ia misalnya sering mengatakan, bahwa di antara penyebab kemunduran Islam adalah karena menganut teologi jabariyah (fatalism), mendahulukan kepasrahan pada Tuhan sebelum usaha, paham takdir yang tidak berbasis sunnatullah, sikap jumud, dan tertutupnya pintu ijtihad. Untuk itu mewujudkan keadaan Islam yang demikian itu. Harun Nasution mengajak umat Islam untuk

¹⁰⁰ Abudin Nata, "Islam MAzhab Ciputat yang Menasional dan Mendunia," dalam <http://abuddin.lec.uinjkt.ac.id/articles/islam-madzhab-ciputat-yang-menasional-dan-mendunia>

bersikap toleran, tidak fanatik dan tidak sektarian, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, memasukan mata kuliah studi Islam yang komprehensif dan berbagai aspeknya, serta mata kuliah umum, seperti sosiologi, sejarah, filsafat, perbandingan agama dan statistik, merubah metode pengajaran yang lebih dialogis; mengajak mahasiswa bersikap rasional, kritis, objektif, dan komprehensif.¹⁰¹ Guna menumbuhkan berfikir rasional ini, Harun Nasution memperkenalkan dan mengajarkan mata kuliah Filsafat, dan memperkenalkan pemikiran sejumlah filosof, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan Ibn Tufail, melalui bukunya yang berjudul *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*.¹⁰² Khusus untuk meyakinkan bahwa menggunakan akal sangat dianjurkan dalam Islam, Harun Nasution menulis buku *Akal dan Wahyu*. Di dalam buku tersebut Harun Nasution menyatakan bahwa akal digunakan dalam memahami tauhid, fikih, dan tafsir.¹⁰³ Buku-buku Harun Nasution menjadi *best seller* dan digunakan sebagai referensi utama di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Kedua, terkait dengan gagasan dan pemikiran Nurcholish Madjid tentang modernisme Islam yang dapat dijumpai dalam berbagai karya tulisnya. Tulisan Nurcholish Madjid memberi landasan teologis, terutama bagi golongan intelektual, agar mampu memberikan responsi positif terhadap modernisasi, tetapi tetap bertolak dari mengacu kepada iman-Islam.¹⁰⁴ Hal ini bisa kita jumpai dalam karya monumental Nurcholish Madjid yang berjudul “Islam, Doktrin dan Peradaban, sebuah Tela’ah Kritis tentang

¹⁰¹ Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), cet. I, hal. 9.

¹⁰² Lihat Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1978), cet. II.

¹⁰³ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta:UI Press, 1986), cet. I,

¹⁰⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesia*, (Bandung:Mizan, 1993), cet. V, hal. 30.

Masalah Keimanan dan Kemodernan.” Dalam buku tersebut, Nurcholish memaparkan kajian mendalam tentang iman yang jauh berbeda dengan kajian tentang iman sebagaimana yang dijumpai dalam buku-buku keimanan yang terdapat dalam berbagai kitab kuning yang cenderung teo-centris, membahas sifat-sifat Tuhan berdasarkan dalil naqli (al-Qur’an dan hadis) tanpa dihubungkan dengan kehidupan manusia secara kontekstual dan aktual. Iman dalam pandangan Nurcholish Madjid memiliki keterkaitan dengan tata nilai Rabbaniyah, emansipasi dan hakikat kemanusiaan, perwujudan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Iman menurut Nurcholish Madjid juga terkait dengan upaya memajukan masyarakat. Di dalam buku itu juga Nurcholish berbicara tentang disiplin ilmu keislaman tradisional: kalam, fiqh dan tasawuf; konsep kosmologi, antropologi, hukum, universalisme Islam, Islam dan kedudukan bahasa Arab, menangkap kembali dinamika Islam klasik dan kosmopolitanisme, makna modernitas dan tantangannya, ajaran nilai etis dan kitab suci, penggunaan bahan-bahan modern untuk memahami Islam, konsep keadilan dalam Qur’an, masalah teknologi, Islam dan budaya lokal, kaum Muslimin dan partisipasi sosial politik, serta reaktualisasi nilai kultural dan spiritual dalam proses transformasi masyarakat.¹⁰⁵

Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid yang demikian aktual, kontekstual, segar, responsif, inovatif dan modernis ini pada hakikatnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan induk beliau yang dituangkan dalam buku Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang menjadi buku wajib dalam pelatihan dan pengkaderan di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang

¹⁰⁵ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), cet. II.

Ciputat.¹⁰⁶ Gagasan Nurcholis menjadi tren pemikiran Islam yang selalu didengarkan para aktifis Islam dari IAIN Ciputat ketika itu. Dalam upaya memajukan kehidupan ummat Islam, Nurcholish juga mengajukan gagasan tentang sekularisasi (bukan sekularisme), yakni memperlakukan hal-hal yang agama sebagai agama, dan yang bukan agama. Selain itu, Nurcholish Madjid juga mengungkapkan gagasan tentang Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat, ikhtiar dan takdir yang dikembalikan kepada semangat al-Qur'an dan Hadis yang mendorong usaha keras dan sungguh-sungguh dari manusia.¹⁰⁷

Ketiga, pemikiran Azyumardi Azra yang memiliki corak pemikiran Islam yang modern, demokratis, moderat, toleran, inklusif, terbuka dan rasional. Pemikiran modern Azyumardi Azra antara lain nampak dalam bidang pemikiran Islam, pendidikan, dan tasawuf. Melalui kajiannya dalam bidang sejarah dan sosial, Azyumardi misalnya menunjukkan, bahwa modernisasi pemikiran Islam sesungguhnya telah ada akar-akarnya pada ulama di abad ke XVII dan XVIII. Temuannya ini, beliau tuangkan dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara-Haramain Abad ke-XVII dan XVIII. Dalam kaitan ini ia mengatakan, bahwa agama memberikan kepada manusia sejumlah konsep mengenai konstruksi realitas yang didasarkan bukan pada pengetahuan dan pengalaman empirik kemanusiaan itu sendiri, melainkan dari otoritas ketuhanan.¹⁰⁸ Itulah

¹⁰⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Islam Mazhab HMI Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan* (NDP), (Jakarta:Kultura GP Press Group, 2007), cet. I, h. ix.

¹⁰⁷ Lihat Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta:Paramadina, 1979), cet. I, h. 91.

¹⁰⁸ Lihat Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999), cet. I, h. 229.

sebabnya lebih lanjut Azyumardi Azra mengatakan, bahwa persoalan interaksi Islam dan budaya termasuk budaya Melayu, Kalimantan, pada intinya melibatkan suatu “pertarungan” atau setidaknya, “ketegangan” antara doktrin agama yang dipercayai bersifat absolut karena berasal dari Tuhan, dengan nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat produk manusia yang tidak selalu sejalan dengan ajaran-ajaran ilahiyah.¹⁰⁹ Dalam melakukan modernisasi pemikiran Islam, Azyumardi juga menyarankan tentang perlunya melihat keragaman yang terjadi dalam memahami Islam. Menurutnya, Islam perlu didefinisikan dengan cara yang lebih sosiolog, dan suatu masyarakat akan dianggap Islam, jika Islam telah aktual, memberikan prinsip-prinsip yang berfungsi secara aktual bagi segenap lembaga sosial budaya dan politik.

Azyumardi Azra adalah salah satu intelektual utama di UIN Syarif Sahid yang banyak menulis dan melahirkan karya tentang multikulturalisme. Ia menulis buku, artikel ilmiah, atau opini di berbagai media untuk mempromosikan multikulturalisme sebagai tawaran konseptual dalam mengelola keragaman di Indonesia. Dalam sebuah kata pengantar untuk buku Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural karya Zakiyuddin Baidawi (Dosen UIN Sahid), Azyumardi Azra menulis bahwa multikulturalisme kepercayaan kepada “normalitas” dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia seperti ini merupakan titik tolak bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Multikulturalisme kata Azra adalah imperative peradaban, karena multikulturalisme meyakini bahwa setiap kebudayaan memiliki makna dan nilai sehingga

¹⁰⁹ Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2002), cet. I, h. 17.

mendapat tempat dan penghormatan sebagaimana kebudayaan lainnya.¹¹⁰

Azra jug menulis tentang pluralisme untuk menjelaskan konsepsi tersebut dalam mengelola keragaman.¹¹¹ Dalam tulisannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai gagasan yang Berserak,” Azra menjelaskan tentang pentingnya pemahaman tentang pluralisme dengan kerangka keilmuan yang ada. Pluralisme merupakan dasar bagi bangunan multikulturalisme dalam kehidupana berbangsa dan bernegara.¹¹² Azyurmardi Azra juga memberi perhatian pada bidang pendirikan untuk melahirkan peserta didik yang memiliki kesadaran multikultural. Dalam tulisannya yang berjudul “Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika,” Azra mempertegas tentang pentingnya system pendidikan yang digali dari semangat multikulturalisme. Pendidikan multicultural adalah invetasi penting bagi pembangunan masa depan Indonesia yang beragam.¹¹³

Selain Azyumardi Azra ada banyak intelektual di UIN Sahid Jakarta yang memberi perhatian terhadap gagasan multikulturalisme dalam karya-karya mereka. Misalnya para penulis dan intelektual yang lebih muda seperti Dede Rosyada, Zakiyudin Baidhawi, Jamhari, Fuad Jabali, Burhanudin Muhtadi UIN Sahid yang juga menulis tentang multikulturalisme. Bahkan

¹¹⁰ Azyumardi Azra, “Pendidikan Agama membangun Multikulturalisme di Indonesia,” sebuah pengantar dalam Zakiyuddin Baidhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005)

¹¹¹ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dapat diakses dalam <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20yyumardi%20azra.htm>.2007.

¹¹² Azyumardi Azra, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai gagasan yang Berserak*, (Bandung: Nuansa, 2005).

¹¹³ Azyumardi Azra, “Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika,” dalam *JurnalTsaqafah*, Vol. I, No. 2, 200, h.

UIN Sahid juga beberapa kali menyelenggarakan berbagai conference, seminar, pertemuan ilmiah untuk mempromosikan multikulturalisme. Seperti halnya seminar nasional tentang kompetensi multicultural bagi pekerja professional yang diselenggarakan oleh Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 April 2017.



Sumber: <https://www.jurnalpost.com>

Hal lain yang penting adalah bagaimana spirit multikulturalisme dikembangkan dalam kehidupan akademik yang luas di UIN Ciputat. Menurut Fuad Jabali (salah seorang pimpinan di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) Multikulturalisme di UIN Sahid Ciputat tidak dinyatakan secara eksplisit dalam visi dan misi kelembagaan. Namun demikian pengalaman kajian keislaman yang panjang dari para para intelektual Islam lulusan UIN Sahid Ciputat, maka semangat multikulturalisme hidup dalam praktik akademik. Ia mencontohkan bagaimana di pascasarjana satu mata kuliah diajarkan oleh dosen dari berbagai latar belakang keilmuan,

dan lulusan. Semua itu menunjukkan kuatya pemikiran multicultural di UIN Sahid. Hal ini pula yang membuat banyak mahasiswa non-Muslim yang mau melanjutkan studinya di UIN Sahid Jakarta.¹¹⁴

Jumlah mahasiswa non-Muslim di IAIN Jakarta saat ini diperkirakan sekitar orang. Sebagian mahasiswa non-Muslim berasal dari luar negeri. Rector UIN Sahid Jakarta (2015-2019) Dede Rosyada menyampaikan bahwa UIN Jakarta memperbolehkan semua kalangan, termasuk non muslim untuk belajar di kampus UIN Jakarta. Saat ini di UIN Jakrat mahasiswa non-Muslim bukan saja yang beragama Nasrani, tapi juga ada yang beragama Budha dan Khonghucu.¹¹⁵ UIN Sahid Jakarta juga sering mendatangi dosen tamu dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang keilmuan dan agama. Mereka semua mewarnai perkembangan keilmuan di kampus tersebut.

Pengembangan pemikiran Islam dan multikulturalisme juga banyak dilakukan oleh sejumlah pusat studi di UIN Sahid Jakarta. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) adalah salah satu lembaga di UIN Jakarta yang memiliki konsepsi pada pengembangan masyarakat yang demokratis. Saat ini PPIM merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. PPIM banyak mempublikasi hasil penelitian dan pengkajian tentang Islam dan lokalitas, multikulturalisme, reaktualisasi maupun transformasi agama ke dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, ditambah dengan

¹¹⁴ Wawancara dengan Fuad Jabali di UIN Sahid Jakarta, Juli 2019

¹¹⁵ Hal ini disampaikan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada bahwa Mahasiswa Non Muslim Dapat Belajar di UIN Jakarta, dalam <http://kabarkampus.com/2018/07/mahasiswa-non-muslim-dapat-belajar-di-uin-jakarta/>

penguatan demokrasi, gender, HAM, dan gagasan tentang Islam dan civil society, menggambarkan wacana Islam yang berkembang secara dinamis.¹¹⁶ Pasca tragedi 11 September, PPIM Juga banyak melakukan studi tentang terorisme global, radikalisme dan kecenderungan konservatisme dan radikalisme agama pada masyarakat Muslim di Indonesia. Menurut Fuad Jabali, saat ini PPIM fokus melakukan kajian-kajian strategis tentang kehidupan dan pendidikan keagamaan untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan masyarakat di Indonesia. Di samping itu, PPIM tetap berkomitmen untuk mengembangkan dan menyebarkan kekayaan tradisi Islam Indonesia di berbagai tingkatan untuk memperkaya nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, ada juga pusat kajian bernama *Center for The Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Jakarta. CSRC membangun Perspektif Islam yang berakar pada tradisi Islam, kemodernan, dan keindonesiaan serta mengaktualisasikan ajaran, nilai, dan etika Islam dalam kehidupan komunitas Muslim secara positif, agar mereka dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial budaya secara konstruktif. Melalui kajian, penelitian, dan pelatihan, CSRC berkomitmen untuk dapat menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu sehingga dapat memberi manfaat dan arti penting bagi upaya perwujudan umat Islam Indonesia yang damai, demokratis, adil, sejahtera, dan mandiri. Salah satu focus program di CSRC adalah dialog antar budaya, agama (Pluralisme) dan demokrasi. Program ini mencoba merumuskan paradigma otentik mengenai pluralisme demokratis dan multikulturalisme dimana terdapat penghargaan yang tinggi

¹¹⁶Lihat penjelasan tentang Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam <https://ppim.uinjkt.ac.id/tentang-kami/ppim/>

terhadap keragaman serta kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar universal yang dijunjung tinggi oleh setiap budaya dan agama di Indonesia.

D. UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Kampus Islam di Negeria Syariat

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri adalah salah satu perguruan tinggi Islam yang terletak Banda Aceh Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sebuah Provinsi yang memiliki sejarah keislaman yang sangat kuat, dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat *privalede* untuk memberlakukan syariat Islam secara terbatas. Sejarah dan kondisi sosial keagamaan di negeri yang biasa disebut sebagai “Serambi Mekah” tersebut turut mewarnai perkembangan keilmuan dan keagamaan di Aceh.

Sejarah Singkat UIN Ar-Raniri Banda Aceh

Nama UIN Ar-Raniri diambil dari nama seorang ulama dan mutfi besar yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Ar-Raniri telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Kesultanan Aceh Darussalam.¹¹⁷ Oleh sebab itu, dianggap sebagai salah satu ulama yang sangat dihormati.

Sebagai wilayah yang memiliki pengaruh keislaman yang kenatal masyarakat Aceh mengingin dibentuknya sebuah perguruan tinggi atau universiras Islam yang menjadi tempat para santri yang belajar di Dayah (pondok pesantren dalam tradisi Aceh)

¹¹⁷ Ahmad Daudy, *Syeikh Nuruddin ar-Raniry: Sejarah, Karya dan Sanggahan terhadap Wujudiyah di Aceh* (Bulan Bintang, 1978)

untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selama beberapa abad santri-santri Dayah harus melanjutkan studi hingga ke Timur Tengah atau tempat-tempat yang jauh, sehingga kehadiran sebuah perguruan tinggi Islam diharapkan bisa menjadi “kawah candra dimuka” untuk para ulama dan intelektual Muslim Aceh. Keinginan ini akhirnya terpenuhi, setelah pemerintah, melalui kementerian Agama menyetujui dibukanya kampus cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kota Banda Aceh.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan dibukanya Fakultas Syari’ah dan Fakultas Tarbiyah di Aceh pada tahun 1960-1962. Kedua fakultas tersebut merupakan cabang (filial) dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersamaan dengan pendirian kedua Fakultas tersebut juga didirikan Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh pada tahun 1962. Perkembangan IAIN Ar-Raniri sejak masala kelahirannya disuport oleh berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Hampir seluruh lapisan masyarakat Aceh memberi bantuan dalam berbagai bentuk untuk keperluan pendidikan di IAIN.¹¹⁸ Kehadiran Presiden Sukarno dalam dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry adalah satu dukungan yang sangat penting. Dalam sambutannya Sukarno menyampaikan bahwa di IAIN Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan revolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus menjadi tempat penggodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya.¹¹⁹

Setelah setahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas-fakultas tersebut diatas kemudian dipindahkan dan

¹¹⁸ Seperti yang ditulis H. Ismail Muhammad Sjah, *Perkembangan UIN Ar-Raniri Banda Aceh* (Makalah laporan kegiatan, tidak diterbitkan)

¹¹⁹ Lihat Sejarah Ar-Raniri dalam <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>

berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama masa enam bulan sampai kemuduaian dibentuknya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Maka tepat tanggal 5 Oktober 1963 Pemerintah meresmikan berdirinya UIN Ar-Raniri Banda Aceh, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963. Pada saat itu, UIN Ar-Raniri merupakan IAIN yang ketiga yang dibangun oleh pemerintah di seluruh Indonesia, setelah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Ar-Raniry terus maju dan berkembang. Hal ini terlihat, ketika IAIN Ar-Raniry diresmikan (5 Oktober 1963) baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, namun baru berusia 5 tahun telah diresmikan pula Fakultas Dakwah (tahun 1968) sebagai fakultas dakwah pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun.¹²⁰

Perkembangan IAIN Ar-Raniri semakin maju dengan dibentuknya Fakultas Adab pada tahun 1985. Dan mulai memiliki berbagai gedung permanen, yang difungsikan sebagai sentral Universitas. Alumninya ditemukan pada hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta (termasuk di luar Aceh), tidaklah berlebihan untuk disebutkan kalau lembaga ini telah berada dan menjadi "jantung hate masyarakat Aceh."¹²¹ Lulusannya mampu mengemban amanah di berbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah

¹²⁰ Sejarah Ar-Raniri dalam <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>

¹²¹ Wawancara dengan Dr. Salami Mahmud (ketua LP2M UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Juli 2019)

berkiprah di berbagai profesi, baik yang berkaitan dengan sosial keagamaan, maupun yang berhubungan dengan aspek publik lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah ini, baik pemimpin formal maupun informal.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka pada 5 Oktober 2013, ketika IAIN A-Raniri genab berumur 50 tahun, Perguruan Tinggi Islam terbesar di Aceh ini dirubah wajah dan namanya dari Institutut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry). Setelah menjadi universitas Maka UIN Ar-Raniri mulai mebuca berbagai fakultas dan bidang kajian science dan teknologi. Seperti Fakultas teknik, fakultas Mipa, dan Fakultas Psikologi. Saat ini UIN Ar-Rani telah menjadi salah satu universitas unggulan di Provinsi Aceh.

Visi dan Misi UIN Ar-Raniri Banda Aceh

Sebagai pergrurun tinggi Islam yang besar dan berpengaruh di Banda Aceh, maka UIN Ar-Raniri telah memantapkan visi kelembagaannya “Menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Pusat Studi Islam yang kontemporer dan bertaraf internasional.” Dalam koteks visi tersebut maka Ar-Raniri ingin menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni.” Integrasi menjadi kata kunci dalam pengembangan keilmuan di UIN Ar-RAniri, dan diharapkan menjiwai seluruh proses akademik dan atmosfir keilmuan yang berkembang di sana.

Menurut Rektor UIN Ar-Raniri, integrase keilmuan antara ilmu-ilmu agama dan umum adalah jalan untuk membangun kembali “Tamadun Islam.” Integrasi ilmu merupakan isu sentral dalam kancah Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, termasuk UIN Ar-Raniry. Perwujudan dari visi tersebut dijabarkan

secara lebih lanjut rumusan misi UIN Ar-Raniri. Pertama, mengembangkan dan menyebarluaskan etika keilmuan Islam melalui kehidupan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Kedua, Meningkatkan intelektualitas, emosionalitas dan spiritualitas lulusan. Ketiga, Menjalankan manajemen berbasis syari'at Islam.¹²² Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui visi tersebut UIN Ar-Raniri Banda Aceh akan melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative berbasis syariat islam. Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.¹²³

Berdasarkan Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun Akademik 2017/2018, paradigma keilmuan UIN Ar-Raniry adalah “Frikatifisasi Ilmu”, yang secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis berkaitan dengan integrasi keilmuan. Secara normatif, model atau paradigma frikatifisasi tersebut dikembangkan dalam penentuan arah pengembangan keilmuan di UIN Ar-Raniry, yang mengemban perpaduan berbagai ragam keilmuan, baik ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu kealaman, dan ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan. Hanya saja proses integrase atau frikatifikasi ilmu itu masih terus mencari bentuk. Frikatifikasi ilmu lebih banyak ditampilkan melalui masuk rumpun ilmu-ilmu science dan teknologi.

¹²² Rusydi Ali, dkk., *Panduan Akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniri Tahun Akademik 2017-2018* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniri Banda Aceh 2017), h. 13-14

¹²³ Rumusan lengkap visi misi UIN Ar-Raniri ini dapat dilihat dalam <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/pages/visi-misi>.

Atmosfir Akademik dan Wacana Multikulturalisme di UIN Ar-Raniri Aceh

Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa perkembangan wacana keilmuan di Aceh ditentukan oleh lingkungan strategis di UIN Ar-Raniri berada. Lingkungan Islam yang kental dengan kebutuhan pelaksanaan syariat Islam pada beberapa aspek sosial kemasyarakatan mewarnai wacana keisalaman di UIN Ar-Raniri dalam beberapa tahun terakhir.

Bila disimak berbagai hasil diskusi, penelitian, pengkajian yang dilakukan di UIN Ar-Raniri secara umum selalu memiliki relevansi dengan pelembagaan syariat Islam di Banda Aceh, respons dan resistensinya dalam masyarakat. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, salah seorang intelektual terkemuka di UIN Ar-Raniri saat ini menulis beberapa kajian tentang Islam Aceh yang ia beri judul “Acehnologi.” Acehnologi berisi bagaimana intelektual Islam di UIN Ar-Raniri beruha membangkitkan Islam dan Keacehan sebagai sesuatu yang inherent bagi identitas keacehan. Fondasi kajian Islam di Aceh adalah, pertama, hubungan manusia Aceh dengan Tuhannya atau bagaimana orientasi keacehan selalu berkaitan dengan orientasi ketuhanan. Bahwa menjadi pribadi Aceh adalah menjadi pribadi yang bertuhan. Maka tidak ada cerita orang Aceh menjadi atheis atau menjadi orang yang mengabaikan Tuhan (*Han geu meukafee ureung Aceh nyan - Ralfy*). Kedua, menggali falsafah Insan Kamil sebagai manifestasi Manusia Aceh sebagai khalifah (alam saghir) di bumi Aceh. Ketiga, Epistimologi ‘Irfani, yaitu suatu kajian yang menyoal bagaimana orang Aceh di jaman dulu memperoleh ilmu dan hikmah dalam bentuk hadih majah dan nasehat-nasehat sufistik. Kajian-kajian ini kemudian akan menjadi landasan etis dan metafisika, bagaimana orang Aceh membangun identitas dan kebanggaannya? Bagaimana orang Aceh melihat dirinya? Bagaimana orang Aceh membangun dunianya? Dan, keempat,

narasi Hamzah ke Hegel yang membawa pesan sederhana, bahwa bagaimanapun perkawinan keilmuan antara Timur dan Barat adalah sebuah keniscayaan.¹²⁴

Atmosfir keilmuan di UIN Ar-Raniri secara umum memperlihatkan upaya para intelektual disana untuk mengkonstruksi kembali identitas keacehan yang pernah gemilang dimasa lalu. Kebudayaan Aceh dan Islam dianggap sebagai kekayaan yang hendak dibangun kembali untuk menjemput kejayaan masa depan. Itulah mengapa kajian keilmuan di UIN Ar-Raniri umumnya berpusat pada sejarah Islam Aceh, Identitas sebagai orang Aceh, Pemberlakuan syariat Islam dan kehadiran orang Aceh sebagai sebuah entitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Selama peneliti melakukan studi di UIN Ar-Raniri, kurang ditemui kajain-kajian tentang multikulturalisme. Buku-buku *masterpiece* karya para dosen UIN Ar-Raniri seperti *Acehnologi*, *Geografi Islam*, *Rekonstruksi Pemikiran*, *Adat Berdaulat*, dan yang lainnya belum menggambarkan secara utuh tentang gagasan multikulturalisme di Aceh. Meskipun begitu ada beberapa tulisan yang membahas dan menyinggung tentang Aceh dalam konteks multikulturalisme, terutama tentang pendidikan multicultural. Mumtazul Fikri salah seorang dosen yang pernah menulis tentang pendidikan multicultural menyebutkan bahwa kondisi Aceh dengan pengaruh Islam yang kuat menciptakan semacam hegemoni keagamaan. Sehingga kurang dijumpai kajian-kajian tentang dialog antar agama (*interfaith dialog*), toleransi antar agama dan isu-isu hubungan antar agama belum dianggap sebagai tema mendesak untuk dibicarakan, atau menjadi kajian akademik yanghg dikembangkan dalam wacana akademik di UIN Ar-

¹²⁴ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012)

Raniri.¹²⁵ Itulah mengapa kita kurang menemukan hasil penelitian tentang multikulturalisme, atau yang menyinggung tentang pengembangan Aceh dalam konteks masyarakat multicultural.

Namun demikian beberapa peristiwa penting tentang toleransi, hubungan mayoritas dan minoritas di tengah pemberlakuan syariat Islam telah menjadi bahan perbincangan di kalangan para dosen. Terutama ketika Setara Institute merilis data survey pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Banda Aceh termasuk tiga kota paling “intoleran” di Indonesia. Pernyataan ini berdasarkan survei mengenai Indeks Kota Toleran 2018 yang dilakukan oleh Setara Institute terhadap 94 kota di Indonesia, dimana Banda Aceh menduduki peringkat kedua terendah dengan urutan ke 93. Temuan tersebut menimbulkan protes yang meluas, terutama dari kelompok ulama yang sebagian termasuk para dosen dari UIN Ar-Raniri. Yusran, seorang ulama Aceh yang juga Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang juga Pengurus Dewan Dakwah Aceh dan Anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara, menyatakan menolak temuan Setara Institute tersebut.

“Survei ini tidak didukung oleh data yang valid dan fakta yang ada. Ini jelas pembohongan publik. Ini sama saja menuduh syariat Islam yang selama ini diberlakukan di Aceh telah menciptakan kehidupan intoleran di Aceh, khususnya di Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh. Tentu saja survei ini telah melukai hati umat Islam di Aceh, khususnya di Banda Aceh.”¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Mumtazul Fikri, Dosen fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Juli 2019.

¹²⁶ Lihat berita Cendekiawan: Aceh termasuk Daerah Paling Toleran Sejak Dulu, dalam link beritas

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/14/156510/miumi-aceh-termasuk-daerah-paling-toleran-sejak-dulu.html>

Pernyataan Yusran juga diaminikan oleh Dr. Sabirin dari Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniri bahwa kehidupan beragama di Banda Aceh sangat kondusif dan harmonis. Tidak ada konflik atau keributan yang bermotif agama antar pemeluk agama dari dulu sampai hari ini. Meski pernah ada satu peristiwa penyerangan gereja di Aceh Singkil tetapi diakui sebagai konflik yang bersifat politis. Bagi sebagian dosen yang diwawancarai selama ini, kehidupan keagamaan di Aceh selama berabad-abad berlangsung kondusif, sebab itu pernyataan bahwa Banda Aceh adalah kota yang intoleran adalah ssesatu yang berlebihan dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Namun demikian temuan Setara Institute mulai mendorong beberapa dosen di UIN Ar-Raniri untuk membincangkan apakah pemberlakuan syariat Islam telah menimbulkan resistensi tertentu terhadap kalangan minoritas. Sebagaimana tercermin dalam tulisan Mumtazul Fikri dalam tulisanya tentang “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan.”¹²⁷ Mumtazul yang mulai menekuni isu-isu multikulturalisme dan melakukan penelitian tentang kelompok minoritas di Aceh juga mempublikasi tulisan yang lain yang berjudul “Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh.”¹²⁸ Dalam tulisan-tulisannya Mumtazul Fikri mendorong tentang perlunya persuasi dalam menjalankan syariat Islam dan memperhatikan hak-hak minoritas

¹²⁷ lihat tulisan Mumtazul Fikri, “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan,” dalam *Journal*

¹²⁸ Mumtazul Fikri, “Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh”, *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014)

dalam konteks pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Mumtazul Fikri menulis:

“..... kritik tajam terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, bahwa kebijakan pemerintah mestilah menjamin keberagaman identitas masyarakat, dan regulasi hukum mesti mampu memayungi dan mengayomi seluruh unsur masyarakat. Dan kebijakan dengan interpretasi sepihak justru akan menjauhkan pencapaian kebijakan tersebut. Maka bila muncul pertanyaan, mengapa syariat Islam di Aceh belum menemukan momentum tepat dalam merubah karakter masyarakat Aceh untuk menerima Islam sebagai jalan hidupnya? Maka menurut hemat penulis, kesalahannya bukan terletak pada Islam dan konsep syariat yang dikandungnya. Akan tetapi pada pendekatan dalam penerapan syariat Islam yang belum mampu menyentuh hati masyarakat Aceh. Maka dalam konteks ini, Aceh membutuhkan konsepsi Islam persuasif yang mampu mendidik umat dengan hati (*learning by heart*) dan ramah terhadap keragaman kultur masyarakat.”¹²⁹

Resistensi terhadap pelembagaan hukum Syariat di Aceh mulai menjadi tema yang dibicarakan beberapa dosen keagamaan. Beberapa dosen mulai memandang perlu penggalian konsep-konsep multikulturalisme dalam Islam sebagai bagian dari upaya mengelola masyarakat Muslim di era modern ini. Islam sendiri adalah agama yang menebarkan perdamaian, keselamatan dan kesejahteraan untuk semua. Ini selaras dengan pengertian Islam secara bahasa yang bermakna “tunduk dan patuh”. Ini bermakna

¹²⁹ lihat tulisan Mumtazul Fikri, “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan,” dalam *Journal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015.

bahwa kedatangan Islam adalah untuk membawa keselamatan bagi semua, baik muslim maupun non muslim, laki-laki atau perempuan, mayoritas atau minoritas, bahkan binatang sekalipun berhak menikmati kedamaian Islam. termasuk di negeri Syariat seperti di Aceh.

Bagi akademisi UIN Ar-Raniri seperti Mumatazul Fikri, perlu ada kajian yang lebih intensif tentang Islam dan multikulturalisme untuk mendudukkan kembali syariat Islam di Aceh dalam kehidupan masyarakat Aceh yang semakin modern ini. Jika tidak syariat Islam akan menjadi suatu instrumen politik hokum semata, dan tidak memberi dampak yang lebih nyata terhadap peradaban Islam. Hal ini juga telah mendapat perhatian banyak pihak bahwa pengembangan syariat Islam perlu memperhatikan eksistensi hak asasi manusia yang telah menjadi nilai-nilai universal.

BAB IV

REPRODUKSI MULTIKULTURALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM INDONESIA

Perkembangan wacana tentang multikulturalisme dan bagaimana proses pelebagaan multikulturalisme di tiga perguruan tinggi Islam yang diangkat dalam studi ini memperlihatkan beberapa fakta tentang bagaimana isu-isu tentang kewargaan telah dipahami, didiskusikan dan dikembangkan dalam konteks yang berbeda-beda. Dinamika internal perguruan tinggi Islam, konteks sosial kemasyarakatan dan kepentingan-kepentingan lainnya mewarnai diskursus yang terjadi. Bagian ini akan mendiskusikan dinamika tersebut dengan memanfaatkan kerangka teori reproduksi Pierre Bourdieu (2010) dan dalam konteks tertentu juga Anthony Giddens (1996) tentang agensi untuk mengungkap aktor, narasi, dan kepentingan yang terkait dengan diskursus multikulturalisme di perguruan tinggi Islam. Dengan kata lain, bagian ini akan menunjukkan bagaimana Multikulturalisme dipahami oleh aktor-aktor di perguruan tinggi, dikampanyekan atau disosialisasikan sebagai narasi akademik dan selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

A. Narasi Multikulturalisme di Perguruan Tinggi Islam

Narasi multikulturalisme di perguruan tinggi Islam adalah sebuah gagasan baru yang tumbuh bersamaan dengan kesadaran akan pluralitas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kesadaran ini menuntut refleksi akademik yang beragam dari komunitas perguruan tinggi Islam. Ada yang menyebut multikulturalisme sebagai gagasan Barat yang perlu diadaptasi secara hati-hati dan dalam karena belum tentu relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ada juga yang menganggap multikulturalisme sebagai konsep yang relevan dengan ajaran

Islam, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dan ada juga yang melihat multikulturalisme adalah kebutuhan konseptual untuk mengelola keragaman di Indonesia.

Multikulturalisme sebagai Gagasan Barat

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.¹³⁰ Dalam sejumlah referensi disebut bahwa sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, dan Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori awal multikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.¹³¹

Multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya

¹³⁰ M. Atho Mudzhar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. 2005), h. 174.

¹³¹ Lihat Wil Kymlica Kewargaan Multikultural. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011),

memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.¹³² Dalam perkembangannya kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori *salad bowl* atau teori *gado-gado* tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar White Anglo Saxon Protestant (WASP) diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.¹³³

Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori Cultural Pluralism, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa. Bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian

¹³² Jose Antonio Arosco, *Toppling The Melting Pot, Immigration and Multiculturalism in American Pragmatism*, (Bloomington: Indiana University Press, 2006), h. 17

¹³³ Otis L. Graham JR, *A History of America's Immigration Crisis (USA)*: Rowman and Littlefield Publishers, 2006), 117

masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan multiculturalism, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit.¹³⁴

Perkembangan sejarah multikulturalisme yang sarat dengan pengalaman traumatik Barat, sebagaimana digambarkan di atas, memberi kesan bagi sebagian kalangan konservatif bahwa multikulturalisme adalah produk pemikiran Barat yang harus ditangani dengan hati-hati. Terutama dalam masyarakat Islam yang telah meleburkan semua aspek perbedaan dalam persaudaraan keislaman.¹³⁵ Multikulturalisme dianggap sebagai ideology barat yang dapat menceraiberaikan persatuan umat di atas keragaman primordial yang berbahaya. Pandangan seperti ini membuat banyak perguruan tinggi Islam cukup berhati-hati dalam menjadikan multikulturalisme sebagai gagasan solutif dalam pengembangan masyarakat Islam. Sebagaimana diakui oleh Mumtazul Fikri, salah satu pengkaji multikulturalisme di UIN Ar-Raniri Banda Aceh, bahwa tersendatnya diuskursus tentang multikulturalisme karena gagasan tersebut dianggap masih produk Barat dan perlu diadaptasi dengan hati-hati. Apalagi di Aceh yang masyarakatnya cukup homogeny, gagasan multikulturalisme justru bagi sebagian

¹³⁴ M. Atho Mudzhar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. 2005), h. 180-183.

¹³⁵ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme di Indonesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 79-81.

orang akan melemhkan kohesifitas masyarakat yang telah dibangun dalam konstruksi syariat Islam.¹³⁶

Apalagi di tahun 2005 bersamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya sekularisme, pluralisme, liberalisme yang dianggap dapat menyesatkan umat Islam di Indonesia.¹³⁷ Dalam pertimbangan fatwanya MUI menjelaskan tiga pertimbangan, pertama, bahwa akhir-akhir ini menurut MUI telah berkembang paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat. Kedua, bahwa berkembangnya sekularisme, pluralisme dan liberalisme di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut. Ketiga, bahwa karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme untuk dijadikan pedoman umat Islam.¹³⁸

Dampak dari fatwa tersebut mengakibatkan orang yang menerima ketiga paham diatas atau yang sejenis dengan paham tersebut sebagai sekuler dan liberal. Multikulturalisme yang dianggap sebagai prodak Barat dan menjadi bagian dari pluralisme adalah semacam pemikiran yang mencaukan pemahaman keagamaan umat Islam. Penjelasan Mumtazul Fikri dari UIN Ar-Raniri Banda Aceh yang telah dikutip di atas. Bahkan bila kita membaca kajian Adian Husaini, maka terlihat jelas bahwa penjelasan MUI perlu diperkuat umat Islam agar terhindar dari

¹³⁶ Wawancara dengan Mumtazul Fikri di Banda Aceh, Juli 2019

¹³⁷ Fatwa tersebut diumumkan pada hari Kamis, 28 Juli 2005. Ada 11 fatwa dan pada fatwa nomor 7 berisikan bahwa MUI mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Fatwa ini telah menimbulkan pro dan kontra.

¹³⁸ Budi Munawar Rahman, *Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme, Islam Prigresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 4-9

berbagai dampak pemikiran yang ekspansi dari Barat dan secara diam-diam menghancurkan pemahaman keagamaan umat Islam.¹³⁹ Fatwa tersebut diakui sangat mengganggu pilar-pilar pemahaman kerukunan beragama di Indonesia, sebab bukan kebetulan ketiga isu tersebut sangat berkaitan dan diperlukan sebagai pondasi untuk kebebasan beragama.

Namun demikian fatwa MUI juga memiliki dampak lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Pelarangan sekularisme, pluralisme dan liberalisme oleh MUI ternyata semakin menarik perhatian banyak pihak yang ingin mengetahui tentang gagasan-gagasan serupa. Budi Munawar Rahman yang meneliti tentang hal tersebut mengungkapkan bahwa ada upaya dari gerakan Islam progresif di perguruan tinggi Islam yang mulai mengkaji isu-isu tersebut (termasuk multikulturalisme) sebagai konsep yang relevan dengan Islam dan konteks ke-Indonesiaan.¹⁴⁰ Sampai tahun 2010 keatas, narasi-narasi tentang pluralisme dan sejenisnya yang tadinya telah dikonstruksi sebagai gagasan Barat yang bias Islam semakin banyak didiskusikan dan diseminarkan di berbagai perguruan tinggi Islam. Banyak intelektual Islam, seperti Azyumardi Azra dari UIN Jakarta, Nursyam dari UIN Sunan Ampel Surabaya, atau dari kampus di pelosok negeri seperti IAIN Ambon yang mulai mengkaji pluralisme dan multikulturalisme sebagai bagian dari wacana akademik yang diharapkan bisa disumbangkan sebagai fondasi pengelolaan keragaman agama dan budaya di Indonesia.

¹³⁹ Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005)

¹⁴⁰ Budi Munawar Rahman, *Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 10-11

Multikulturalisme Relevan dengan Islam

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman paham-paham Barat, seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang dianggap menghancurkan pemahaman keagamaan umat Islam Indonesia, maka bersamaan dengan itu pula mulai muncul berbagai kajian tentang tema-tema tersebut. Termasuk didalamnya tema-tema tentang multikulturalisme yang dianggap sebagai gagasan konseptual yang memiliki relevansi dengan ajaran-ajaran Islam yang transendental.

Bahkan kajian tentang Islam dan multikulturalisme, multikulturalisme dalam Islam, atau pendidikan multikulturalisme Islam menjadi semacam terending topik dalam penelitian-penelitian pada dosen di PTKIN. Mislanya kajian Azyumardi Azra dan para intelektual dari UIN Sahid Jakarta yang secara umum menyebutkan bahwa multikulturalisme senafas dengan historitas agama Islam, sebagaimana dipraktikkan dengan sangat indah oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam periodisasi Madinah. Bahkan pada saat itu muncul sebuah traktat fundamental yang kemudian disebut sebagai “Piagam Madina” yang mengatur keragama di negara kecil Madina. Dalam sebuah tulisannya Azra menulis

Secara historis, kehidupan multikultural bukanlah sesuatu yang baru bagi kaum Muslim. Sejak masa awal Islam dan lebih khusus lagi pada masa pasca al-Khulafa al-Rasyidun, pertumbuhan kaum Muslim yang begitu cepat di berbagai wilayah dunia sekaligus merupakan pertemuan yang melibatkan akomodasi dan konflik dengan realitas lokal yang berkat kehadiran Islam dan kaum Muslim juga kian multikultural. Realitas ini terlihat kian jelas ketika kekuasaan politik yang melintasi berbagai wilayah budaya berada di tangan kaum Muslimin sejak Dinasti Umayyah,

Abbasiyah di Baghdad dan Andalusia, Usmani, Moghul, dan seterusnya sampai ke Asia Tenggara.¹⁴¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh intelektual PTKIN lainnya, seperti Nur Syam dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam tulisannya *Tantangan Multikultuarlisme di Indoesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Nur Syam menyebutkan bahwa Islam memandang keragaman sebagai sebuah keniscayaan (*sunnatullah*) yang berlaku pada setiap hal yang terkait dengan dunia dan seisinya. Maka perbedaan, keragaman, heterogenitas, dan apapun juga nama dan bentuknya merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin dihindari. Upaya pemaksaan penyeragaman bertentangan dengan karakter dasar Islam sebagaimana telah digariskan oleh Allah dalam Surat Yunus 10:99, “*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya?*” Asbabul wurud ayat ini menurut Nur Syam, ditujukan untuk kepada Nabi Muhammad atas kegalauan hati dan proses terselubung pengingkaran umat atas kebenaran risalah yang dibawahnya.¹⁴² Bahkan di ayat yang lain disebutkan “

“Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal - mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di

¹⁴¹ Azyumardi Azra, Muslim dan Masyarakat Multikultural, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/muslim-dan-masyarakat-multikultural/>, diakses 2 Oktober 2019

¹⁴²Nur Syam, *Tantangan Multikultuarlisme di Indoesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 70

antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

Dengan demikian dasar normative dari teks Al-Qur'an adalah menuntut pengakuan bahwa perbedaan bahwa perbedaan dan ketidakseragaman memang terlahir dan berkembang membesarkan diri dalam bentuknya yang berbeda-beda dalam naungan lindungan Allah SWT. Penolakan terhadap perbedaan, apalagi dalam kategori ekstrim, adalah mengingkari kodrat jalannya garis edar *sunnatullah* yang telah ditentukan tiap atom geraknya oleh Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam dasar teks yang lain perbedaan bukan saja dijelaskan sebagai sebuah keniscayaan kehidupan di alam semesta, namun perbedaan dilihat sebagai kutub positif yang apabila dipahami secara bijak akan membawa manusia –bukan hanya umat Islam- pada tatanan kehidupan yang penuh limpahan rahmat Allah sebagai buah kebijaksanaan dalam memaknakan perbedaan.¹⁴³

Kajian-kajian tentang multikulturalisme dalam Islam menghantar banyak akademisi di PTKIN sampai pada kesimpulan bahwa wacana multikultural bukanlah wacana baru dalam Islam, dimana Islam sendiri dibangun atas perbedaan dan keanekaragaman. Hal ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Mumatzul Fikri, akademisi dan pengkaji multikulturalisme dari UIN Ar-Raniri banda Aceh bahwa secara historis Nabi Muhammad saw sendiri dilahirkan di lingkungan masyarakat Arab dengan keragaman suku dan bangsa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab sangat fanatik terhadap identitas kesukuan dan bahkan mengerdikan orang lain di luar suku mereka. Dalam lingkungan demikianlah Rasulullah saw diutus demi menghapus perbedaan dan mengakui keberagaman suku bangsa. Perbedaan kelamin,

¹⁴³ Nur Syam, *Tantangan Multikultuarlisme di Indoesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, h. 72

suku, bangsa dan bahasa sesungguhnya merupakan *sunnatullah* yang tidak patut dipertentangkan dan perbedaan identitas sesungguhnya merupakan keniscayaan.¹⁴⁴

Dalam *sirah nabawiyah* kita ketahui bahwa perkembangan sejarah Islam pada masa Rasulullah saw dibagi kepada 2 (dua) periode; periode Makkah dan periode Madinah. Islam awalnya dibangun dengan susah payah oleh Rasulullah saw dan para sahabat di negeri Makkah, dan kemudian mulai menyebar ke daerah sekitar diantaranya kota Madinah yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam di masa Rasulullah saw dan *Khulafaurrasyidin*. Saat hijrah pertama ke Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan dan mempersatukan antara *muhajirin* dan *anshar*. Madinah adalah kota pluralis dimana keberagaman identitas masyarakat lebih kentara dibanding Makkah. Dari keberagaman identitas bangsa (arab, persi), etnis (suku), bahasa, hingga agama (Islam, Yahudi, Paganisme, Nasrani).⁷ Karenanya, di awal masa hijrah di Madinah Rasulullah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi, diantara isi perjanjian tersebut adalah bahwa kaum Yahudi dan kaum Muslimin bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, dan keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati hidup di kota Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang terdiri dari 10 bab dan 47 pasal.¹⁴⁵ Inti Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama,

¹⁴⁴ Mumtazul Fikri, "Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan," dalam *Journal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015.

¹⁴⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 23.

perdamaian, tolong-menolong dan pembelaan kaum teraniaya.¹⁴⁶ Piagam Madinah dalam sejarah dikenal sebagai titik berdirinya negara Islam Madinah dan tonggak berdirinya kejayaan politik Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara Islam maka multikulturalisme masyarakat harus menjadi prioritas utama. Inklusifisme masyarakat harus dipupuk kuat agar tumbuh toleransi sesama, karena eksklusifisme hanya akan melahirkan perpecahan dan kelemahan.¹⁴⁷

Kajian terhadap wacana multikulturalisme di perguruan tinggi keagamaan Islam, menemukan bahwa Allah menciptakan keragaman untuk tujuan atau hikmah tertentu. *Pertama*, sebagai simbol atau tanda kebesaran Tuhan “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembangbiak” (Q.S. ar-Rum [30]: 20). *Kedua*, sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama ummat manusia “Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal - mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). *Ketiga*, sebagai ujian dan sarana manusia dalam berlomba menuju kebaikan dan prestasi “...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu uma (saja), tetapi Allah hendak

¹⁴⁶ Ahmad Khairuddin, “Konstitusi Madinah: Latar Belakang dan Dampak Sosialnya” dalam Jurnal Al-Banjari Vol 5, No. 9/ Januari–Juni 2007, h. 2-6.

¹⁴⁷ Mumtazul Fikri, “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan,” dalam *Journal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015.

menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Q.S. al-Maidah [5]: 48). *Keempat*, sebagai motivasi beriman dan beramal sholeh “Dan (ingatlah), ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman: “pukullah batu itu dengan tongkatmu” Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Q.S. al-Baqarah [2]: 60).

Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks tersebut, perbincangan Islam multikultural di PTKIN menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal bukan jamak atau multikultural. Dalam tulisannya yang berjudul Islam dan Multikulturalisme, Samsul Rizal Panggabean memberikan gambaran mengenai pandangan Islam tentang Multikulturalisme. Rizal membahas multikulturalisme dalam dua arah pembicaraan, yaitu: multikulturalisme dari komunitas Muslim (Multikulturalisme Internal) dan komunitas agama-agama lain (Multikulturalisme Eksternal).¹⁴⁸

Pertama, multikulturalisme Internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat Islam, ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal ini, kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya kecuali kebudayaan yang paling primitif. Kemajemukan

¹⁴⁸ Mujiburrahman, “Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, dan Keanekaragaman dalam Islam,” dalam *Jurnal Addin* Vol. 7 No. 1 Februari 2013

internal ini mencakup antara lain: bidang pengelompokan sosial; bidang fiqh; bidang teologi, bidang tasawuf dan dimasa modern seperti politik kepartaian. *Kedua*, Multikulturalisme Eksternal ditandai dengan pluralitas komunal-keagamaan, merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Muslim. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus berinteraksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan lain, dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan Islam.

Multikulturalisme sebagai Gagasan yang dibutuhkan di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar yang telah ditakdirkan sebagai negara-bangsa yang majemuk (*pluralistic society*), baik dari segi agama, etnis dan budaya. Kemajemukan atau keanekaragaman itu secara historis bisa dilacak jauh ke masa lalu. Beberapa data menyebutkan bahwa, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 350 bahasa, 1331 suku bangsa dengan identitas masing-masing, ada 6 agama resmi yang diakui negara serta berbagai kepercayaan lokal yang masih hidup dalam sistem sosial masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.¹⁴⁹ (LIPI, 2009, BPS, 2015). Indonesia menempati suatu wilayah geografis yang sangat luas, terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil yang membentang di antara dua benua yakni Australia dan Asia dan dua samudra raksasa yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Maka tidak mengherankan jika sejak dahulu Indonesia menjadi wilayah

¹⁴⁹ Lihat data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2009, dan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2015

perjumpaan berbagai ras, agama, ideologi politik, hingga beragam kepentingan lainnya.

Para ahli arkeologi berpendapat bahwa populasi manusia awal yang mendiami wilayah-wilayah kepulauan di sepanjang nusantara, dari Aceh di Barat Sumatera hingga Merauke di Papua, berasal dari dua ras besar yang pernah bermigrasi ke kepulauan nusantara sejak 2000 SM. Pengertian ras disini adalah suatu kelompok manusia yang dapat dibedakan dengan kelompok lainnya karena adanya beberapa karakteristik fisik biologis, seperti warna kulit, bentuk muka (mata, hidung, bibir dan dagu), warna dan bentuk rambut.¹⁵⁰

Ras yang pertama adalah ras mongoloid yang berasal dari rumpun Asia Timur, Asia Utara dan Asia Tenggara, mereka melahirkan *proto melayu* (melayu tua) yang mendiami Indonesia bagian Barat, dari Sumatera hingga sebagian Sulawesi.¹⁵¹ Sedangkan ras yang kedua yang melahirkan manusia Indonesia adalah ras yang berasal dari leluhur Austroloid yang melahirkan *Negroid Melanesia* yang menjadi penduduk Papua saat ini. Ras *Australoid* berasal dari benua Australia yang menyebar ke Indonesia bagian Timur. Sedangkan untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur dan sebagian Sulawesi adalah wilayah *Zone Wallace* yang menjadi daerah penyangga yang saling berhimpit dalam menerima migrasi kedua ras besar tersebut. Berdasarkan fakta-fakta arkeologis ini, maka dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia telah beranekaragam sejak zaman dahulu kala.

¹⁵⁰ Steve Olson, "Mapping Human History: Discovering Our Past Trough Our Genes, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, *Mapping Human History Gen, Ras, dan Asal Usul Manusia*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 187-190

¹⁵¹ Lihat Yusliani Nur dan Mansyur, *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia* (Banjarmasin: Banjarmasin Press, 2015), h. 110-114

Fakta tentang keanekaragaman etnis, agama dan budaya di Indonesia, tampaknya sangat disadari oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu tokoh-tokoh utama yang terlibat langsung dalam proses kemerdekaan yang dipelopori Sukarno dan Hatta. Sejak semula mereka menghindari menggunakan terminologi-terminologi kebangsaan yang merujuk pada suatu semangat etnisitas, budaya atau agama tertentu untuk menggambarkan identitas masyarakat di nusantara. Para pendiri bangsa justru memilih istilah “Indonesia” sebagai nama negara baru yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah istilah yang sangat baru ketika itu, dan belum banyak orang yang paham akan maknanya, tetapi memberikan semangat perjuangan yang sangat luar biasa.

Maka pada tahun 1928, rakyat yang diwakili para pemuda dari berbagai daerah, seperti Jong Sumatera, Jong Java, Jong Selebes, Jong Ambon dan lainnya melakukan perlawanan bersama terhadap kolonialisme dan menyampaikan Sumpah pemuda yang sangat historis; *Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia, Berbangsa Satu Bangsa Indonesia, dan Berbahasa Satu Bahasa Indonesia*. Para tokoh perjuangan menyadari bawa perlawanan secara sendiri-sendiri berdasarkan pendekatan etnis atau agama tidak akan bisa memenangkan peperangan dengan kolonial Belanda. Bahkan dalam proses-proses perjuangan kemerdekaan, terlihat bahwa para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang berupaya keras, menemukan sebuah nilai bersama yang mengikat bangsa dan negara Indonesia yang hendak dibentuk. Maka dicarilah Idiologi pemersatu yang menjadi payung bagi kehidupan bersama yakni Pancasila.

Dalam kajian Nurkholis Madjid (2004), Pancasila merupakan *kalimatun sawa* karena menjadi titik temu berbagai

pandangan yang berbeda-beda.¹⁵² Melalui Pancasila rakyat yang beranekaragam membuat kontrak sosial untuk hidup bersama dengan prinsip-prinsip yang diakui bersama. Yudi Latif (2013) yang melakukan studi yang intens tentang Pancasila mengemukakan pandangan bahwa Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang menjadi dasar, haluan dan karakter ke-Indonesiaan. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil penggalian dari kekayaan kerohanian (agama), kebudayaan, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam lumpur sejarah.¹⁵³

Berdasarkan fakta sejarah dan fakta antropologis serta sosiologis Indonesia yang multikutir tersebut, maka banyak intelektual Islam di PTKIN yang kemudian melihat perlunya kajian-kajian Islam tentang keragaman. Para ahli seperti Azyumardi Azra, Nur Syam, Mashuri dan beberapa lainnya kemudian menawarkan gagasan Multikulturalisme dalam memperkuat ideologi politik nasional Pancasila untuk menaungi berbagai bentuk keragaman di Indonesia. Meskipun konseptual multikulturalisme dilihat sebagai sebagai wacana baru, terutama di Indonesia, khususnya jika dibandingkan isu pluralisme yang berbagai teoretisasinya telah berkembang relatif mapan. Namun wacana pluralisme mengalami titik balik ketika Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa *Nomor : 7/Munas VII/MUI/11/2005* melarang tiga paham ideologis yang dianggap membahayakan keimanan seorang Muslim, yakni pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Kondisi ini memperkuat gagasan multikulturalisme dalam kajian-kajian keislaman secara nasional. Hal ini semakin mengemuka setelah berbagai konflik sektarian yang melanda

¹⁵² Nurkholis Madjid, *Indonesia Kita*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004)

¹⁵³ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia; Pustaka Utama, 2011), h. 3

Indonesia pasca reformasi 1998. Para penganjurnya memandang multikulturalisme penting untuk terus didesakkan ke kesadaran publik, mengingat Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya sangat multikultural, terutama dari sisi etnis dan agama. Sebuah konfigurasi yang harus dijaga agar bisa menjadi potensi positif bagi pembangunan nasional, bukan sebaliknya menjadi potensi konflik dan pertikaian.¹⁵⁴

Oleh sebab itu, seluruh teoretisasi multikulturalisme bermuara di tujuan senada, yakni membawa masyarakat ke dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, kendatipun di dalamnya terdapat kompleksitas perbedaan latar budaya, disparitas sejarah, suku, ras, bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat yang multikultural sedemikian dipahami sebagai tidak homogen, tetapi berkarakteristik heterogen di mana relasi sosial dalam masyarakat berlangsung penuh toleran, tersemangati oleh kesediaan hidup berdampingan secara damai dan masing-masing individu saling menenggang bentuk-bentuk disparitas kultural di antara mereka.

Dengan spirit mencipta kerukunan, kedamaian, dan kohesivitas sosial suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, maka multikulturalisme dengan sendirinya juga merupakan suatu strategi memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat, di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menyikapi, misalnya, isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial yang dalam satu dekade terakhir tumbuh berbarengan dengan euforia kebebasan. Pengenaan multikulturalisme potensial berperan solutif mengingat gagasan multikulturalisme meniadakan asumsi tentang adanya kelompok dominant dan subordinate dalam setiap

¹⁵⁴ Zuly Qodir, "Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewarganegaraan". Dalam Wawan Gunawan (edit.) *Fiqh Kebenikaan* (Bandung: Mizan, 2015)

relasi sosial; setiap kelompok dan individu berpeluang sama dalam mengekspresikan diri dan saling bekerja sama serta mencipta kohesi sosial bersama-sama pula.¹⁵⁵ Setiap kelompok di masyarakat dituntut untuk saling menghormati; masing-masing bebas mengekspresikan pilihan-pilihan kulturalnya, termasuk agama, tanpa ketakutan dan rasa keterancaman.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, multikulturalisme diperlukan untuk membangun kesadaran beragama yang saling menghormati dan menghargai. Melalui multikulturalisme agama-agama diberi kesempatan hidup dan berkembang dengan keunikannya masing-masing. *Resiprositas* penghormatan tersebut dilakukan berlandaskan pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya lain tanpa menjadikan budayanya sendiri sebagai tolok ukur kebenaran tunggal-hegemonik bagi kebudayaan lain. Itulah mengapa multikulturalisme acap pula disebut sebagai suatu ideologi yang berupaya meneguhkan kesederajatan di tengah perbedaan.¹⁵⁶ Kemungkinan ke arah itu terbuka lantaran ruh fundamental yang melekat dalam multikulturalisme sendiri, yaitu kebersediaan menerima individu atau kelompok lain sebagai suatu “kesatuan” yang meng-atasi seluruh diversitas budaya, termasuk perbedaan agama dan pilihan orientasi keberagamaan.

Hal ini yang menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN Ambon yang mengembangkan multikulturalisme sebagai visi dan misi IAIN Ambon. Apalagi para

¹⁵⁵ Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) *Fiqh Kebinekaan* (Bandung: Mizan, 2015), h. 182

¹⁵⁶ Parsudi Suparlan, “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Makalah pada Sarasehan Nasional: Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.

akademisi di IAIN Ambon merasakan secara langsung, betapa berbahayanya jika keragaman tidak dapat dikelola dengan baik maka akan melahirkan konflik social yang sangat dahsyat di masyarakat. Sebagaimna yang terjadi pada konflik Maluku tahun 1999-2004. Itulah kajian multikulturalisme diperguruan tinggi Islam seperti di IAIN Ambon, dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian masyarakat tentang keragaman agama, etnik, bahasa, dan ras dalam sebuah negara majemuk seperti Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme menjadi sesuatu yang urgen untuk dikembangkan seperti kesatuan kemanusiaan (unity of humankind), kompetisi dalam kebaikan (competition in good work), memberi maaf kepada orang lain (forgiveness toward humankind), dialog atau ko-eksistensi dan pro-eksistensi, kehidupan bersama (living together), kesederajatan (equality atau egalitarianism), saling memahami (mutual understanding), saling menghargai (mutual respect), kejujuran (trust), berpikir positif (positive thingking), toleran (tolerance), rekonsiliasi (reconsiliation), resolusi konflik (conflick resolution), kedamaian (peace), menghindari kekerasan (non violence), dan kesejahteraan sosial (sosial justice).¹⁵⁷

B. Keterlibatan Aktor dan Kepentingannya dalam Kampanye Multikuralisme

Gagasan multikularisme yang berkembang yang berkembang di perguruan tinggi Islam sangat banyak ditentukan oleh pergulatan intelektual pimpinan perguruan tinggi Islam dan para dosen senir yang memiliki pengaruh luas di perguruan tinggi setempat. Pimpinan perguruan tinggi yang memiliki pemahaman yag luas terkait konsep-konsep keragaman, umumnya memiliki

¹⁵⁷ Abdin Wakano, dkk., Pengantar Multikultural (IAIN Ambon Press), h. 34

kecenderungan untuk mengarusutamakan tema multikulturalisme dalam dalam diskursus akademik di kampusnya.

Kita bisa menemukan bukti tersebut pada kasus IAIN Ambon dimana pimpinan institusi memberi dukungan pada pengarusutamaan gagasan multikulturalisme. Fenomena ini tidak berlangsung tiba-tiba sebab, sosok seperti Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbollah Toisuta memiliki reputasi intelektual yang cukup baik dan sejak lama menekuni terma-terma tentang keragaman, perdamaian, konflik dan kewargaan. Rektor IAIN Ambon Hasbollah Toisuta adalah seorang Doktor lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Islamic Study (Studi Islam). Tulisan-tulisannya banyak yang terkait dengan isu-isu konflik dan perdamaian di Maluku. Salah satu bukunya yang terkenal adalah “Robohnya Baeleo Kami” yang menceritakan tentang dampak konflik terhadap kearifan local dan persaudaraan di Maluku.¹⁵⁸ Rektor Hasbollah sendiri pernah menjadi salah satu eksponen di Perjanjian Malino tahun 2002, sebuah perjanjian antara tokoh Islam dan Kristen yang mengakhiri konflik agama yang terjadi di Maluku selama tahun 1999-2002.¹⁵⁹

Rektor Hasbollah didukung oleh sejumlah dosen seperti Mohdar Yanlua, Ismail DP, Abdullah Latuapo, serta dosen-dosen muda progresif di IAIN Ambon seperti Abidin Wakano, Abubakar Kabakoran, Abdul Manaf Tubaka, Saidin Ernas dan lain-lainnya yang banyak melakukan diskursus tentang keragaman dan pembangunan perdamaian di Maluku. Sama seperti Rector Hasbollah para dosen yang banyak menulis dan mengkaji tentang multikulturalisme berasal dari latar belakang pendidikan ilmu sosial dan Islamic studies yang memiliki tradisi kajian yang kuat

¹⁵⁸ Nur Syam, *Tantangan Multikultuarlisme di Indoesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*,

¹⁵⁹ Saidin Ernas, *Perjanjian Malino dan Penyelesaian Konflik Maluku*, Tesis Magister Deartemen Politik Universitas Indoensia, tahun 2006

tentang isu-isu keragaman. Sejak Hasbollah menjadi Rektor IAIN Ambon tahun 2013, banyak mengundang para ahli seperti Robert Hefner, Azyumardi Azra, Amin Abdullah, Fuad Jabali dan beberapa yang lainnya untuk membahas tentang gagasan multikulturalisme di IAIN Ambon.

Diskursus intelektual tersebut mendorong gagasan untuk menjadikan tema multikulturalisme dalam visi misi IAIN Ambon. Menurut Mohdar Yanlua (Wakil rector Bidang Akademik), penyusunan dan perumusan visi misi tersebut melibatkan banyak ahli dan stakeholders di Maluku. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan adalah perumusan tersebut. Pertama, berdasarkan kajian-kajian intensif yang dilakukan tentang multikulturalisme, dianggap sejalan dengan spirit dasar ajaran Islam tentang keragaman. Kedua, pengarusutamaan multikulturalisme adalah bentuk respon IAIN Ambon tentang pembangunan masyarakat multicultural pasca konflik Maluku. IAIN Ambon harus memberi kontribusi pada pembangunan harmoni dan perdamaian dengan mempromosikan nilai-nilai tentang penghormatan pada keragaman, kesetaraan, keadilan, HAM dan perlindungan atas berbagai kelompok sosial dalam masyarakat.

Hal yang sama juga bisa ditemukan pada perkembangan intelektualisme di IAIN Sahid Jakarta. Gagasan dan pemikiran Islam Mazhab Ciputat yang digali, dirumuskan dan dikembangkan berbagai tokoh intelektual yang ada di Ciputat, dapat disalurkan melalui berbagai saluran, karena didukung oleh para pemimpin universitas di UIN Sahid yang reformis dan progresif. Rektor UIN Sahid yang ke-6 (1973-1984) Harun Nasution, adalah seorang intelektual par excellence lulusan, beliau adalah seorang akademisi, intelektual, pemikir, filsuf dan tokoh muslim Indonesia. Latar belakang pendidikannya sangat komplet, sarjana dari Universitas Kairo Mesi, hingga P.hD dari Universitas McGill di Kanada telah memberi dasar-dasar pemikiran yang luar biasa

tentang rasionalisme. Harun Nasution bukan saja seorang pemikir Islam yang disegani yang pemikirannya telah membebaskan umat Islam Indonesia dari kejumudan berpikir dan menawarkan gagasan-gagasan rasional dalam memahami agama. Latar belakang pendidikannya Harun Nasution juga merupakan seorang rector yang melakukan perubahan mendasar pada system kurikulum dan merubah atmosfir akademik di IAIN Ciputat. Dalam kedudukan sebagai dosen, Harun Nasution dengan istiqamah memberikan kuliah pada mahasiswa seluruh strata. Harun Nasution memberikan wawasan Islam yang luas, rasional, toleran dan modern. Para mahasiswa yang pada umumnya memiliki latar belakang pemahaman Islam yang sempit dan sektarian diubah menjadi memiliki wawasan Islam yang luas dan moderat. Otoritas sebagai rector dimanfaatkan untuk melakukan perubahan structural, sedangkan sebagai seorang intelektual yang berpengaruh, Harun Nasution dan para koleganya melakukan berbagai perubahan kultur akademik secara bertahap.

Apalagi setelah era Harun Nasution ia berhasil mewariskan tampuk kepemimpinan kepada sejumlah intelektual generasi kedua yang sangat progresif. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, meskipun tidak sempat menjadi pimpinan utama di IAIN/UIN Sahid tetapi memiliki pengaruh yang kuat di kampus tersebut. Nurcholish banyak memasukkan gagasan-gagasan baru dalam system perkuliahan untuk mempromosikan pemikiran-pemikiran progresif tentang modernisasi Islam sebagai jawaban atas perkembangan. Termasuk dalam pengelolaan kewaragaan untuk memberi penghormatan pada perdebatan, kesetaraan serta keadilan yang menjadi terma-terma utama dari gagasan multikulturalisme.

Tampuk kepemimpinan progresif di UIN Sahid dilanjutkan oleh tokoh intelektual progresif lainnya seperti Azyumardi Azra (Rektor dua periode, 1998/2002-2002/2006) yang secara personal memberikan perhatian pada pengembangan gagasan Islam dan

multikulturalisme. Latar belakang pendidikan Azyumardi Azra dari kampus bergengsi Kolumbia University di Amerika Serikat telah memberi modal berharga dalam mengembangkan pemikiran keislaman dan sejarah social Islam di Indonesia. Di era Azyumardi Azra banyak didirikan Pusat-pusat studi yang merupakan ujung tombak deseminasi gagasan pada konteks external. Berbagai international dan national conference diselenggarakan untuk membahas isu multikulturalisme, perlindungan minoritas, konflik dan perdamaian. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rektor Komarudin Hidayat yang juga merupakan seorang pemikir Islam progresif di Indonesia yang banyak mengembangkan pemikiran filosofis dari Universitas Ankara Turki. Komarudin melanjutkan pemikiran Azyumardi Azra dalam berbagai kebijakan universitas, sedangkan Azyumardi sendiri tetap mendesiminasikan pengetahuannya dalam berbagai tulisan dan karya-karyanya. Saat ini UIN Sahid Jakarta tetap mempertahankan Islam MAzhah Ciputat-nya, melalui para pemikir generasi lebih muda seperti Jamhari, Fuad Jabali, Burhanudin Muhtadi, dan lainnya.

Mesipun UIN Sahid Jakarta tidak memasukkan isu multikulturalisme secara eksplisit dalam visi dan misi lembaga, namun seperti yang disampaikan Fuad Jabali, berbagai praktik akademik meniscayakan internalisasi dari multikulturalisme itu sendiri. Seperti penerimaan mahasiswa dalam jumlah yang cukup signifikan, pola pendidikan dan pengajaran yang egaliter, hingga penghormatan pada berbagai mazhab dan pemikiran yang berkembang di UIN Sahid.¹⁶⁰

Adapun pada kasus UIN Ar-RAniri Banda Aceh, bisa dilihat bahwa pengembangan studi tentang multikulturalisme dan deseminasinya masih belum berkembang dengan baik. Selain karena isu ini dianggap tidak begitu kontekstual dengan *socio-*

¹⁶⁰ Wawancara dengan Fuad Jabali (Dosen UIN Sahid Jakarta), Juli 2019

cultural masyarakat Aceh yang homogeny secara agama dan identitas etnis, juga karena para actor intelektual yang menjadi pemimpin di UIN Ar-Raniri bukanlah akademisi yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang studi Islam, Filsafat dan kajian-kajian politik Kewargaan. Sehingga berbagai kebijakan kampus tidak membuka ruang pada kajian-kajian yang bersinggungan dengan multikulturalisme dan deseminasinya pada public.

Hal ini bisa diamati pada minimnya kajian-kajian tentang multikulturalisme di UIN Ar-Raniri. Terutama dalam bentuk international conference, seminar nasional, hasil-hasil penelitian di lingkungan universitas, penelitian dosen, disertai, tesis dan skripsi. Beberapa dosen yang menekuni isu-isu tentang pluralisme, multikulturalisme dan politik kewaragaan juga masih terbatas. Mereka bukanlah actor-aktor kunci yang memiliki pengaruh di lingkungan UIN Ar-Raniri. Bahkan dalam kasus pembulian terhadap Dr. Rosnida Sari, yang dianggap telah menyesatkan mahasiswa UIN Ar-Raniri karena membawa mereka belajar di sebuah Gereja di Banda Aceh, tidak terlihat pembelaan terhadap dosen progresif tersebut. Menurut informasi dari sejumlah dosen di UIN Ar-Raniri, Rosnida yang banyak diintimidasi oleh masyarakat dan kaum ulama Aceh sampai harus mengurus pindahannya ke Jakarta karena kurang mendapat pembelaan dari pimpinan universitas dan pra koleganya sesama dosen.

Secara luas bisa dilihat bahwa actor-aktor yang terlibat dalam pelembagaan pendidikan diperguruan tinggi Islam seperti yang terjadi di IAIN Ambon dan UIN Sahid Jakarta, memiliki profil yang hamper sama. Mereka menekuni studi keilsaman, filsafat dan kajian-kajian ilmu social yang menjadi basis dari pemikiran multikulturalisme yang berkembang selama ini. Konteks habitus yang dibicarakan Piere Bourdeu sangat berperan di sini. Bourdeu menyebut *habitus* sebagai struktur berpikir atau kognitif yang dengannya actor-aktor mencerna suatu realitas. Actor

menggunakan *habitus* untuk berhubungan dengan realitas sosial karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial.¹⁶¹ Skema-skema tersebut berhubungan sedemikain rupa sehingga membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup kesehariannya bersama orang-orang lain.

Latar belakang pendidikan, karier, ruang pergaulan intelektual, karya-karya dan lain-lain membentuk sebuah *habitus* keilmuan yang menentukan bagaimana para actor di PTKIN mempromosikan atau memiliki pandangan tertentu. Pandangan-pandangan tersebut akhirnya menjadi atmosfir dan membentuk arus utama. Pemikiran tentang multikulturalisme atau tentang keragaman menjadi kesadaran yang didesimansi dalam berbagai bentuk kegiatan. Itulah mengapa Bourdieu melihat *habitus* sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan serta mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan akademik di IAIN Ambon dan UIN Jakarta. Sedangkan pada kasus UIN Ar-Raniri *habitus* tersebut kurang terbentuk sehingga tidak mampu membentuk atmosfir keilmuan yang berkembang di kampus tersebut.

C. Analisis Comparatif tentang Model Pelembagaan Gagasan Multikulturalisme

Analisis atas wacana multikulturalisme yang dikembangkan serta actor-aktor dan berbagai kepentingan kelembagaan yang berdiri dibalik promosi gagasa

¹⁶¹ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, "Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen" (Yogyakarta: Kreasi Wacana), h. 577

multikulturalisme, menunjukkan bahwa pilihan wacana dan konteks social kemasyarakatan sangat menentukan penerimaan atau penolakan atas gagasan multikulturalisme yang terus bereproduksi dalam ruang-ruang akademik di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa disebut sebagai model pelembagaan (*institusionalisasi*) gagasan multikulturalisme di Indonesia. Kajian dalam penelitian ini menunjukkan tiga model, sebut saja model IAIN Ambon, model UIN Sahid Jakarta dan model UIN Ar-Raniri Banda Aceh.

Model IAIN Ambon; Pernyataan Simbolik Multikulturalisme

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pemimpin kampus dan para dosen progresif adalah actor-aktor yang berdiri dibelakang mengemukanya diskursus tentang wacana multikulturalisme di IAIN Ambon. Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbolah Toisuta berperan sebagai tokoh kunci yang mendorong multikulturalisme sebagai gagasan konseptual yang paling mengemuka dalam visi IAIN Ambon selama satu decade ini terakhir. Multikulturalisme menjadi visi dan misi lembaga, mempengaruhi atmosfer akademik, dan pada tingkat tertentu hendak dipromosikan untuk mempengaruhi kebijakan local di Ambon dan Maluku.

Visi IAIN Ambon yang menyebut “Profesional dalam mengintegrasikan keIslaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi dalam bingkai multikultural pada tahun 2032,” merupakan sebuah pernyataan simbolik yang terus diperjuangkan dalam berbagai aspeknya. Menempatkan multikulturalisme sebagai visi semestinya diikuti dengan sikap inklusif bagi warga kampus secara keseluruhan. Meskipun hingga saat ini multikulturalisme belum diterjemahkan secara lebih luas dalam keseluruhan aktifitas intelektual di kampus IAIN Ambon, namun multikulturalisme bisa

disebut sebagai symbol keilmuan dan perilaku akademik. Di masa depan penerimaan mahasiswa lintas agama, penerimaan dosen lintas agama akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelembagaan multikulturalisme, sebagai bagian dari pengembangan visi misionis sebagai kampus multicultural di Indonesia.

IAIN Ambon perlu menunjukkan bahwa komitmen pada multikulturalisme bukan sekedar wacana akademik, masuk sebagai kurikulum dalam proses perkuliahan, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian penting dari kebijakan universitas dan mampu didesiminasikan kepada masyarakat luas. Model pengembangan multikulturalisme di IAIN Ambon harus bergeser dari model *multikulturalisme isolasionis* yang pernah disebut Biku Parekh disebut. Model ini menggambarkan adanya masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*), namun tetap mempertahankan budaya dominan dalam masyarakat.¹⁶² Bila Islam di Kampus IAIN Ambon adalah budaya dominan, maka pelembagaan multikulturalisme akan tersu dihambat oleh dominasi budaya dominan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari keengganan civitas akademika untuk lebih membuka diri pada perbedaan simbolik, seperti menerima dosen tetap dari agama lain yang berbeda, atau akomodatif pada eksistensi civitas akademika dari kelompok minoritas lainnya; etnis dan gender. Dimasa depan praktik multikulturalisme bisa bergerak lebih dalam sebagai praktik *Multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas.

Maka gagasan internalisasi gagasan multikulturalisme di IAIN Ambon perlu dirumuskan ulang baik dalam ketentuan normative kampus, atau ketentuan lainnya memberikan kebebasan

¹⁶² Biku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius. 2008)

kepada semua kelompok mempertahankan atau mengembangkan kebudayaan dan eksistensi mereka. Begitupun sebaliknya, kelompok-kelompok yang mungkin minoritas tidak ditinggalkan, namun diakomodasi. Dengan demikian nilai multikulturalisme yang berkembang bis mempromosikan eksistensi kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind*), kompetisi dalam kebaikan (*competition in good work*), memberi maaf kepada orang lain (*forgiveness toward humankind*), dialog atau ko-eksistensi dan pro-eksistensi, kehidupan bersama (*living together*), kesederajatan (*equality atau egalitarianism*), saling memahami (*mutual understanding*), saling menghargai (*mutual respect*), kejujuran (*trust*), berpikir positif (*positive thinking*), toleran (*tolerance*), rekonsiliasi (*reconsiliation*), resolusi konflik (*conflict resolution*), kedamaian (*peace*), menghindari kekerasan (*non violence*), dan kesejahteraan sosial (*sosial justice*).¹⁶³

Model UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Internalisasi Multikulturalisme

Reproduksi gagasan multikulturalisme di UIN Sahid Jakarta tidak diadaptasi secara simbolik, misalnya dalam pernyataan visi dan misi, sebagaimana yang dikembangkan di IAIN Ambon. Visi UIN Sahid sendiri adalah “menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.” Visi integrase keilmuan ini tampaknya dilakukan dengan terukur dalam berbagai bidang, akademik keilmuan dan kebijakan di universitas, hingga melahirkan apa yang disebut sebagai mazhab Islam Ciputa. Suatu mazhab keagamaan yang inklusif, liberal, dan lebih menghormati keragaman pandangan hingga eksistensi kultural lainnya.

¹⁶³ Abdin Wakano, dkk., Pengantar Multikultural (IAIN Ambon Press), h. 34

Dalam konteks pengembangan multikulturalisme di UIN syarif Hidayatullah Jakarta, para actor di kampus tersebut mampu menginternalisasi semangat dan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan akademik dan deseminasi kebijakan. Civitas Akademika UIN Jakarta mampu melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistimologi dan aksiologi sehingga tidak ada lagi dikhotomi anatar ilmu umum dan ilmu agama. Demikian juga mengartikulasikan ajaran Islam yang rahmatan lil Al-lamin. UIN Jakarta memiliki komunitas mahasiswa dan dosen yang sangat besar dari berbagai komunitas agama.

Multikulturalisme yang berkembang di UIN Jakarta pesris seperti yang digagas Azyumardi Azra, rector dan pemimpin utama UIN Sahid Jakarta selama hamper satu decade, yakni *Multikulturalisme kosmopolitanI*. Yaitu suatu pemahaman multikultruralisme yang berhasil diterjemahkan sebagai cara membangun komunitas plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan- percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.¹⁶⁴

Sebagai kampus Islam besar yang terletak di ibu kota negara Jakarta, UIN Sahid Jakarta mencoba menempatkan diri sebagai kampus Islam modern. Mereka mencoba mengembangkan gagasan inklusif yang mencerminkan pemhaman yang dalam tentang keragaman yang telah disebut sebagai *sunnatullah*. Maka di UIN Jakrta sering muncul berbagai gagasan kontroversial, seperti gagasan sekulasasi Islam ala Nurkholis Madjid. Meskipun UIN Jakarta tidak menyebut diri sebagai kampus multicultural, namun secara subtransi, kampus tersebut berusaha menginternilasi

¹⁶⁴ Azyumardi Azra, 2007

nilai-nilai multikulturalisme seperti penghormatan pada keragaman, inklusifitas, keseataran, toleransi, dan sikap-sikap moat lainnya. Apa yang ditampilkan di UIN Sahid Jakarta bisa disebut sebagai model multikulturalisme cosmopolitan.

Model UIN Ar-Raniri Banda Aceh; Hegemoni Syariat Islam

Adapun di UIN Ar-Raniri Banda Aceh, gagasan-gagasan multikulturalisme tampaknya tidak berkembang secara baik, baik dalam bentuk diskursus wacana maupun praktik-praktik kebijakan. Tulisan-tulisan tentang multikulturalisme, hasil penelitian maupun karya-karya buku di Kampus Islam yang terletak di negeri Syariat tersebut memperlihatkan bahwa multikulturalisme bukanlah isu yang *mainstream* dalam wacana akademik di kampus UIN Ar-Raniri Banda Aceh.

Gagasan tentang multikulturalisme sebenarnya diterima oleh komunitas akademik, namun para actor akademik di Ar-Raniri, seperi rector dan para dosen tidak menganggap multikulturalisme sebagai gagasan akademik yang perlu mendapat ruang diskursus di Aceh. Apalagi Provinsi Aceh dianggap sebagai negeri yang menerapkan syariat Islam sehingga terdapat homogenitas keagamaan. Islam adalah narasi dominan di Aceh dan oleh sebab itu, komunitas-komunitas minoritas mesti menghormati profil Aceh sebagai wilayah Muslim dominan dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Dalam sejumlah wawancara, para actor di kampus Ar-Raniri beberapa kali menyebut bahwa multikulturalisme bukanlah focus kajian, sebab yang sangat mendesak saat ini adalah bagaimana memperkuat gagasan Aceh sebagai negeri Syariat. UIN Ar-Raniri sebagai kampus Islam terbesar di Aceh harus memberi kontribusi terhadap penguatan syariat Islam. Fakultas Syariah UIN Ar-Raniri menjadi “dapur” yang turut meramu berbagai konsep pengembangan syariat Islam yang hendak didesiminasi kepada public (pemerintah dan

masyarakat). Kajian tentang syariat Islam, pendidikan Islam, sejarah Islam tampak menjadi narasi dominan.

Fenomena UIN Ar-Raniri menunjukkan bahwa dalam konteks pelembagaan multikulturalisme di kampus tersebut masih terjebak pada apa yang disebut Parekh (2009) sebagai multikulturalisme isolasionis. *Multikulturalisme isolasionis* adalah adanya kesempatan berbagai kelompok kultural di dalam masyarakat untuk menjalankan hidup secara otonom dan kurang terlibat dalam interaksi. Isolasionis mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain, tetapi berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai dan budaya dominan di atas yang lainnya. Dalam literature tentang multikulturalisme sering dicontohkan seperti masyarakat yang ada pada sistem “millet” di Turki Usmani atau masyarakat Amish di USA. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.¹⁶⁵

D. Pendidikan Multikulturalisme di Perguruan Tinggi dan Kontribusinya

Berbagai penjelasan dalam laporan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya membumikan multikulturalisme di di perguruan tinggi Islam di Indonesia masih terus mengalami proses perkembangan, dengan berbagai corak dan model sebagaimana ditunjukkan dalam kasus di IAIN Ambon, UIN Sahid Jakarta dan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Meskipun perkembangannya berbeda beda-beda namun membuka ruang bagi pengembangan suatu

¹⁶⁵ Afandi, “Mewujudkan Pendidikan Multikultural Di Indonesia (Sebuah Kajian Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara),” dalam *Wawasan Makro Pendidikan* (tt).

model Pendidikan Islam multikultural yang bisa memberi konstribusi konseptual bagi pengembangan wacana keilmuan maupun transformasi sosial di masyarakat. Konsep atau gagasan pendidikan Islam berbasis multikultural yang telah banyak dimunculkan saat ini perlu untuk terus dikembangkan, baik dari aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Keberadaan pendidikan Islam multikultural yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta dinamika masyarakat modern, sehingga dapat menjawab sekian banyak persoalan yang menyangkut dimensi perbedaan dan keragaman.

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sangat memerlukan sebuah kesadaran individu yang kemudian berimplikasi pada kesadaran kolektif untuk menerima dan menempatkan segala perbedaan dan keragaman sebagai bagian yang perlu dihargai dan dihormati. Upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural memang tidak mudah dilakukan. Tentu banyak tantangan yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses perjalanannya. *Pertama*, aspek sosio-kultural, yakni dari komponen masyarakat tetap akan muncul penentangan dari kelompok-kelompok yang cenderung tekstualis (ortodoks), baik dari kelompok muslim maupun non muslim terhadap wacana pendidikan multikultural ataupun pendidikan Islam multikultural di perguruan tinggi Islam. Hal ini pada dasarnya merupakan persoalan klasik, yang terkait dengan adanya perbedaan dalam memahami pesan-pesan wahyu, serta adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap isu multikulturalisme yang dapat melemahkan keyakinan seseorang dalam menjalankan agama.

Kedua, aspek politik, yakni dari komponen institusi pembuat kebijakan, terutama indtusi pendidikan tinggi, kementerian agama atau pemerintah daerah untuk memperkuat usaha-usaha dalam menghasilkan kebijakan yang berkenaan

dengan pendidikan (Islam) terhadap pentingnya pendidikan multikultural tidak bisa berjalan dalam waktu yang singkat. Hal ini sudah barang tentu tidak cukup bagi umat muslim –terutama bagi kelompok akademisi– jika hanya berpendapat demikian, tanpa ada usaha yang nyata untuk mengkaji, menggagas, melaksanakan dan mengembangkannya sehingga bisa berdampak pada kebijakan penerapan pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan. Ketiga, aspek pendidikan tinggi itu sendiri, yakni dari komponen lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan, mungkin akan terjadi sedikit kontadiksi dan kebingungan dalam proses pengelolaan pendidikan multikultural. Tawaran konsep dan bentuk pendidikan multikultural yang sangat mungkin untuk berbeda atau beragam dan merupakan hal yang sulit untuk disatukan, bisa jadi akan menghambat para praktisi pendidikan di perguruan tinggi.

Dari uraian dalam kajian ini, kiranya ada beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan pendidikan Islam multikultural di perguruan tinggi Islam Indonesia. *Pertama*, pendidikan multikultural yang secara inheren telah ada sejak bangsa Indonesia ini ada, yakni melalui falsafah bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya, merupakan modal penting untuk terus mengembangkan wacana pendidikan Islam multikultural menjadi lebih besar dan terkonsepsionalisasi secara akademik di perguruan tinggi Islam. *Kedua*, pendidikan Islam multikultural yang sesungguhnya dapat memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini dan merupakan konsep pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas, keragaman, serta apapun aspeknya dalam masyarakat, maka dalam konteks kajiannya dapat terus diperdalam dan digali dari sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus

mendekatkan umat Islam pada nilai-nilai spiritualitas agamanya. Ketiga, perlu kajian lanjutan bagi pengembangan konsep serta bentuk-bentuk pendidikan Islam multikultural, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat diimplementasikan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa pakar pendidikan Islam yang menyebutkan bahwa pengembangan pendidikan Islam adalah perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar relevan dengan tuntutan zaman. Agenda pengembangan pendidikan Islam multikultural yang paling utama menurut Atho' Mudzhar sebaiknya diorientasikan untuk: 1) menemukan konstruk profil dan hakekat pendidikan Islam multikultural yang sejalan dengan keIslaman dan keIndonesiaan, 2) memperkaya horizon pendidikan Islam multikultural dengan konsep dan pandangan yang filosofik dan mendasar, 3) memberikan alternatif pemecahan atas sejumlah problematika yang dihadapi pendidikan Islam multikultural, 4) membantu menemukan keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan pendidikan Islam multikultural kedepan, 5) memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan multikultural yang berdasarkan Islam, dan 6) melakukan koreksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pendidikan multikultural tersebut.¹⁶⁶

Pada pengembangan yang berorientasi pada muatan, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kontributif, di mana tujuan utama pendekatan ini adalah memasukkan materimateri tentang keragaman kelompok keagamaan (termasuk kelompok etnik dan kultur masyarakat). Kedua, pendekatan aditif, yaitu melakukan penambahan muatan-

¹⁶⁶Atho' Mudzhar, "Menimbang Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural", dalam *Jurnal Edukasi* (Juni 2008), h. 16.

muatan berupa konsep-konsep baru ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat memanfaatkan muatanmuatan khas multikultural sebagai pemer kaya bahan ajar, konsepkonsep tentang harmoni kehidupan bersama antar umat beragama yang akan memberi nuansa untuk mencairkan kebekuan “state of mind” (pemikiran) para pelaku pendidikan dalam merespons eksistensi agama-agama lain, serta tema-tema tentang toleransi, koeksistensi, pro-eksistensi, kerjasama, saling menghargai dan memahami.

Maksud utama pendidikan Islam berbasis multikultural adalah terwujudnya penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari mana pun datangnya dan berbudaya apapun. Harapannya agar dapat tercapai kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan dan kebahagiaan tanpa rekayasa. Maka pergruaun tinggi Islam sudah semestinya mendorong diskursus multikulturalisme sebagai gagasan akademik yang dirapkan memberi kontribusi. Pertama, pada pengembangang epistimologi keilmuan dalam memahami keragaman dan perbedaan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan lingkungan dan atmosfir akademik yang inklusif di kampus sebab selalu terinternalisasi nilai-nilai toleransi, kesederajatan, saling menghormati dan seterusnya. Ketiga, kampus-kampus Islam akan memiliki kesempatan untuk mendorong transformasi di masyarakat terkait dengan pembangun masyarakat egaliter sebagaimana spirit kedamaian dalam agama Islam itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa multikulturalisme telah melembaga dalam perguruan tinggi Islam di Indonesia meskipun dalam konteks yang berbeda-beda. Bagian ini menjadi catatan penutup yang akan menunjukkan dua hal penting tentang pelebagaan multikulturalisme yang terkait dengan peneiltian ini. *Pertama*, adalah beberapa kesimpulan yang dirumsukan sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini. *Kedua*, sejumlah pemikiran yang akan menjadi saran dan rekomendasi baik bagi para pengkaji multikulturalisme, lembaga pendidikan tinggi Islam maupun stake holders terkait yang berkepentingan.

A. Kesimpulan

Perguruan tinggi Islam di Indonesia juga mulai menyadari, betapa pentingnya membangun konsep pengelolaan keragaman untuk membangun kehidupan social yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal. Oleh sebab itu, dalam dua dekade terakhir gagasan multikulturalisme mulai menjadi diskursus akademik, dan terus direproduksi sebagai wacana intelektualitas yang penting di sejumlah perguruan tinggi Islam. Lembaga pendidikan Tinggi seperti UIN, IAIN dan STAIN mulai mendorong gagasan tentang Islam dan multikulturalisme dan peluang pelembagaanya di Indonesia.

Dengan demikian ada dua hal yang hendak dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, multikulturalisme telah menjadi perbincangan akademik dan intelektual yang serius di perguruan tinggi Islam di Indoensia, terutama di IAIN Ambon dan UIN Sahid Jakarta.

Multikulturalisme dipahami sebagai wacana yang sejalan dan relevan dengan spirit Islam dalam memandangkan keragaman. Didalamnya ada nilai-nilai kunci seperti penghormatan pada perbedaan, kesederajatan manusia, dan toleransi yang bukan saja relevan dengan Islam tetapi menjadi nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Meskipun gagasan ini dating dari Barat tetapi dianggap sebagai salah satu konsep penting dalam membangun kehidupan social yang harmonis dan damai di Indonesia. Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir, multikulturalisme dijadikan bahan seminar, menjadi objek kajian di pusat-pusat studi, bahkan diadopsi sebagai visi dan misi perguruan tinggi Islam.

Kedua, institusionalisasi gagasan multikulturalisme dalam sistem dan kehidupan akademik di perguruan tinggi Islam di Indonesia bisa dilihat dalam tiga model. Model penerimaan yang biasa-biasa saja karena multikulturalisme tidak dianggap sebagai gagasan penting yang sangat dibuthkan komunitas akademik di sebuah kampus, sebagaimana yang terjadi di UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Multikulturalisme dianggap sebagai gagasan yang belum mendesak untuk didesakkan kedalam diskursus intelektual karena kondisi sosiologi masyarakat Aceh yang homogen dan mengadaptasi syariat Islam sebagai nilai dominan dalam masyarakat. Sedangkan model penerimaan secara simbolik dimana multikulturalisme diadaptasi sebagai formal sebagaimana diterapkan di IAIN Ambon, yang telah mengadaptasi secara terbuka multikulturalisme dalam visi misi lembaga. Namun model simbolik seperti ini, memiliki kelemahan, sebab jika actor-aktor komunitas akademik setempat tidak bisa menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme dengan baik dalam nafas akademik, maka hal itu akan cenderung terjebak pada apa yang oleh para ahli disebut sebagai multikulturalisme isolasionis sebagaimana tampak di UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Adapun model substantif yang dilakukan oleh komunitas akademik di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta memiliki peluang untuk lebih menginternalisasi gagasan multikulturalisme secara lebih kuat dan dalam. Dalam model substantif ini multikulturalisme secara eksplisit dilembagakan (*institutionalize*), tetapi justru nilai-nilainya hidup dan dipraktikkan dalam aktifitas akademik dan atmosfer universitas secara keseluruhan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan multikulturalisme mesti tersu diperkuat melalui system pendidikan di perguruan tinggi Islam. Pendidikan Islam berbasis multikultural di perguruan tinggi Islam akan memperkuat penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari mana pun datangnya dan apapun budayanya. Harapannya agar perguruan tinggi Islam dapat memberi kontribusi pada pembangunan masyarakat akademik yang inklusif, moderat dan demokratis. Dengan demikian perguruan tinggi Islam di Indonesia yang saat ini jumlahnya telah mencapai 58 institusi dapat memberi kontribusi dalam pembangunan masyarakat egaliter sebagaimana spirit kedamaian dalam agama Islam itu sendiri.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian di atas, maka tim peneliti merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi baik dalam konteks akademik maupun dalam konteks reproduksi kebijakan tentang multikulturalisme di Indonesia.

Pertama, dalam konteks akademik perguruan tinggi Islam di Indonesia masih perlu terus mengkaji dan mengembangkan gagasan multikulturalisme terutama terkait dengan relevansinya dengan ajaran Islam dan pandangan local masyarakat Indonesia. Bahwa betul multikulturalisme lahir dari dikursus pemikiran dan fakta sosiologis masyarakat Barat, tetapi nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya merupakan nilai universal yang relevan

dengan spirit keislaman dan budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam.

Kedua, dalam konteks pengembangan kebijakan perlu ada penyamaan persepsi bahwa multikulturalisme bukan sekedar tentang pernyataan simbolik tetapi nilai-nilainya harus dilembagakan dalam segala aspek kehidupan. Dengan keyakinan semacam itu maka multikulturalisme dapat didesimianiasi kepada public (pemerintah dan masyarakat luas) untuk dikembangkan sebagai kebijakan pembangunan masyarakat terutama dalam membangun masyarakat harmonis dan damai di atas perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah M. Amin, 2000. “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam Ahmad, *Norma Permata, Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),
- Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Adib, Mohammad, 2012. “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu,” dalam *Jurnal Bio Kultur*, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012
- Afandi, “Mewujudkan Pendidikan Multikultural Di Indonesia (Sebuah Kajian Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara),” dalam *Wawasan Makro Pendidikan* (tt).
- Ahmed, Akbar S. 1993. *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terjemah M. Sirozi, (Bandung: Mizan)
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2012 *Acehnologi*. (Banda Aceh: Bandar Publishing)
- Ali, Rusydi dkk., 2017. *Panduan Akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniri Tahun Akademik 2017-2018* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniri Banda Aceh)
- Arfa, Arman Man. 2018. *Dialog Antar Iman dalam Interfaith Youth Come* (Yogyakarta: Literasi Press)
- Arosco, Jose Antonio. 2006. *Toppling The Melting Pot, Immigration and Multiculturalism in Ammerican Pragmatism*, (Bloomington: Indiana University Press)
- Azra, Azyumardi, 2005. *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai gagasan yang Berserak*, (Bandung: Nuansa)

- 1999. *Pendidikan Islam-Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos, 1999)
- 1999. *Islam Reformis, Dinamika Intelektual da Gerakan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada)
- 2002. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan)
- 2005. “Pendidikan Agama membangun Multikulturalisme di Indonesia,” sebuah pengantar dalam Zakiyuddin Baidhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga)
- 2007. *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dapat diakses dalam <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20yyumardi%20azra.htm>.2007.
- “Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. I, No. 2, 200
- Azizy, Qodri. 2000. “Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN”, dalam Komarudin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem & Prospek IAIN* (Jakarta: Ditbinpertaiss)
- Baidhowi, Zakiyudin. Tt. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Air Langga, tt)
- Bertrand, Jacques. 2004, *Nationalism anda Ethnic Conflik in Indonesia*. (Newyork: Cambridge University Press)
- Blum, Lawrence. 2001. “Recognition and Multiculturalism in Education.” Dalam *Journal of Philosophy of Education* 35 (4):539–559 (2001)
- Bourdieu, Pierre. 1997. *Outline of a Theory of Practice* (United kindom: Cambridge University)
- Daudy,Ahmad. 1978. *Syeikh Nuruddin ar-Raniry: Sejarah, Karya dan Sanggahan terhadap Wujudiiyyah di Aceh* (Bulan Bintang)

- Denzin N.K. dan YS. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitatif Research*. (California: Sage Publication)
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Fathoni, Rifai *Sejarah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*, dalam situs <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>
- Fikri, Mumtazul “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan,” dalam Journal
- 2014. “Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh”, *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)
- “Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan,” dalam *Journal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015.
- Ernas, Saidin 2015. *Kisah Rosnida dan Mukti Ali serta Larangan Belajar Islam di Barat*. Dimuat dalam Ambon Expres, 12 Februari 2015
- 2006. *Perjanjian Malino dan Penyelesaian Konflik Maluku*, (Jakarta: Tesis Magister Departemen Ilmu Politik Univ. Indonesia)
- Furnivall, 1944. *Netherlands India A Study of Plural Economy*, (Cambridge: Cambridge University Press)
- G.R. Lono Lastoro Simatupang, *Metode, teori dan Teknik Penelitian*, (Sleman; Pustaka Widayatama,
- Graham JR, Otis L. 2006. *A History of Ammerica's Immigration Crisis* (USA: Rowman and Littlefield Publishers)
- Indra, Hasbi, 2015. “Pendidikan Tinggi Islam dan Tantangan Ke Depan,” dalam *Jurnal Fikrah* 8, no. 1 (2015): 10

- 2001. “Diskursus Pendidikan Islam Kontemporer”, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (ed.) Abuddin Nata (Jakarta: Grasindo)
- Hanurawan, Fattah dan Peter Waterwort. 1997. *Multicultural Perspectives in Indonesian Social Studies Education Curriculum*, dalam *The Journal of Education*, December 1997, volume 4, special edition.
- Hassan, Noorhaidi. 2016. *Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Southeast Program Publications, 2010), 45 Sahri al-Daulah 240 Vol. 6, No.1, April 2016
- Hefner, Robert W. 2007. Politik Multikulturalisme- Menggugat Realitas Kebangsaan (Yogyakarta: Kanisius)
- H. Djon, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dipublikasi dalam <https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-islam-di-indonesia/>
- Hidayat, Komaruddin & Hendro Prasetyo. 2000. *IAIN Problem dan Prospek*, (Jakarta: DEPAG RI)
- Hrair, R. 1985. *Dikmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in Arab World*, (New York: Syracuse University Press)
- Husaini, Adian. 2005. *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar)
- Khairuddin, Ahmad. 2007. “Konstitusi Madinah: Latar Belakang dan Dampak Sosialnya” dalam *Jurnal Al-Banjari* Vol 5, No. 9/ Januari–Juni 2007
- Kymlica, Wil. 2011. *Kewargaan Multikultural* (Jakarta: Pustaka LP3ES)
- Kumar, Krisnan. 2002. “The Nation-State, the European Union and Transnational Identities”, dalam Alsayyad and Manu el Castells (eds.), *Muslim Europe or Euro-Islam: Politics*,

- Culture, and Citizenship in the Age of Globalization* (Barkeley: University of California at Berkeley).
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan)
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia; Pustaka Utama)
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistimologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu)
- LPM IAIN Ambon, 2007. *Dokumen Penjaminan Mutu IAIN Ambon*, (Ambon: LPM)
- Madjid, Nurcholish. 1993. *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, (Bandung: Zaman)Madjid, Nurcholish *Islam Kemodernan dan Keindonesia*, (Bandung:Mizan)
- 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina)
- 1979. *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta:Paramadina)
- 2004. *Indonesia Kita*. (Jakarta: Gramedia Pustaka)
- Marya, Masibhubnu. 2017. *Pembaruan Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra*, (Skripsi di UIN Bandar Lampung)
- Mondal, Ashoman. 2001. *Islam And Multiculturalism: Some Thoughts On A Difficult Relationship*, (Brunel University, Uxbridge, UB83PH, UK),
- Miller, David. 1999. *Principles of Social Justice*, (Cambridge: Harvard University Press)
- Mujiburrahman, 2013. “Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, dan Keanekaragaman dalam Islam,” dalam *Jurnal Addin* Vol. 7 No. 1 Februari 2013
- Mudzhor, Atho. 2005. *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis*

- Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. 2005),
- Murphy, Michael. 2012. *Multiculturalism, a Critical Intorduction* (New York: Routledge)
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta:Bulan Bintang)
- 1978. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,)
- 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta:UI Press, 1986),
- Nata, Abudin, “Islam MAzhab Ciputat yang Menasional dan Menduian,” dalam <http://abuddin.lec.uinjkt.ac.id/articles/islam-madzhab-ciputat-yang-menasional-dan-mendunia>
- Nur, Yusliani dan Mansyur. 2005. *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia* (Banjarmasin: Banjarmasin Press)
- Deliar Noer. 2003. *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Risalah)
- Okin, Susan Moller. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Woman?* (Princeton: Princeton University Press)
- Olson, Steve. 2006. “Mapping Human History: Discovering Our Past Trough Our Genes, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, *Mapping Human History Gen, Ras, dan Asal Usul Manusia*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta)
- Pairin, *Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam*, dalam file:///C:/Users/HP/Downloads/79-137-1-SM%20(2).pdf
- Parekh, Bikhu. 2002. *Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge: Harvard University Press)
- Philips, Anne. 2007. *Multiculturalism Without Culture*, (New Jersey: Princeton University Press)

- Qodir, Zuly. 2015. “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) *Fiqh Kebenikaan* (Bandung: Mizan)
- . (Jakarta: Badan Pusat Statistik)
- Rahim, Husni. 2001 *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: Logos)
- Rahman, Budi Munawar. 2010. *Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme, Islam Prigresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: PT. Grasindo)
- Raihani, 2017. *Creating Multicultural Citizens, A Potrayal of contemporary Indonesian Education*, (New York: Routledge)
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, “Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen” (Yogyakarta: Kreasi Wacana)
- Sahri, 2016. “Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam,” dalam *AL-DAULAH JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* Volume 6, Nomor 1, April 2016
- Suparlan, Parsudi. 2004. “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Makalah pada Sarasehan Nasional, *Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.
- Sjah, H. Ismail Muhammad. *Perkembangan UIN Ar-Raniri Banda Aceh* (Makalah laporan kegiatan, tidak diterbitkan)
- Syam, Nur, 2009. *Tantangan Multikultuarlisme di Indoesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius)

- TIM BPS, 2011. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010* Tarigan, Azhari Akmal. 2007. *Islam Mazhab HMI Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan (NDP)*, (Jakarta:Kultura GP Press Group)
- Wakano, Abidin dkk. 2018. *Pengantar Multikultural* (Jakarta: IAIN Ambon Press)

Situs Berita Online

- <https://www.annah.com/2015/01/09/bawa-mahasiswa-ke-gereja-udin-jatuhkan-sanksi-pada-dosen-rosnida/>. Diakses 27 Agustus 2018
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dosen-iain-aceh-ajak-mahasiswa-kuliah-di-gereja-diancam-dibunuh.html>. diakses tanggal 27 Agustus 2018
- <http://www.mui.or.id/files/07-Fat%20Munas-Pluralisme.pdf>, dapat diakses juga melalui <https://melatipandanwangi.files.wordpress.com/2011/03/fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama.pdf>
- <http://www.uinjkt.ac.id/id/rektor-non-muslim-boleh-belajar-di-udin-jakarta/>, diakses 9 September 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negari_di_Indonesia
- <http://okezone.com/>, diakses pada tanggal 09/02/2016 Sahri al-Daulah 248 Vol. 6, No.1, April 2016

<https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/11/24/nyb4sn22-kampanye-moderasi-islam-mendesak>
<https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>
<https://www.uinjkt.ac.id/id/uin-jakarta-komitmen-capai-research-university/>
<https://www.uinjkt.ac.id/id/visi-misi-dan-tujuan/>
<http://imamsuprayogo.lecturer.uin-malang.ac.id/2012/10/08/paradigma-wider-mandate-dalam-engembangan-ptain/>
<http://kabarkampus.com/2018/07/mahasiswa-non-muslim-dapat-belajar-di-uin-jakarta/>
<https://ppim.uinjkt.ac.id/tentang-kami/ppim/>
<http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>
<http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/pages/visi-misi>
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/14/156510/miumi-aceh-termasuk-daerah-paling-toleran-sejak-dulu.html>